

Jurnal Pendidikan Sejarah

Vol. 4 No. 1 Januari 2015
ISSN 2301-461X

Diterbitkan oleh
**Program Studi
Pendidikan Sejarah Pascasarjana
Universitas Negeri Jakarta**

Dewan Redaksi:

Ketua
Prof. Dr. Tuti Nuriah Erwin

Wakil Ketua
Kurniawati, S.Pd., M.Si.

Penyunting
Dr. Abdul Syukur, M.Hum.
Dirgantara Wicaksana, S.Pd.,
M.Pd.

Alamat Redaksi
Gedung M LT. 1
Program Studi
Pendidikan Sejarah Pascasarjana
Universitas Negeri Jakarta
Jl. Rawamangun Muka
Jakarta Timur 13220

*Keaslian tulisan ini menjadi
tanggung jawab penulis. Redaksi
berhak mengubah tulisan tanpa
mengubah maknanya*

Daftar Isi

**Pendidikan Sejarah dalam Kurikulum Republik Federal
Jerman : *A Lesson Learned***
Kurniawati **1-13**

**Kurikulum Sejarah Jenjang SMA: Sebuah Perbandingan
Indonesia-Australia**
Abrar **14-31**

**Sistem Pendidikan dan Pendidikan Sejarah di
Singapura Sebagai Refleksi bagi Pengembangan
Kurikulum di Indonesia**
Djunaidi **32-41**

**Perbandingan Kurikulum Pendidikan Sejarah Rusia
dan Indonesia**
Jumardi **42-51**

**Kurikulum Pendidikan Sejarah di Malaysia: Sebagai
Bahan Refleksi Perkembangan Kurikulum Sejarah di
Indonesia**
Nur'aeni Marta **52-67**

Kurikulum Pendidikan Sejarah di Amerika Serikat
Bahri **68-79**

Kurikulum Pendidikan Sejarah di India
Naijan **80-88**

Pendidikan Sejarah dalam Kurikulum di Republik Federal Jerman: *A Lesson Learned*

Oleh : Kurniawati

Pendidikan Sejarah PPS UNJ

Abstract

The aim of this article is to find out what philosophy behind the education curriculum in Germany, its system and structure especially on history curriculum to be compared with Indonesia's experience. Traditionally the German educational system is strongly influenced by the tradition of naturalistic humanism - specifically those of the Humboldt philosophy regarding as Bildung. History Education is a compulsory subject that is given to students from grade 6-10 as much as two hours of lessons per week, while in grade 10-12 or 13 lessons, history is no longer a compulsory subject. In grade 6-9 curriculum is based on chronological history revolves around the history of Western Civilization, in grade 10 history lessons relating to contemporary history in the 20th century, while in grade 11-12 / 13 history lesson focused on the history of modern Europe and non- European history.

Key words: curriculum, history, history education, bipartite, tripartite, bildung, humanism, naturalistic

Abstrak

Tujuan dari artikel adalah mengetahui filosofi kurikulum Jerman, sistem dan strukturnya terutama dalam kurikulum sejarah. Secara tradisional sistem pendidikan Jerman sangat dipengaruhi oleh tradisi humanisme-naturalistik terutama dari aliran filsafat Humboldt mengenai Bildung. Pelajaran sejarah merupakan pelajaran wajib yang diberikan kepada siswa dari grade 6-10 sebanyak dua jam pelajaran perminggu sedangkan pada kelas 10-12 atau 13 pelajaran sejarah tidak lagi menjadi pelajaran wajib. Pada grade 6-9 kurikulum sejarah disusun berdasarkan kronologis berkisar pada sejarah Peradaban Barat, pada grade 10 pelajaran sejarah berkaitan dengan sejarah kontemporer pada abad ke-20 sedangkan pada grade 11-12/13 pelajaran sejarah difokuskan pada sejarah Eropa Modern dan sejarah non- Eropa.

Kata Kunci: kurikulum, sejarah, pendidikan sejarah, bipartit, tripartit, bildung, humanisme, naturalistic

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting jika tidak dikatakan sebagai faktor yang terpenting dalam suatu negara. Kemajuan suatu negara sangat berkaitan dengan kemajuan tingkat pendidikan di negara tersebut. Hal tersebut terjadi karena pada dasarnya pendidikan bertujuan menghasilkan manusia-manusia unggul yang akan menjadi tulang punggung pembangunan suatu bangsa. Untuk meningkatkan mutu pendidikan suatu negara maka suatu kurikulum disusun

sebagai pedoman untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum pada dasarnya juga harus mengakomodasi kemajuan zaman sehingga menjadi suatu hal yang jamak jika kurikulum diperbaharui setiap kurun waktu tertentu. Akan tetapi penerapan suatu kurikulum di suatu negara sangat tergantung pada perpolitikan yang sedang berlaku di negara tersebut. Dengan demikian suatu kurikulum haruslah *politically accepted*.

Pendidikan Sejarah adalah salah satu bidang pengajaran yang sangat terpengaruh dengan politik yang berkuasa di suatu negara. Pendidikan di Jerman merupakan salah satu contohnya. Jerman merupakan salah satu negara yang mempunyai "beban" sejarah terutama berkenaan dengan masa-masa Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Kekalahan perang membuat Jerman terbelah menjadi Jerman Barat yang menganut sistem kapitalis dan Jerman Timur yang menganut sistem komunis. Reunifikasi Jerman pada 1990 memberikan tantangan tersendiri bagi Jerman terutama di bidang pendidikan dan pendidikan sejarah mengenai pembekalan apa yang harus diberikan kepada siswa yang akan mewarisi Jerman di masa depan.

Jerman tahun 1945 merupakan negara yang terkoyak akibat kekalahan yang dideritanya dalam Perang Dunia II. Jerman yang kuat dan agresif pada masa pemerintahan NAZI pimpinan Hitler pun di bawah kendali sekutu. Daerah-daerah di Jerman pun dibagi-bagi di antara negara sekutu yaitu Inggris, Amerika Serikat, Prancis dan Uni Sovyet. Pada tahun 1949, akibat semakin kuatnya rivalitas antara Amerika Serikat yang berhaluan kapitalis dan Uni Sovyet yang komunis berimbas kepada Jerman. Pada 1949 bagian Jerman yang diduduki oleh Amerika Serikat, Inggris dan Prancis bergabung menjadi Republik Federal Jerman yang berhaluan liberal-kapitalis. Pada tahun yang sama pula bagian Jerman yang diduduki Uni Sovyet menjadi Republik Demokratik Jerman yang berhaluan komunis.

Pembangunan selanjutnya di Republik Federal Jerman dan Republik Demokratik Jerman mengikuti selera negeri induk masing-masing. Di RFJ, partai-partai politik seperti CDU yang

beraliran liberal dan SPD yang beraliran sosialis diperbolehkan untuk berdiri. Usaha-usaha untuk de-Nazifikasi dilakukan tetapi berbeda dengan yang terjadi di zona pendudukan Uni Sovyet, usaha menghilangkan pengaruh NAZI di wilayah pendudukan Barat di Jerman tampak ragu-ragu karena sepanjang seorang yang dipekerjakan sekutu terutama yang berkaitan dengan administrasi dapat melakukan fungsinya dengan baik maka latar belakang NAZI yang dimilikinya tidak terlalu menjadi persoalan. Namun begitu, para pemimpin NAZI yang dianggap bertanggungjawab pada Perang Dunia II tetap dibawa ke pengadilan di Nuremberg untuk diadili. RFJ atau dikenal juga sebagai Jerman Barat dibagi menjadi negara-negara bagian. Pada tahun 1949 terbit Undang-Undang Federal yang menyatakan bahwa negara bagian dan bukan pemerintah federal yang bertanggungjawab terhadap pendidikan. Terjadi perdebatan di kalangan partai-partai besar yaitu CSU dan SPD mengenai pendidikan. CSU menginginkan tujuan dan kegiatan pendidikan itu bersifat kolektif untuk kepentingan masyarakat sehingga penting untuk menyiapkan lulusan yang berkualitas. Sementara seterusnya Partai SPD menginginkan pendidikan sebagai hak azasi yang menekankan pada usaha pendidikan itu atas inisiatif sendiri, persamaan dan tindakan pengimbalan.

Di RDJ, Uni Soviet menempatkan Georgii Zhukov sebagai pemimpin di sana yang segera menasionalisasi semua bank dan pabrik-pabrik yang masih tersisa dan juga menerapkan pertanian kolektif "ala Uni Sovyet" di RDJ. Partai-partai politik yang ada dilarang karena hanya dimungkinkan satu partai tunggal yaitu Partai Persatuan Sosialis (SED) yang berhaluan komunis. Untuk membasmi

sisa-sisa kekuatan NAZI, banyak pengikut-pengikut NAZI yang dikirim ke kamp-kamp untuk di re-edukasi dan bahkan dieksekusi. Semua lapisan masyarakat dari pelajar, pekerja atau buruh dan wanita diwajibkan menjadi anggota organisasi yang berorientasi pada SED. Kurikulum baru diperkenalkan dengan menekankan ajaran Marxisme-Leninisme. Model pendidikan mengacu kepada Uni Sovyet seperti prinsip “pengajaran politeknik”. Negara mengontrol dengan ketat segala hal yang berhubungan dengan masyarakat termasuk pendidikan untuk memastikan terlaksananya masyarakat sosialis. Akibatnya peningkatan di bidang pendidikan lebih bersifat kuantitatif daripada kualitatif meskipun terjadi perubahan sejak tahun 1980an ketika pemerintah Jerman Timur mulai meningkatkan kualitas pendidikan negaranya sesuai dengan situasi yang berkembang di dunia internasional.

Tahun 1989 merupakan tahun yang paling krusial terutama bagi dua Jerman dan negara-negara blok Timur seiring dengan kolapsnya rezim komunis di Eropa Timur. Jatuhnya rezim komunis di Jerman Timur diiringi keinginan rakyat Jerman Timur untuk bersatu dengan Jerman Barat. Sementara itu, penyatuan kembali Jerman juga menjadi isu yang tidak pernah hilang di Jerman Barat meskipun hanya sedikit yang memperkirakan hal tersebut dapat terwujud dengan cepat. Pada 9 November 1989, Tembok Berlin yang menjadi lambang pemisahan kedua negara sekaligus batas blok Barat dan Timur runtuh. Setelah negosiasi yang panjang antara pihak Jerman Barat dan Jerman Timur dan 4 kekuatan besar pemenang Perang Dunia II yaitu Amerika Serikat, Inggris, Perancis dan Uni Soviet yang dikenal dengan two plus four formula, unifikasi Jerman pun resmi terjadi pada tanggal 3 Oktober 1990.

Unifikasi Jerman membawa perubahan besar dalam sistem politik terutama bagi wilayah bekas Jerman Timur yang harus menyesuaikan dengan wilayah bekas Jerman Barat. Dalam pembukaan undang-undang tentang sekolah khusus ditetapkan tujuan umum pendidikan dengan tekanan pada pengembangan individualitas dan partisipasi dalam kehidupan masyarakat.

Jerman bersatu mengadopsi sistem liberal yang diterapkan di bekas RFJ, dewasa ini merupakan negara dengan luas 356.957 kilometer persegi dengan penduduk lebih dari 80 juta orang merupakan salah satu negara dengan wilayah terluas dan ekonomi terkuat dan jumlah penduduk terbesar di Eropa. Makalah ini ingin menjawab pertanyaan Apa yang menjadi landasan filosofis kurikulum Jerman, bagaimana sistem dan struktur kurikulum Jerman, bagaimana pelajaran sejarah dalam struktur kurikulum Jerman dan bagaimana pengalaman Jerman dibandingkan dengan Indonesia.

KAJIAN TEORETIK

Sejarawan Inggris Collingwood (1985: xxxix-xliii) mengatakan bahwa sejarah adalah suatu bentuk penelitian atau inquiri. Sejarah menurutnya adalah sains sehingga memungkinkan di dalamnya untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan kemudian berusaha mencari jawabannya. Oleh karena sejarah adalah sains maka ia mempunyai bentuk pemikiran yang khusus sehingga untuk menjawab sifat, objek, metode serta bentuk pemikiran haruslah ahli-ahli sejarah dan mempunyai pengalaman dalam pemikiran sejarah.

Rowse (2014:34) mendefinisikan sejarah sebagai catatan kehidupan manusia di masyarakat dalam lingkungan

geografi dan fisik mereka. Unsur manusia dengan demikian adalah hal yang memegang peranan penting karena hanya kehidupan manusia yang dapat dicatat sebagai sejarah.

Pendidikan Sejarah menurut Hasan (2012:89-90) merupakan media yang paling ampuh dalam memperkenalkan masa lampau dan tantangan yang mereka hadapi kepada siswa dengan demikian mereka mengetahui dampak yang ditimbulkan oleh peristiwa-peristiwa masa lampau tersebut pada masa sesudahnya dan juga pada masa kini.

Kochhar (2010:10-11) mengatakan bahwa pembelajaran sejarah bersifat kronologis, yang merupakan kunci dalam memahami masa lalu dan masa sekarang.

Pendidikan sejarah dengan demikian dapat disimpulkan sebagai suatu cara memperkenalkan masa lampau atau suatu peristiwa yang terjadi pada masa lampau secara kronologis sehingga siswa dapat mengetahui akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa-peristiwa masa lampau itu pada masa sesudahnya dan juga pada masa kini.

Kurikulum menurut Pelegrino (2004:26) terdiri dari pengetahuan, keterampilan-keterampilan dalam lingkup mata pelajaran-mata pelajaran (*subject matters*) di mana guru mengajar dan siswa belajar.

Tujuan utama kurikulum menurut McKernan (2008:4) adalah *...to enable student to think and to make critically informed choices*", memungkinkan siswa berpikir dan membuat pilihan-pilihan yang benar-benar ia telah memiliki pengetahuan yang mendalam atau kritis mengenainya.

Dua pendapat mengenai kurikulum itu mempunyai dua benang merah

bahwa kurikulum adalah seperangkat pengetahuan dan keterampilan yang diberikan dalam bentuk mata pelajaran-mata pelajaran yang diajarkan kepada siswa-siswa sehingga mereka mempunyai pengetahuan yang mendalam mengenainya yang pada gilirannya mereka diharapkan dapat mengambil manfaat dari pengetahuan mendalam yang dimilikinya tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah penelitian kepustakaan. Zed (2008:1-2) mengatakan bahwa penelitian pustaka atau *library research* adalah memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya, membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Filosofis Kurikulum

Setelah reunifikasi, RFJ melakukan reformasi dalam bidang pendidikan. Pengaruhnya terutama dirasakan oleh penduduk yang tadinya berada di wilayah Jerman Timur yang komunis. Sistem pendidikan Jerman adalah sistem bi-partite (kemudian hari menjadi sistem *tri-partite*) yaitu *Hauptschule* dan *Gymnasium*. Sistem pendidikan Jerman memiliki akar panjang hingga pada Abad Pertengahan di mana pendidikan merupakan lembaga yang banyak memengaruhi pendidikan warga di Jerman. Pengaruh gereja baru berkurang sejak abad ke-17 ketika secara resmi pendidikan dianggap tanggungjawab negara. Selain gereja pendidikan di Jerman juga sangat dipengaruhi oleh dua tradisi pengetahuan yaitu humanisme dan naturalisme. Pandangan humanisme-naturalis ini didasarkan pada

humanisme Humboldt-seorang filsuf berpengaruh di Jerman. Utamanya adalah konsep Humboldt tentang *Bildung* yaitu "pengertian rasional" tentang tatanan dunia. Pandangan filosofis ini menekankan pada penyatuan pengetahuan akademik dengan pendidikan moral yang bersifat individualistis. Penekanan pada rasional tampak pada pentingnya matematika dan sains, sedangkan pendidik diharapkan juga bertindak sebagai pendidik moral bagi siswanya. Tradisi pengetahuan yang berkembang di Jerman tersebut berpengaruh pada sistem pendidikan Jerman yang mengenal sistem merefleksikan pandangan naturalistik di mana guru diharapkan menerapkan pendekatan berorientasi ke siswa dan menyiapkan mereka untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah kejuruan, sementara *Gymnasium* merefleksikan pandangan humanistik. Sistem tri-partit diperkenalkan pada tahun 1964 di Jerman Barat dengan diperkenalkannya *Realschule*. *Realschule* menerapkan kurikulum yang sama bagi seluruh negara bagian berbeda dengan *Hauptschule* dan *Gymnasium* yang kurikulumnya diserahkan kepada masing-masing negara bagian dan sekolah-sekolah.

Sistem federasi yang dianut oleh RFJ mengacu kepada *Basic Law* atau *Grundgesetz* yang mengatur bahwa setiap negara bagian *lander* mempunyai kedaulatan sendiri dalam bidang pendidikan, sains dan kebudayaan tetapi tetap mempunyai tanggungjawab bersama untuk saling bekerja sama dalam kerangka negara federasi. Sejak 1990, RFJ terdiri dari 16 *lander* yang masing-masing negara bagian tersebut mempunyai konstitusinya sendiri yang tidak bertentangan dengan *Basic Law*. Konsekuensi dari sistem negara bagian ini menyebabkan kurikulum pendidikan di Jerman ditentukan oleh menteri-menteri

pendidikan negara bagian yang terdiri dari tiga instrumen yaitu tabel berisi jumlah jam belajar perminggu, mata pelajaran sesuai dengan "grade" dan jenis sekolah, pedoman kurikulum dan pemberian wewenang penulisan dan pengadaan buku teks. Mata pelajaran utama di sekolah tingkat dasar secara umum adalah membaca, menulis, aritmatika, *sachunterricht* yaitu pelajaran yang mengenalkan siswa pada ilmu-ilmu alam dan ilmu-ilmu sosial, seni, musik, olahraga dan pendidikan agama. Pada tingkat sekolah menengah pada umumnya meneruskan mata pelajaran pada tingkat dasar ditambah dengan paling sedikit satu bahasa asing, ilmu-ilmu alam dan ilmu-ilmu sosial.

Kurikulum di Jerman dihubungkan dengan dua hal yaitu didaktik dan *Lehrplan*. Didaktik berhubungan dengan teori-teori pendidikan, prinsip-prinsip pendidikan dan materi pelajaran sehingga tidak langsung dihubungkan dengan strategi pembelajaran. Meskipun kurikulum merekomendasikan metode mengajar tertentu, guru dipersilahkan mengembangkan sendiri metode pembelajaran yang dirasakan tepat oleh mereka. Namun, dengan semakin kecilnya rasio guru dan siswa di Jerman yang saat ini rata-rata 1:15 maka kecendrungan metode mengajar yang digunakan adalah *student-centered*.

Sementara itu *lehrplan* adalah silabus yang merupakan acuan langsung bagi guru dalam pembelajaran sehari-hari. Di dalamnya hanya berisi definisi dari tujuan dan spesifikasi dari mata pelajaran. Tujuan umum kurikulum pendidikan di Jerman ditentukan oleh peraturan sekolah yang dapat tersirat dalam suatu mukaddimah suatu keputusan, sedangkan tujuan khusus terdapat dalam pedoman kurikulum yang ditentukan oleh negara

bagian. Pedoman kurikulum biasanya dibuat oleh tim ahli yang ditunjuk yang seringkali melibatkan universitas atau lembaga-lembaga penelitian.

Bahasa Jerman merupakan bahasa yang dipergunakan dalam pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi dengan pengecualian di beberapa sekolah swasta yang menerapkan kelas bilingual. Pengecualian juga ditujukan kepada kelompok minoritas Denmark di Schleswig-Holstein yang dapat memilih sekolah swasta khusus *Erzatzschulen* yang menjadikan bahasa Denmark sebagai bahasa utama. Minoritas Sorbia yang tinggal di daerah Bradenburg dan Sachsen juga termasuk yang mendapat pengecualian. Kurikulum di setiap negara bagian seperti telah dijelaskan di atas, dapat berbeda-beda karena setiap negara bagian mempunyai otonomi dalam pendidikan. Namun begitu, untuk koordinasi dan harmonisasi antarnegara bagian diadakan sebuah forum pertemuan yaitu *Kultusminister Konferenz* (KMK).

Sistem dan Struktur Kurikulum

Wajib sekolah di Jerman adalah 9-10 tahun sejak anak berusia 6 tahun yang disediakan pemerintah secara gratis. Pendidikan dasar (*Grundschule*) berlangsung selama 4 tahun (6 tahun di Berlin dan di beberapa negara bagian grade/kelas 5-6 dilaksanakan di lembaga perantara yang mempersiapkan siswa masuk ke sekolah menengah). Bagi anak-anak usia wajib belajar yang memilih untuk tidak belajar penuh waktu misalnya memilih home schooling maka usia wajib belajar hingga berusia 18 tahun. Pada usia 6 tahun, semua anak memasuki *grundschule* atau sekolah dasar di masing-masing wilayah yang menerapkan sistem yang sama. Pada akhir *grade* 4 siswa memasuki sekolah

menengah pertama yang merupakan fase orientasi dalam tipe sekolah yang berbeda atau *orientierungsstufe*. Pada masa sekolah menengah pertama ini siswa dipersiapkan untuk memasuki program-program yang dianggap sesuai dengan minat dan bakatnya dengan yaitu *Hauptshule*, *Realschule*, *Gymnasium*, atau *Gesamtschule*. Transisi dari sekolah dasar ke salah satu tipe sekolah dapat berbeda-beda menurut negara bagian. Keputusan untuk memasuki salah satu tipe sekolah ditentukan oleh penilaian sekolah dasar dengan persetujuan orang tua. Keputusan untuk memasuki tipe sekolah juga ditentukan oleh pemegang kebijakan pendidikan dan kriteria yang telah ditentukan.

Hauptshule merupakan program lanjutan bagi siswa yang akan melanjutkan ke sekolah kejuruan. Sekolah ini mengarahkan siswa untuk magang setelah mendapatkan ijazah tamat belajar. Sejak tahun 1960 tren siswa mengambil *haupshule* semakin menurun karena anak yang mengambil program ini sering mendapat pandangan miring dari masyarakat mengingat sekolah ini cenderung menerima siswa dengan nilai rendah atau mereka yang berasal dari kalangan imigran. Bagi siswa yang memperoleh nilai baik atau nilai rata-rata maka mereka dapat memasuki program *realschule*. Sekolah ini mempersiapkan siswa sebagai pegawai atau buruh kelas menengah.

Bagi siswa yang berprestasi tinggi maka *Gymnasium* merupakan pilihan utama bagi siswa dari sekolah dasar. Tujuan utama bagi siswa *Gymnasium* adalah melanjutkan pendidikan hingga level perguruan tinggi. Jika pada grade 5-10 tekanan pelajaran setiap sekolah berbeda-beda (misalnya dalam bahasa dan

program-program seni) maka mulai *grade* 11 siswa mulai memilih spesialisasi dalam bidang bahasa, seni, ilmu-ilmu sosial (pendidikan kewarganegaraan, sejarah atau geografi, agama atau filsafat) dan bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam. Pada *grade* 12/13 siswa menjalankan ujian akhir yang nilai akhirnya dapat menjadi syarat untuk memasuki program-program tertentu misalkan kedokteran meskipun secara umum tidak ada kaitan antara spesialisasi atau pilihan siswa pada sekolah menengah dengan pilihan studinya di pendidikan tinggi.

Di negara bagian yang dikuasai oleh Partai SPD, sejak 1970 berusaha untuk mereformasi sistem pendidikan dengan menciptakan *gesamtschule* untuk pendidikan tingkat menengah. *Gesamtschule* (sekolah komprehensif) ingin menghilangkan kompleksitas sistem pendidikan tri-partite (*Haupschule*, *Realschule* dan *Gymnasium*) di Jerman sehingga dalam *gesamtschule* dimungkinkan siswa memilih tiga jalur berbeda di dalam satu sekolah. Akan tetapi sistem *gesamtschule* tidak terlalu populer karena mendapat tentangan orang tua, persatuan guru dan Partai CDU. Dewasa ini alih-alih menyederhanakan kerumitan sistem pendidikan Jerman, *Gesamtschule* justru menambah kerumitan dalam sistem pendidikan di Jerman. Beberapa *Gesamtschule* disebut juga sebagai *Ganztagsschulen* atau *all-day schools* karena jam belajarnya yang lebih lama daripada sekolah-sekolah tradisional.

Pembiayaan pendidikan wajib dibagi diantara lander dan pemerintah lokal yang merupakan tradisi sejak abad ke-19. Pemerintah lokal bertanggungjawab pada pengeluaran eksternal sekolah seperti membangun gedung sekolah dan perawatannya, peralatan dan fasilitas sekolah, bahan-bahan pengajaran,

pembukaan dan penutupan sekolah-sekolah, pengeluaran operasional, pengeluaran untuk staf-non guru dan bantuan finansial untuk siswa. Lander bertanggungjawab pada urusan internal seperti menentukan kurikulum sekolah, *prerequisite*, isi dan struktur sistem, penilaian dan pelatihan guru, alokasi dan pembayaran gaji guru. Sekolah swasta pembiayaan terbesarnya tidak ditanggung dana publik tetapi aturan mengenainya sangat bervariasi dari satu lander ke lander lainnya. *Basic Law* sendiri pada prinsipnya melarang diskriminasi terhadap siswa.

Untuk sistem penilaian atau evaluasi yang dilaksanakan di Jerman, berkisar pada rentang 1-6. Nilai 1 untuk nilai yang terbaik dan 6 untuk nilai yang terburuk. Penilaian berdasarkan ujian tertulis dengan kontribusi ujian lisan lazim dilakukan di semua level pendidikan. Jika dianggap tidak memenuhi standar, siswa dapat diminta untuk mengulang kelas yang sama. Pada umumnya guru merupakan pihak yang paling menentukan dalam penilaian siswa. Pada akhir masa pendidikan menengah, siswa yang dianggap telah memenuhi standar mendapatkan sertifikat atau ijazah. Siswa di Jerman masuk sekolah selama antara 188-208 hari selama satu tahun akademik (Agustus-Juli) menurut aturan masing-masing lander dengan 6 minggu libur selama musim panas dan beberapa hari libur lainnya. Untuk menghindari kemacetan lalu lintas, pemerintah federal mengatur agar liburan di 16 negara bagian secara bergantian misalnya pada tahun ini liburan musim panas di Berlin dimulai pada bulan Juni sedangkan di Bavaria pada bulan Juli maka tahun berikutnya akan terjadi sebaliknya. Sekolah berlangsung 5 atau 6 hari seminggu dengan 17-23 jam pelajaran/minggu untuk

sekolah dasar, 28-30 jam pelajaran/minggu untuk sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Masing-masing jam pelajaran berlangsung selama 45 menit. Untuk guru, jumlah jam mengajar pertahun adalah 613-959 jam.

Tradisi pendidikan tinggi di Jerman tidak membebankan biaya pendidikan kepada mahasiswanya. Akan tetapi subsidi berat yang harus ditanggung pemerintah (termasuk kepada banyak mahasiswa asing) menyebabkan sejak 2004 mahasiswa diharuskan membayar biaya pendidikan antara \$500-650. Meskipun jumlah tersebut cukup rendah dibandingkan dengan biaya pendidikan tinggi di Amerika Serikat atau wilayah Eropa lain, kebijakan tersebut mendapat tentangan keras dan protes sehingga kebijakan ini dibatalkan atau direvisi di banyak negara bagian.

Terdapat dua jenis pendidikan tinggi di Jerman yaitu politeknik atau *fachhochschulen* dan Universitas. Sebagaimana sekolah menengah, sejak 1970-an ada usaha untuk menggabungkan sekolah politeknik dan universitas ke dalam satu institusi. Akan tetapi usaha tersebut tidak mendapat hasil yang diharapkan. Penggabungan yang berhasil dilakukan justru terjadi pada fakultas pendidikan guru yang digabungkan dengan universitas. Terjadi pula peningkatan beberapa fakultas pendidikan guru menjadi universitas. Sampai 2013 terdapat 427 institusi pendidikan tinggi di Jerman terdiri dari 108 universitas, 6 institusi pendidikan guru/*Pedagogische*

Hochschulen, 17 seminari, 52 sekolah seni, 215 institut teknik dan 29 institut pelatihan administrasi negara. Dari jumlah tersebut kurang dari 100 merupakan institusi swasta.

Pendidikan Sejarah dalam Struktur Kurikulum

Pelajaran sejarah merupakan pelajaran wajib yang diberikan kepada siswa dari grade 5/6-10 sebanyak dua jam pelajaran perminggu. Pelajaran sejarah ini pada praktiknya dapat pula dikombinasikan dengan pelajaran yang lain tergantung dari jenis sekolah. Pada kelas 10-12/13 pelajaran sejarah tidak lagi menjadi pelajaran wajib. Pada grade 6-9 kurikulum sejarah disusun berdasarkan kronologis berkisar pada sejarah peradaban Barat. Pada *grade* 10 pelajaran sejarah berkaitan dengan sejarah kontemporer pada abad ke-20. Pada grade 11-12/13 pelajaran sejarah difokuskan kepada sejarah Eropa modern dan sejarah non-Eropa seperti dekolonisasi dan topik-topik global lainnya. Sebagai ilustrasi pendidikan sejarah di Jerman khususnya di tingkat menengah, berikut topik-topik sejarah yang diajarkan di Sekolah Internasional Jerman di Serpong Tangerang:

GRADE/KELAS	POKOK BAHASAN
Grade 5	<ul style="list-style-type: none"> • Pengantar sejarah • Manusia di zaman prasejarah • Budaya tinggi di lembah • Dunia Yunani
Grade 6	<ul style="list-style-type: none"> • Asal-Usul orang Romawi • Roma pada waktu kekaisaran • Abad Pertengahan awal • Kerajaan Frankia yang besar
Grade 7	<ul style="list-style-type: none"> • Perkembangan awal Jerman • Perkembangan sosial dan hidup di Abad Pertengahan • Perkembangan baru • Eropa dalam absolutism
Grade 8	<ul style="list-style-type: none"> • Perkembangan di Inggris dan Amerika Utara • Revolusi Prancis dan Masa Napoleon • Restorasi dan Revolusi di Eropa • Industrialisasi dan tuntutan sosial di Inggris dan Jerman/ Eropa
Grade 9	<ul style="list-style-type: none"> • Kaisar Jerman dan Perang Dunia I • Akhir PD I dan kecendrungan dunia internasional • Republik Weimar • Munculnya nasional-sosialisme dan kekuasaan totalitarian
Grade 10	<ul style="list-style-type: none"> • Jerman, Eropa dan dunia pada Perang Dunia II • Dunia dan Jerman setelah Perang Dunia II hingga 1949 • Dari konfrontasi ke perdamaian antara Timur-Barat • Pertanyaan mengenai Jerman 1949-1990 dan solusinya • Dunia ketiga dan permasalahan global
Grade 11	<ul style="list-style-type: none"> • Mengulang materi grade 5-10 dengan penekanan pada periode 1945-1991 dan globalisasi dan permasalahan di dalamnya

Meskipun kurikulum di Jerman termasuk kurikulum pendidikan sejarahnya bervariasi, ilustrasi topik-topik dalam pendidikan sejarah dapat membenarkan pendapat Fuchs (2014) bahwa pendidikan sejarah di Jerman masih berorientasi pada sejarah nasional. Meskipun isi kurikulum sejarah di Jerman sudah sangat berubah dari yang chauvinistik pada era NAZI, tetapi menurutnya aspek sejarah dunia terutama yang di luar Eropa masih sangat sedikit porsinya. Perubahan kurikulum sejarah memang sudah dilakukan misalnya

dilakukan oleh negara bagian Baden-Wuerttemberg yang memperkenalkan *bildungsplan* atau rencana pembelajaran pada 2004. Kurikulum tersebut secara eksplisit telah menyatakan tujuan pembelajaran sejarah yaitu “pengambilalihan pengetahuan dasar tentang kejadian-kejadian penting, orang-orang, perkembangan-perkembangan, struktur-struktur, term-term, dan cerita kepahlawanan regional, nasional dan sejarah Eropa dan juga sejarah dunia.”

Lesson Learned

Berkaca dari pengalaman dan praktik kurikulum pendidikan khususnya dalam bidang sejarah Jerman maka dapat membandingkannya dengan pengalaman dan praktik yang dilakukan oleh Indonesia. Tidak berbeda jauh dengan Indonesia, pelajaran sejarah di Jerman terutama pada era NAZI sangat chauvinistis sehingga menghasilkan generasi yang chauvinistis pula. Pelajaran sejarah pada masa itu dengan demikian sangat dipengaruhi oleh politik dan memihak kepada rezim berkuasa. Pengalaman Jerman itu juga dialami Indonesia pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Pada masa Orde Lama dirumuskan Kurikulum Rentjana Peladjaran tahun 1964 yang menitik beratkan kepada pengembangan daya cipta, rasa dan karya dan moral yang dikenal sebagai Pancawardhana. Disebut Pancawardhana karena terdapat lima kelompok bidang studi yaitu kelompok pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keterampilan dan jasmaniah. Pendidikan Sejarah yang diinginkan dalam Pendidikan Pancawardhana merupakan penjabaran Garis-Garis Besar Haluan Negara Indonesia saat itu yang sesuai dengan arahan Presiden Sukarno pada tanggal 17 Agustus 1959. Dengan demikian Pendidikan Pancawardhana mengacu pada Manifesto Politik Republik Indonesia (Manipol) dan Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Indonesia (USDEK). Maka Pendidikan Sejarah pada masa ini ingin menggarisbawahi kebesaran masa lampau Indonesia pada masa Sriwijaya dan Majapahit dan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan demikian visi pendidikan sejarah pada kurikulum ini

adalah nasionalisme dengan penekanan yang tersirat pada anti imperialisme dan sosialisme. Orde Baru menggantikan Orde Lama sejak 1967 ingin mendekonstruksi tatanan yang telah ada sebelumnya termasuk dalam bidang pendidikan. Visi pendidikan sejarah pada masa Orde Baru yang terlihat pada kurikulum 1968, 1975, 1984, 2004 dan 2006 adalah nasionalisme yang menekankan pada Pancasila dan peran penting militerisme sebagai pemersatu bangsa dan yang menyelamatkan bangsa Indonesia dari bahaya perpecahan. Pada masa Orde Baru, nuansa politik sangat kental dalam pemberian Pendidikan Sejarah terutama pada kurikulum 1984 (kurikulum 1975 yang disempurnakan) dengan diperkenalkannya Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB). Pelaksanaan Pendidikan PSPB ini kemudian mendapat kritikan tajam karena dianggap sebagai indoktrinasi untuk mempertahankan rejim Orde Baru. Meskipun pelajaran PSPB bukanlah pelajaran sejarah yang tetap mendapat porsi jam pelajarannya sendiri-tetapi pandangan negatif turut ditanggung oleh pelajaran sejarah karena PSPB dianggap sarat dengan muatan sejarah.

Pendidikan PSPB yang sarat polemik akhirnya tidak dilanjutkan pada kurikulum 1994. Pendidikan sejarah pada kurikulum ini ingin mengedepankan pendekatan faktual, prosesual dan problematik. Pendidikan sejarah pada kurikulum 1994 ingin mewujudkan siswa yang dapat berpikir kritis dan analitis dengan memberi ruang yang besar bagi guru untuk mendesain pembelajarannya. Terdapat lompatan besar dalam kurikulum 1994 dari yang bertumpu pada guru (*teacher centered*) menjadi bertumpu pada siswa (*student centered*).

Namun begitu terdapat banyak permasalahan dalam penerapan kurikulum 1994 termasuk pada pendidikan sejarah misalnya dengan masih ditekankannya aspek faktual dan juga masih bertumpu pada guru (*teacher centered*). Kurikulum 1994 juga dinilai banyak kalangan terlalu berat dan tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari akibatnya pemerintah pun berupaya memperbaiki kurikulum tersebut dengan memberikan suplemen kurikulum 1999, Kurikulum 2004 (KBK) hingga Kurikulum 2006 (KTSP). Semuanya relatif tidak membawa perubahan signifikan kepada pendidikan sejarah karena bidang pelajaran tersebut tetap dianggap kurang mendapat perhatian serius dari pemerintah yang tercermin dari pengalokasian jam pelajaran yang sangat tidak memadai.

Kurikulum 2013 merupakan kurikulum terbaru yang diluncurkan pada awal tahun 2013. Perubahan yang cukup signifikan pada pendidikan sejarah terjadi pada tahun 2013 dengan dikeluarkannya Kurikulum 2013. Berbeda dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya, kurikulum 2013 memperkenalkan empat kompetensi inti (KI) yang harus dicapai dalam setiap pembelajaran yaitu KI 1 sikap spiritual, KI 2 sikap sosial, KI 3 Pengetahuan dan KI 4 Keterampilan. Khusus untuk SMA mata pelajaran-mata pelajaran dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok mata pelajaran wajib dan kelompok mata pelajaran peminatan. Dengan adanya pemisahan kelompok mata pelajaran wajib dan peminatan tersebut maka terjadi pengurangan mata pelajaran dan penambahan jam pelajaran tiap minggunya.

Kurikulum ini antara lain mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- Tidak saja menekankan kepada aspek kognitif tetapi juga afektif dan psikomotorik
- Berbeda dengan KTSP, pemerintah menyiapkan silabus, buku teks siswa, dan buku panduan guru.
- Menekankan pendekatan saintifik
- Berpusat pada siswa

Dalam kurikulum 2013, pendidikan sejarah mendapat perhatian lebih daripada kurikulum - kurikulum sebelumnya dengan dimasukkannya sejarah Indonesia sebagai salah satu mata pelajaran wajib dan sejarah sebagai salah satu mata pelajaran wajib untuk peminatan Ilmu-Ilmu Sosial di tingkat SMA. Visi pendidikan sejarah pada kurikulum 2013 adalah pendidikan sejarah sebagai sarana untuk memupuk nasionalisme sekaligus kemampuan berpikir dan ketrampilan sejarah.

Dari uraian mengenai perkembangan kurikulum Indonesia termasuk di dalamnya kurikulum sejarah dapat dilihat bahwa tidak ada konsistensi dalam penerapan kurikulum karena masih lebih besarnya kepentingan politik dibandingkan visi besar yang ingin dicapai suatu bangsa. Jerman juga mengalami masalah yang sama dengan Indonesia tetapi kelebihan Jerman yang belum dimiliki Indonesia adalah landasan filosofis kuat pada pendidikan Jerman yaitu pandangan humanisme-naturalistik yang sudah menjadi tradisi yang mengakar. Begitu kuatnya pandangan ini sehingga ketika ada upaya untuk lebih menyerderhanakan sistem pendidikan dengan memperkenalkan model *gesamtschule*, upaya tersebut tidak mendapat sambutan cukup dari masyarakat Jerman.

KESIMPULAN

Pendidikan di Jerman dikatakan dipengaruhi oleh filsafat humanisme-naturalistik yang tercermin dalam pembagian jenjang pendidikan *haupschule* dan *gymnasium*. Otonomi yang sangat luas pada negara-negara bagian dalam menerapkan kebijakan pendidikan di Jerman menciptakan kompleksitas yang merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah federal dalam mengharmonisasikannya. Tidak mudah untuk mengubah tradisi pendidikan di Jerman yang sudah berusia ratusan tahun. Akan tetapi perubahan tuntutan zaman mengharuskan Jerman untuk terus melakukan penyesuaian-penyesuaian. Dalam pendidikan sejarah, penyesuaian juga dilakukan misalnya yang terjadi di negara bagian Baden Wuttenberg yang mulai memperkenalkan *Bildungplan*.

Dari sisi filsafat pendidikan, pendidikan sejarah di Jerman menurut hemat penulis secara umum memakai pendekatan filosofi tradisional romantik-naturalisme dan humanisme masih kuat dipegang di Jerman meskipun terlihat pula filosofi perennialisme juga tergambar dari susunan pokok bahasan pelajaran sejarah. Pendekatan filosofi romantik-naturalisme memandang pendidikan harus disesuaikan dengan potensi setiap individu yang khas. Pendidikan dengan demikian juga dimaksudkan agar siswa mengenali diri sendiri dan kemudian menekuni apa yang menjadi minat dan bakatnya. Guru dipandang sebagai mentor yang memungkinkan potensi anak berkembang dan menjadi individu yang mandiri. Sejalan dengan filosofi romantik-naturalisme, filosofi humanisme juga memandang siswa sebagai pusat sehingga pendidikan harus mengabdikan kepada bakat dan minat siswa,

sedangkan filosofi perennialisme adalah ingin mengembangkan rasa bangga terhadap prestasi masa lampau. Aspek perennialisme ini sangat tergambar pada pokok bahasan sejarah di grade 6 yang membahas kebesaran Kerajaan Frankia yang menjadi cikal bakal Jerman sekarang.

Mencermati apa yang terjadi di Indonesia khususnya dengan kurikulum sejarahnya dapat dilihat bahwa ternyata terdapat persamaan dan perbedaan. Indonesia dan Jerman mempunyai sejarah kuatnya kepentingan politik dalam kebijakan pendidikannya tetapi kuatnya filosofi pendidikan humanisme-naturalistik yang telah mengakar sejak berabad-abad lampau membuat pendidikan Jerman termasuk di dalamnya sistem dan kurikulum pendidikannya mempunyai identitas yang kuat yang pada gilirannya membentuk identitas masyarakat Jerman itu sendiri. Dapat dilihat bahwa meskipun politik turut memengaruhi kebijakan pendidikan di Republik Federal Jerman tetapi visi pendidikan tetap solid sepanjang masa.

Daftar Pustaka

- Coy, Jason P. *A Brief History of Germany*, New York: Fact on File Inc, 2011
- Collingwood, R.G. *Idea Sejarah* terjemahan Mhd. Yusof Ibrahim, Kuala Lumpur: Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka, 1985
- Fucht, Eckhardt. *Why Teach World History in School: Curriculum Reform in German Secondary Education*. <http://worldhistoryconnected.press.illinois.edu/3.3/fuchs.html> diakses pada 1 November 2014
- Hofman, R.H., et al. *Institutional Context of Education System in Europe A Cross-*

Country Comparison on Quality and Equity, New York:Kluwer, 2005

McGregor, Katherine E. *Ketika Sejarah Berseragam: Membongkar Ideologi Militer Dalam Menyusun Sejarah Indonesia*, Yogyakarta:Penerbit Syarikat, 2008

McKernan, James. *Curriculum and Imagination: Process, Theory, Pedagogy and Action research*, New York, 2008

Nur, Agustiar Syah. *Perbandingan Sistem Pendidikan 15 Negara*, Bandung: Penerbit Lubuk Agung, 2001

Luhulima, C.P.F. *Eropa Sebagai Kekuatan Dunia: Lintasan sejarah dan Tantangan Masa Depan*, Jakarta: Gramedia, 1992

Pepin, Birgit. *Curriculum, Cultural Tradition and Pedagogy: Understanding the Work of Teachers in England, France and Germany*, diunduh dari <http://www.leeds.ac.uk/educol/documents/000000872.htm> pada 1 November 2014

German School System <http://www.german-way.com/history-and-culture/education/the-german-school-system/> diakses pada 1 November 2014

Rowse, A.L. *Apa Guna Sejarah*, terjemahan Winda Primasari, Depok:Komunitas Bambu,2014

Syukur, Abdul. *Pengajaran Sejarah Indonesia Kurikulum 1964-2004: Sebuah Stabilitas yang Dinamis*, Disertasi, Depok: Universitas Indonesia, 2013.

Seel, Norbert M., Dijkstra, Sanne. *Curriculum, Plans and Processes in Instructional Design*, New Jersey: Taylor and Francis, 2004

Umasih. *Sejarah Pendidikan di Indonesia: Sebuah Telaah atas Perubahan Kurikulum Sejarah Indonesia Sekolah Menengah Atas (SMA) Thesis*, Depok:Universitas Indonesia,2000

Kurikulum Sejarah Jenjang SMA: Sebuah Perbandingan Indonesia-Australia

Oleh : Abrar

Pendidikan Sejarah PPS UNJ

Abstract

The purpose of this paper was to compare how the education system and curriculum history at secondary school level between Indonesia and Australia. The education system in Indonesia is not much different from Australia. History curriculum in Indonesia philosophically is more multi dimensional than Australia which essentialism as priority. Indonesian history curriculum is more comprehensive interms of content than Australia that is optional for students. The ability to interpret the history curriculum in Australia is more prominent than Indonesia.

Key words: education system, history curriculum, content.

Abstrak

Tujuan dari tulisan ini adalah ingin membandingkan bagaimana sistem pendidikan dan kurikulum sejarah pada tingkat sekolah menengah atas antara Indonesia dan Australia. Sistem pendidikan di Indonesia tidak berbeda jauh dengan Australia. Secara filosofis kurikulum sejarah di Indonesia lebih multi dimensi dibandingkan dengan di Australia yang mengutamakan esensialisme. Kurikulum sejarah di Indonesia lebih luas dari sisi konten dibandingkan di Australia yang kontennya bersifat pilihan bagi peserta didik. Kemampuan menginterpretasi dalam kurikulum sejarah di Australia lebih menonjol dibandingkan dengan Indonesia.

Kata Kunci: sistem pendidikan, kurikulum sejarah, isi

Pendahuluan

Indonesia dan Australia memang negara yang berbeda dari berbagai segi seperti politik, ekonomi, demografi dan pendidikan. Meskipun berbeda dalam berbagai segi, tetapi dalam konteks pendidikan kiranya ada persamaan yakni tantangan zaman pada abad ke-21. Sensus penduduk yang dilakukan di Indonesia pada tahun 2010 menunjukkan jumlah penduduk Indonesia 237,6 juta. Jumlah penduduk usia produktif lebih banyak jumlahnya dibandingkan usia penduduk tidak produktif. Pada tahun 2020-2035 diperkirakan jumlahnya mencapai 70%. Tantangan lainnya adalah makin kuatnya pengaruh globalisasi sehingga mau tidak

mau penduduk usia produktif itu akan berhadapan dengan masyarakat industri dan perdagangan modern. Hal itu dapat dilihat makin kuatnya pengaruh ekonomi negara-negara seperti India dan Cina. Belum lagi makin kompleksnya tekanan terkait masalah lingkungan seperti perubahan iklim. Tantangan yang demikian itu juga dihadapi oleh Australia. Australia berusaha mengantisipasi perkembangan yang bakal terjadi itu sampai tahun 2022. Generasi muda Australia harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang menjawab tantangan zaman itu. Dalam hal itu baik Indonesia maupun Australia mesti mempersiapkan generasi muda yang

mampu menghadapi tantangan tersebut. Terkait dengan konteks pendidikan itu yang menarik untuk menjadi perhatian adalah kurikulum pendidikan yang berlaku di kedua negara itu dalam menyiapkan generasi muda mereka.

Indonesia telah menjalankan beberapa kurikulum dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Terakhir diterapkan kurikulum yang disebut kurikulum 2013. Sebelumnya kurikulum yang berlaku adalah kurikulum 2006 yang sering dikenal dengan nama Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Penerapan kurikulum 2013 merupakan perubahan yang dilakukan pemerintah dalam rangka menghadapi tantangan zaman. Penerapan kurikulum itu menimbulkan kontroversi dikalangan akademisi maupun masyarakat. Pada akhirnya penerapan kurikulum itu belum dilaksanakan secara nasional, karena menunggu selesai dilakukan evaluasi. Penerapan kurikulum di Indonesia berlakunya bersifat nasional. Tidak ada kurikulum yang berlaku sesuai dengan kondisi di setiap provinsi.

Australia jumlah penduduknya sekarang ini diperkirakan sekitar 23 juta. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2011 jumlahnya mencapai 21.507.719 jiwa. Luas wilayahnya 7.692.000 km² dengan etnis yang beraneka ragam pula. Bentuk negara Australia adalah federal dengan sistem pemerintahannya parlementer. Sebagai negara berbentuk federal Australia dipersatukan dalam suatu federasi yang disebut persemaikmuran (*commonwealth*). Federasi Australia itu terbentuk pada tahun 1901 yang terdiri dari enam negara bagian dan dua teritori (Nur, 2001:57). Keenam negara bagian itu adalah New South Wales (NSW), Queensland (QLD), South Australia (SA), Tasmania (TAS),

Victoria (VIC), dan Western Australia (WA). Sedangkan dua wilayah teritori adalah Australian Capital Territory (ACT) dan Northern Territory (NT). Secara politik sistem yang berlaku di Australia berbasiskan demokrasi liberal dengan multi partai. Setidaknya ada empat partai utama di Australia yaitu Partai Buruh Australia, Partai Liberal, Parta Nasional Australia dan Partai Hijau Australia.

Australia negara tetangga yang berada di sebelah selatan Indonesia juga melakukan perubahan kurikulum. Untuk jenjang pendidikan *Senior Secondary* kurikulum resmi yang digunakan di Australia adalah kurikulum 2012. Kurikulum 2012 yang diberlakukan di Australia bersifat panduan umum yang merupakan standar nasional untuk meningkatkan kompetensi seluruh generasi muda Australia. Sehingga bagi negara bagian dan teritori dalam menerapkan kurikulum agar sesuai dengan standar nasional tersebut. Kurikulum itu proses perumusannya telah dilakukan sejak tahun 2010 ketika draftnya yang terkait konten pertama kali disosialisasikan.

Ada dua permasalahan pokok yang dapat diangkat dalam melihat perbedaan antara Indonesia dengan Australia dalam tulisan ini. Bagaimana sistem pendidikan yang berlaku di Indonesia dan Australia? Bagaimana kurikulum khususnya kurikulum pendidikan sejarah yang berlaku di kedua negara tersebut pada jenjang pendidikan menengah?

KAJIAN TEORETIK

Membicarakan sistem pendidikan perlu pemahaman tentang pengertian sistem. Sistem menurut Amirin sebagaimana dikutip Tirtarahardja dan

La Sulo (2012:57) adalah himpunan komponen yang saling berkaitan yang bersama-sama berfungsi untuk mencapai suatu tujuan. Hal yang sama dikemukakan oleh Hafid, Jafar Ahiri dan Pendais Haq (2014:80) yang menyatakan sistem adalah jumlah keseluruhan dari bagian-bagian yang saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Tirtarahardja dan La Sulo juga menyatakan bahwa sistem adalah suatu kesatuan integral dari sejumlah komponen yang saling berpengaruh dengan fungsinya masing-masing dalam rangka mencapai suatu tujuan.

Dengan demikian sistem merupakan suatu rangkaian komponen yang saling terkait satu dengan yang lain yang berfungsi untuk mencapai suatu tujuan. Jika dikaitkan dengan pendidikan berarti tujuan yang mau dicapai adalah tujuan pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tujuan itu menyangkut tujuan pendidikan nasional. Oleh karena itu sistem pendidikan nasional menurut UU No.20 Tahun 2003 adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Komponen sistem pendidikan itu terdiri dari tujuan, organisasi, masa, prasarana, sarana, isi pendidikan, tenaga pendidikan dan peserta didik. (Redja Mudyahardjo, 2014:64-70).

Dari berbagai komponen yang ada dalam sistem pendidikan itu yang dibahas dalam tulisan ini hanya masalah tujuan, organisasi, masa, dan isi pendidikan. Mudyahardjo menjelaskan bahwa tujuan itu terkait dengan tujuan umum pendidikan yang dalam hal itu adalah tujuan pendidikan nasional. Organisasi berkaitan dengan pengelolaan pendidikan yang dalam hal itu pemerintah baik pusat atau daerah, dan organisasi pendidikan yang berkaitan dengan

sistem persekolahan. Masa maksudnya adalah jangka waktu berlangsungnya keseluruhan kegiatan dalam satuan pendidikan atau keseluruhan kegiatan semua satuan-satuan pendidikan. Sedangkan isi pendidikan menyangkut pengalaman-pengalaman yang dipelajari peserta didik selama proses pendidikan. Hal itu berhubungan dengan kurikulum yang digunakan agar tujuan pendidikan dapat tercapai.

Kurikulum menurut Decker (1990:4) secara konseptual akan memunculkan berbagai macam definisi. Ada yang menyatakan kurikulum adalah aktivitas belajar secara terencana yang dilakukan sekolah. Ada juga yang menyatakan situasi atau aktivitas yang dirancang oleh guru agar siswa belajar. Yang lain menyatakan bahwa kurikulum itu adalah serangkaian kejadian yang mempunyai potensi untuk membangun pengalaman manusia. Dari ketiga definisi tersebut nampak bahwa kurikulum itu pada dasarnya bagaimana agar terjadi aktivitas belajar di kalangan siswa. Sementara dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional diungkapkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Meskipun ada berbagai pendapat tersebut, Walker (1990:5) mengingatkan kepada kita bahwa paling tidak ada lima konsep kurikulum yaitu *subjects offered for study, educational activities, intended learning, student's experiences, and learning outcomes*. Walker menjelaskan bahwa *subject offered for study* maksudnya adalah apa yang menjadi mata pelajaran yang bakal diberikan kepada siswa. *Educational activities* adalah apa aktivitas

yang dilakukan siswa di dalam kelas yang mendukung kegiatan belajar. *Intended learning* adalah apa yang diharapkan atau yang mau dicapai siswa dalam belajar. *Student's experiences* adalah apa pengalaman nyata yang didapatkan siswa melalui bimbingan dan arahan yang terjadi di sekolah. Sedangkan *learning outcomes* adalah apa hasil nyata yang dicapai siswa setelah proses belajar terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Pendidikan

Pendidikan sebagai upaya sadar pada dasarnya bermaksud mencapai tujuan tertentu. Tujuan tertentu pendidikan setiap negara di dunia berbeda antara satu dengan yang lain, termasuk Indonesia dan Australia. Indonesia tujuan pendidikan nasionalnya adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan berbagai sektor pendidikan Australia didasarkan pada undang-undang yang berlaku dalam bidang pendidikan di setiap negara bagian, universitas, dan lembaga pendidikan lainnya. Pada level sekolah misalnya untuk pengembangan potensi peserta didik, dan pada level pendidikan tinggi bertujuan untuk kepentingan ekonomi serta masyarakat secara umum. Sedangkan pemerintah federal Australia merumuskan tujuan pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam *Melbourne Declaration on Educational Goals for Young Australians* pada tahun 2008. Ada dua tujuan yang dirumuskan dalam Melbourne Declaration itu yaitu (1) mengembangkan kesetaraan dan keunggulan generasi muda Australia dan (2) seluruh generasi muda Australia menjadi pembelajar yang

sukses, individu yang percaya diri dan kreatif, dan menjadi warga negara yang aktif dan inspiratif. *Melbourne Declaration* itu merupakan rumusan yang dihasilkan oleh semua Menteri Pendidikan Australia baik dari pemerintah federal maupun pemerintah negara bagian. Apa yang dirumuskan melalui itu kemudian diadopsi ke dalam *Australian Education Act 2013* yang di dalamnya menyatakan bahwa semua siswa di semua sekolah berhak atas pendidikan yang sangat baik, yang memungkinkan setiap siswa untuk mencapai potensi penuhnya sehingga ia bisa sukses, mencapai aspirasinya, dan memberikan kontribusi sepenuhnya kepada masyarakatnya, di masa sekarang dan masa depan. Baik tujuan pendidikan Indonesia maupun tujuan pendidikan Australia memperlihatkan betapa pentingnya kualitas manusia yang mau diupayakan secara sadar melalui pendidikan. Terkait dengan kualitas itu Australian Education Act 2013 menegaskan tidak boleh dibatasi oleh dimana ia tinggal, pendapatan keluarganya, sekolah yang diikutinya atau keadaan pribadinya. Sebelumnya dalam Australian Education Bill 2012 disebutkan tujuan pendidikan dalam rangka agar sekolah di Australia memberikan pendidikan yang sangat baik bagi peserta didik, berlaku sangat adil dan menempatkan Australia dalam lima negara yang berkualitas dalam lomba internasional di bidang membaca, sains dan matematika. Dalam mencapai tujuan pendidikan itu dapat dilakukan dengan menciptakan sistem pendidikan yang mendukung untuk itu.

Sebagai suatu sistem pengelolaan pendidikan di Indonesia menjadi tanggungjawab pemerintah pusat. Tanggungjawab itu ada ditangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Meskipun tanggungjawab pengelolaan sistem

pendidikan itu ada ditangan Menteri, bukan berarti dalam penyelenggaraan pendidikan tidak melibatkan pemerintah daerah. Pemerintah daerah dan bahkan masyarakat justru ikut dalam menyelenggarakan pendidikan. Sedangkan di Australia sistem pengelolaan pendidikan menjadi tanggungjawab negara bagian atau teritori. Artinya tanggungjawab ada ditangan Menteri Pendidikan negara bagian. Sedangkan untuk penyelenggaraan pendidikan selain dilakukan oleh pemerintah negara bagian juga dapat diselenggarakan oleh masyarakat. Jadi baik Indonesia maupun Australia dalam hal penyelenggaraan pendidikan itu sama-sama ada yang dikelola pemerintah (negeri) dan ada yang dikelola swasta.

Penyelenggaraan pendidikan itu di Indonesia dari sisi jalur pendidikan terdiri dari pendidikan formal, non formal, dan informal. Sedangkan jika dilihat dari segi jenjang pendidikan terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sementara dari sisi jenis pendidikan didalamnya mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Tidak berbeda jauh dengan Indonesia, di Australia jalur pendidikan dapat dibedakan atas pendidikan formal dan pendidikan non formal. Sementara dari segi jenjang pendidikan terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sedangkan dari sisi jenis pendidikan terdapat pendidikan umum, vokasi, akademik, dan profesi.

Pendidikan dasar di Indonesia dimulai sejak Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) sampai dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs). SD atau MI berlangsung selama 6 tahun dan SMP atau MTs berlangsung 3 tahun. Artinya

pendidikan dasar di Indonesia berlangsung 9 tahun yang dimulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 9. Pendidikan dasar itu wajib diikuti oleh setiap warga Negara Indonesia yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun. Sebelum masuk pendidikan dasar peserta didik di Indonesia mengikuti pendidikan prasekolah. Sering juga disebut sebagai Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Pendidikan prasekolah itu bentuknya seperti Taman Kanak-Kanak (TK), dan Raudatul Athfal (RA). Di samping itu peserta didik sebelum masuk TK ataupun RA, mereka mengalami pendidikan dalam kelompok yang disebut Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak.

Pendidikan dasar di Australia dinamakan Primary School (PS) yang berlangsung selama 6 atau 7 tahun dan *Secondary School* (SS) yang berlangsung selama 3 atau 4 tahun tergantung ketentuan dari masing-masing negara bagian. Pendidikan dasar itu wajib diikuti oleh peserta didik yang berusia antara 6 sampai 16 tahun.

Primary School di Negara Bagian New South Wales, Victoria, Tasmania, dan Australia Capital Territory berlangsung sampai level 6. Sedangkan di Negara Bagian South Australia, Northern Territory, Queensland, dan Western Australia berlangsung sampai level 7. Sama halnya dengan di Indonesia, di Australia juga ada pendidikan prasekolah (*preschool*). Hanya saja setiap negara bagian berbeda-beda penamaannya. Pendidikan Preschool itu diikuti peserta didik usia 3-4 tahun dan bukan sesuatu yang wajib untuk diikuti. Australia juga mengenal yang namanya *Preparatory* yang dalam pelaksanaannya hampir semua negara bagian itu menjadi bagian integral dari PS karena itu merupakan masa persiapan untuk masuk PS kecuali di Negara Bagian Western Australia. Usia untuk masuk

Preparatory rata-rata 5 tahun. Penamaan untuk Preparatory itupun berbeda-beda di setiap negara bagian.

Sesudah menempuh SD peserta didik di Indonesia dapat melanjutkan pendidikan dasar ke SMP atau MI, sedangkan di Australia peserta didik setelah menyelesaikan pendidikan di PS melanjutkan pendidikannya ke SS. Lama belajar di SMP atau MI berlangsung 3 tahun, sementara di Australia lama belajar di SS harus mengikuti ketentuan negara bagian masing-masing. Pada saat peserta didik Indonesia masuk SMP atau MI berarti mereka sudah masuk belajar pada kelas 7 sampai dengan 9. Negara Bagian New South Wales, Victoria, Tasmania dan Australia Capital Territory lama belajar di SS 4 tahun. Itu berarti berada pada level 7 sampai level 10. Dalam pada itu di Negara Bagian South Australia, Northern Territory, Queensland dan Western Australia lama belajar di SS hanya 3 tahun. Selama tiga tahun itu peserta didik belajarnya masuk pada level 8 sampai level 10.

Selesai menempuh pendidikan dasar baik peserta didik di Indonesia maupun di Australia selanjutnya melanjutkan pendidikannya ke pendidikan menengah. Jika di Indonesia pendidikan menengah berlangsung selama 3 tahun, maka di Australia pendidikan menengah berlangsung 2 tahun. Pendidikan menengah di Indonesia dibedakan atas dua yaitu pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah umum bentuknya Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Madrasah Aliyah (MA) dan pendidikan menengah kejuruan bentuknya adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK). Pada saat belajar di pendidikan menengah itu peserta didik Indonesia sudah masuk pada kelas 10 sampai dengan kelas 12. Pendidikan menengah di Australia disebut *Senior Secondary School (SSS)*. SSS yang berlangsung hanya 2 tahun itu dalam sistem pendidikan Australia sudah berada pada level 11 dan 12. Berikut ini perbandingan struktur sekolah di Indonesia dan Australia.

Bagan Perbandingan Struktur Sekolah Indonesia dan Australia

KELAS	INDONESIA	LEVEL	AUSTRALIA		
			NSW, VIC,TAS, ACT	SA,NT	QLD,WA
12	SMA/MA/ SMK/MAK	12	SSS	SSS	SSS
11		11			
10		10	SS	SS	
9	9				
8	8				
7	SMP/MTs	7			

	SD/MI	6	PS	PS	PS
		5			
		4			
		3			
		2			
		1			
PRASEKOLAH	TK/RA	Preepatory	Kindergarten(NST, VIC, ACT), Preschool (TAS)	Transition (NT), Reception (SA)	Preparatory (QLD),Pre- primary (WA)
	KB/TPA	Preschool	Preschool (NST, VIC, ACT), Kindergarten (TAS)	Preschool (NT, SA)	Kindergarten (QLD,WA)

Nampaknya ada perbedaan dalam menerapkan konsep pendidikan dasar di Indonesia dengan Australia. Indonesia pendidikan dasarnya berlangsung dari kelas 1 sampai kelas 9. Sedangkan Australia pendidikan dasarnya berlangsung dari level 1 sampai level 10. Dengan demikian peserta didik di Indonesia dari segi usia menyelesaikan pendidikan dasarnya pada usia 15 tahun sedangkan di Australia dalam pada usia 16 tahun. Artinya secara psikologi tingkat kematangan berpikir peserta didik Australia lebih dewasa dari peserta didik Indonesia. Untuk pendidikan menengah Indonesia sudah melakukan pemilahan antara yang umum dengan kejuruan, sementara di Australia tidak terjadi hal yang demikian itu.

Jenjang berikut yang ditempuh peserta didik Indonesia setelah menempuh pendidikan menengah adalah pendidikan tinggi. Jenjang pendidikan tinggi itu didalamnya terdapat program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis dan doktor yang bentuknya meliputi akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Akademi merupakan program pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi pada satu bidang tertentu.

Sebaliknya politeknik menyelenggarakan pendidikan vokasi pada beberapa bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Lama pendidikan pada program diploma baik yang diselenggarakan jenjang akademi maupun politeknik berlangsung antara 1 sampai 3 tahun. Gelar yang diperoleh dari program Diploma 1 adalah Ahli Pratama (A. P), Diploma 2 adalah Ahli Muda (A. Ma) dan Diploma 3 adalah Ahli Madya (A. Md). Tamatan Diploma 3 (A. Md) dapat melanjutkan pendidikannya ke program Diploma 4 dengan gelar Sarjana Sains Terapan (S. ST.) atau S1 dengan gelar Sarjana (S). Akademi dan politeknik itu dalam menerima peserta didik biasanya berasal dari lulusan SMA/SMK atau MA/MAK.

Sekolah Tinggi, Institut dan Universitas di Indonesia merupakan jenjang pendidikan tinggi yang dapat ditempuh sebagai kelanjutan dari pendidikan menengah. Selain menerima peserta didik yang berasal dari lulusan pendidikan menengah, lembaga tersebut juga menerima yang berasal dari lulusan Diploma 3. Jenjang pendidikan tinggi itu dapat dibedakan atas dua bagian yaitu jenjang sarjana dan jenjang pascasarjana. Jenjang sarjana (S1) lama studinya antara

4-7 tahun. Sebutan gelar sarjananya tergantung bidang studi yang ditempuh peserta didik. Pada jenjang pascasarjana baik di sekolah tinggi, institute maupun universitas terdapat dua program yaitu program Sarjana 2 (S2) dengan gelar Magister dan program Sarjana 3 (S3) dengan gelar Doktor. Program S2 berlangsung antara 2-3 tahun dan program S3 berlangsung antara 2-4 tahun. Program magister dan doktor tidak hanya untuk pengembangan akademik, tetapi ada juga untuk terapan. Program magister terapan merupakan kelanjutan dari program sarjana terapan. Sedangkan doktor terapan adalah kelanjutan dari magister terapan. Selain itu pendidikan tinggi juga menyelenggarakan program profesi dan spesialis. Gelar lulusan itu sesuai dengan profesi atau spesialis yang ditempuh peserta didik yang lama belajarnya antara 2-3 tahun.

Selesai pendidikan menengah peserta didik di Australia masuk pendidikan yang disebut *Tertiary Education* (TE). Tertiary education terdiri dari pendidikan tinggi dan pendidikan vokasi. Sebelum masuk ke jenjang pendidikan tinggi peserta didik di Australia saat di level 11 sudah mempersiapkan diri. Apabila mereka berminat dalam bidang ilmu aplikatif maka mereka dapat melanjutkan ke pendidikan vokasi yang disebut *Vocational Education and Training* (VET). Bahkan untuk pendidikan vokasi itu juga ditawarkan bagi peserta didik yang selesai dari program *Secondary School*. Jadi bukan hanya buat lulusan *Senior Secondary School*. Sedangkan bagi mereka yang ingin mendalami ilmu yang bersifat teoretik maka mereka masuk ke pendidikan tinggi yang disebut *University* (Universitas).

Jenjang pendidikan vokasi didasarkan atas kerjasama pemerintah dan industri. Kualifikasi VET disediakan oleh *Australian*

Qualifications Framework (AQF) mulai level 1 sampai 6 dan level 8. Kualifikasi VET AQF berbasis hasil dengan fokus pada keterampilan kerja dan kompetensi yang dicapai. AQF mengakui pembelajaran sebelumnya atau kompetensi saat ini dengan mentransfer sertifikat secara fleksibel. Paket pelatihan dan kursus terakreditasi yang disediakan oleh *Registered Training Organisations* (RTOs) mengarah pada kualifikasi AQF berikut: (1). *certificate I, certificate II, Certificate III dan certificate IV*, (2). *Diploma and Advanced Diploma*, (3). *Vocational Graduate Certificate dan Vocational Graduate Diploma*. VET dapat dilakukan di sekolah-sekolah, tempat kerja, organisasi pelatihan, magang dan pendidikan jarak jauh.

Jenjang pendidikan universitas di Australia terdiri dari jenjang sarjana (*undergraduate level*) dan pascasarjana (*postgraduate level*). Jenjang sarjana ditempuh dalam waktu 3 tahun dan bagi lulusannya memperoleh gelar Bachelor. Bagi mereka yang ingin melanjutkan studinya ke jenjang pascasarjana, mereka terlebih dahulu harus mengikuti program *Bachelor Honour Degree* yang berlangsung selama 1 tahun. Lulusan program itu memperoleh gelar *Bachelor Hons*. Bagi lulusan Bachelor Hons yang kualifikasinya masuk kelompok atas (*First Class dan Second Class*), mereka dapat langsung masuk program doktor dan tidak menempuh program master.

Jenjang pascasarjana dapat dibedakan atas program *Graduate Certificate, Graduate Diploma, Master Degree dan Doctoral Degree*. Baik *Graduate Certificate* maupun *Graduate Diploma* dirancang bagi para profesional atau keterampilan bekerja sangat tinggi. Perbedaannya hanya dalam lama masa studinya dimana untuk program *Graduate Certificate* berlangsung selama 1 semester, sedangkan untuk *Graduate Diploma*

lamanya 1 tahun. Program *Master Degree* berlangsung selama 18 bulan sampai 2 tahun yang dapat ditempuh melalui perkuliahan (*by coursework*), penelitian (*by research*) atau kombinasi perkuliahan dan penelitian (*by extended*). Bagi yang lulus program *Master Degree* memperoleh gelar *Master*. Program *Doctoral Degree* secara substansi buat yang berkontribusi terhadap ilmu pengetahuan yang merupakan karya asli sebagai pengetahuan baru. Program doktor itu berlangsung selama 3-4 tahun yang dapat dilakukan dalam bentuk perkuliahan (*by professional*) dan penelitian (*by research*).

Kurikulum Pendidikan Sejarah dan Landasan Filosofisnya

Program pendidikan yang dilaksanakan satuan pendidikan baik jenjang pendidikan dasar, menengah maupun tinggi mempunyai struktur kurikulum tertentu yang harus dilaksanakan oleh satuan pendidikan tersebut. Struktur kurikulum pendidikan menengah di Indonesia untuk tingkat Sekolah Menengah Atas dapat dibedakan atas dua bagian yaitu kelompok umum dan kelompok peminatan. Struktur tersebut dapat dilihat pada tabel untuk tingkat Sekolah Menengah Atas dapat dibedakan atas dua bagian yaitu kelompok umum dan kelompok peminatan. Struktur tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Struktur Kurikulum SMA/MA Kelompok Umum

Mata Pelajaran	Alokasi Waktu Perminggu		
	Kls X	Kls XI	Kls XII
Kelompok A (Umum)			
- Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	3	3	3
- Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	2	2	2
- Bahasa Indonesia	4	4	4
- Matematika	4	4	4
- Sejarah Indonesia	2	2	2
- Bahasa Inggris	2	2	2

Mata Pelajaran	Mata Pelajaran		
	Kls X	Kls XI	Kls XII
Kelompok B (Umum)			
-Seni Budaya	2	2	2
-Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	3	3	3
-Prakarya dan Kewirausahaan	2	2	2
- Jumlah jam kelompok A dan B perminggu	24	24	24
- Kelompok C (Peminatan)			
-Mata pelajaran peminatan akademik	9 atau 12	12 atau 16	12 atau 16
-Mata pelajaran pilihan lintas minat dan/ pendalaman minat	6 atau 9	4 atau 8	4 atau 8
-Jumlah jam kelompok A, B, dan C perminggu	42	44	44

Struktur Kurikulum SMA/MA Kelompok Peminatan

Mata Pelajaran		Alokasi Waktu Perminggu		
		Kls X	Kls XI	Kls XII
Peminatan IPA				
1	Matematika	3	4	4
2	Biologi	3	4	4
3	Fisika	3	4	4
4	Kimia	3	4	4
Peminatan IPS				
1	Geografi	3	4	4
2	Sejarah	3	4	4
3	Sosiologi	3	4	4
4	Ekonomi	3	4	4
Peminatan Budaya				
1	Bahasa dan Sastra Indonesia	3	4	4
2	Bahasa dan Sastra Inggris	3	4	4
3	Bahasa dan Sastra Asing (Arab, Mandarin, Jepang, Korea, Jerman dan Perancis)	3	4	4
4	Antropologi	3	4	4
Mata Pelajaran Pilihan				
Kelompok C (Peminatan)				
Mata pelajaran pilihan lintas minat dan/pendalaman minat		6 atau 9	4 atau 8	4 atau 8

Struktur kurikulum SMA/MA baik kelompok umum maupun kelompok peminatan nampaknya berangkat dari pemikiran esensialisme. Pandangan esensialisme menuntut agar mata pelajaran yang diberikan kepada peserta didik secara eksplisit menunjukkan disiplin ilmu tertentu termasuk sejarah, bukan merupakan gabungan dari berbagai disiplin ilmu (Hasan, 2012:4). Sebab filosofi esensialisme pada dasarnya menginginkan dalam pembelajaran itu untuk mengembangkan kemampuan intelektual peserta didik. Jika memperhatikan jumlah jam maka kalau

jam belajar efektif di Indonesia ada 4,5 bulan per semester maka berarti peserta didik yang belajar Sejarah Indonesia membutuhkan waktu 36 jam per semester, sementara bagi yang mengambil sejarah membutuhkan waktu antara 54-72 jam per semester.

Tidak berbeda dengan Indonesia, kurikulum *Senior Secondary School* Australia memperlihatkan juga suatu pemikiran yang bersifat esensialisme. Hal itu dapat dilihat dari penamaan mata pelajaran sebagaimana tergambar dalam tabel berikut ini.

Struktur Kurikulum *Senior Secondary School* (SSS)

Learning Areas		Subject	Time Allocation	
			Level XI	Level XII
	English	English		
		English as an Additional Language or Dialect		
		Essential English		
		Literature		
	Mathematic	Essential Mathematics		
		General Mathematics		
		Mathematical Methods		
		Specialist Mathematics		
	Sciences	Biology		
		Chemistry		
		Earth and Enviromental Science		
		Physics		
	Humanities and Social Sciences	Ancient History		
		Geography		
		Modern History		

Setiap mata pelajaran yang ada dalam kurikulum itu terdiri dari beberapa unit. Secara umum rentang waktu setiap unit antara 50-60 jam per semester. Oleh karena Sejarah Kuno dan Sejarah Modern terdiri dari empat unit maka rentang waktu yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran di Australia sekitar 200-240 jam per semester. Untuk pelaksanaannya setiap negara bagian diberi keleluasaan untuk menerapkannya. Ada negara bagian yang menerapkan sistem kredit untuk setiap

mata pelajaran. Setiap satu mata pelajaran rentang kreditnya antara 10-20 kredit per semester.

Landasan filosofis kurikulum sejarah tidak hanya dapat dilihat dari sisi penamaan mata pelajaran, tetapi juga dapat ditinjau dari tujuan yang mau dicapai mata pelajaran sejarah itu. Untuk itu perlu memperhatikan tujuan mata pelajaran sejarah baik di Indonesia maupun di Australia sebagaimana tabel berikut ini.

Perbandingan Tujuan Mata Pelajaran Sejarah di Indonesia dan Australia

NEGARA		
INDONESIA		AUSTRALIA
Sejarah Indonesia (Umum)	Sejarah (Peminatan)	
Menumbuhkan kesadaran dalam diri peserta didik sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang memiliki rasa bangga dan cinta tanah air, melahirkan empati dan perilaku toleran yang dapat diimplementasikan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat dan bangsa.	Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman mengenai kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia serta dunia melalui pengalaman sejarah bangsa Indonesia dan bangsa lain.	Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman siswa tentang masa lampau dalam rangka menghargai diri sendiri dan orang lain, memahami masa sekarang dan berkontribusi untuk memperdebatkan rencana bagi masa datang.
Menumbuhkan pemahaman peserta didik terhadap diri sendiri, masyarakat, dan proses terbentuknya bangsa Indonesia melalui sejarah yang panjang dan masih berproses hingga masa kini dan masa yang akan datang.	Mengembangkan rasa kebangsaan, cinta tanah air, dan penghargaan kritis terhadap hasil dan prestasi bangsa Indonesia dan umat manusia di masa lalu.	M e n g e m b a n g k a n kemampuan berpikir kritis tentang masa lampau, dan belajar bagaimana membandingkan cerita sejarah yang berbeda sehingga konflik dan perbedaan dihargai. Dengan demikian sejarah berkontribusi dalam membangun warga negara yang demokratis.
Mengembangkan perilaku yang didasarkan pada nilai dan moral yang mencerminkan karakter diri, masyarakat, dan bangsa.	Membangun kesadaran tentang konsep waktu dan ruang dalam berfikir kesejarahan.	Memperkenalkan siswa memahami sejarah dengan terlibat dalam metode penelitian sejarah. Siswa belajar sejarah dan mempraktikkannya.
Membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya konsep waktu dan tempat/ruang dalam rangka memahami perubahan dan keberlanjutan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa di Indonesia.	Mengembangkan kemampuan berpikir sejarah (historical thinking), keterampilan sejarah (historical skills), dan wawasan terhadap isu sejarah (historical issues) serta menerapkan kemampuan, keterampilan, dan wawasan tersebut dalam kehidupan masa kini.	Siswa harus mempunyai keterampilan yang luas tentang sejarah dengan terampil dalam mencari sumber sejarah dan mengevaluasinya, memahami konteks dan menangkap makna referensi tersebut.

NEGARA		
INDONESIA		AUSTRALIA
Sejarah Indonesia (Umum)	Sejarah (Peminatan)	
Menumbuhkan apresiasi dan penghargaan peserta didik terhadap peninggalan sejarah sebagai bukti peradaban bangsa Indonesia di masa lampau.	Mengembangkan perilaku yang didasarkan pada nilai dan moral yang mencerminkan karakter diri, masyarakat dan bangsa.	
Mengembangkan kemampuan berpikir historis (historical thinking) yang menjadi dasar untuk kemampuan berpikir logis, kreatif, inspiratif, dan inovatif.	Menanamkan sikap berorientasi kepada kehidupan masa kini dan masa depan berdasarkan pengalaman masa lampau.	
Menanamkan sikap berorientasi kepada masa kini dan masa depan.	Memahami dan mampu menangani isu-isu kontroversial untuk mengkaji permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakatnya.	
	Mengembangkan pemahaman internasional dalam menelaah fenomena aktual dan global.	

Secara filosofis tujuan kurikulum sejarah baik Sejarah Indonesia maupun Sejarah didalamnya terkandung landasan perenialisme, esensialisme, humanisme dan rekonstruksi sosial (Hasan, 2012:4-5). Pada pelajaran Sejarah Indonesia perenialisme terdapat pada tujuan pertama dan kelima. Esensialisme nampak pada tujuan keempat dan keenam. Humanisme ditemui pada tujuan ketiga dan rekonstruksi sosial terdapat pada tujuan ketujuh. Untuk pelajaran sejarah perenialisme ditemui pada tujuan kedua. Esensialisme didapatkan pada tujuan

ketiga dan keempat. Humanisme terdapat pada tujuan kelima dan rekonstruksi sosial didapatkan pada tujuan keempat dan keenam. Selain landasan filosofis pada kedua mata pelajaran itu juga terdapat landasan politis dan akademik. Landasan politis Sejarah Indonesia terdapat pada tujuan kedua. Sedangkan pada sejarah ditemui pada tujuan kesatu. Dalam pada itu landasan akademik Sejarah Indonesia terdapat pada tujuan keenam dan sejarah pada tujuan ketujuh dan kedelapan.

Berbeda dengan Indonesia, kurikulum sejarah di Australia yang dari segi filosofis lebih didominasi sudut pandang esensialisme. Sebab dari empat tujuan yang terdapat dalam kurikulum sejarah itu ada tiga tujuan yang memperlihatkan sudut pandang esensialisme yaitu pada tujuan kedua sampai keempat. Meskipun begitu kurikulum sejarah di Australia juga memperlihatkan adanya dasar pemikiran yang berangkat dari rekonstruksi sosial, akademik dan humanisme sebagaimana yang terdapat dalam tujuan kesatu dan kedua. Agar tercapai semua tujuan yang terdapat dalam kurikulum tersebut maka dikembangkanlah dalam bentuk materi yang harus dipelajari peserta didik.

Materi Sejarah

Materi sejarah yang dipelajari peserta didik di Indonesia ternyata jauh lebih banyak dan luas dibandingkan dengan yang dipelajari peserta didik di Australia. Peserta didik di Indonesia mempelajari 10 topik materi yang dibahas dalam pelajaran Sejarah Indonesia. Mulai dari pra-aksara sampai dengan reformasi. Materi yang dipelajari lebih menekankan bagaimana perjalanan hidup bangsa Indonesia sejak pra-aksara sampai reformasi. Apa yang dipelajari peserta didik dalam Sejarah Indonesia itu menemukan perluasan dan pendalaman dalam mata pelajaran Sejarah yang ditempuh peserta didik di program peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Ada 13 topik materi yang dipelajari peserta didik program IPS mulai dari prinsip dasar ilmu sejarah sampai Indonesia dan dunia pada masa revolusi teknologi informasi dan komunikasi.

Kalau dalam Sejarah Indonesia lebih menyoroti kondisi kedalam, maka dalam pelajaran sejarah yang dilihat bagaimana Indonesia dalam konteks sejarah dunia. Jadi pelajaran sejarah di kelas peminatan mengajak peserta didik membahas perjalanan hidup bangsa Indonesia yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan bangsa-bangsa lain, termasuk kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Lain halnya dengan peserta didik di Australia. Mereka melalui mata pelajaran Sejarah Kuno (*Ancient History*) dan Sejarah Modern (*Modern History*) tidak mempelajari seluruh unit atau topik yang disediakan sebagaimana halnya di Indonesia. Peserta didik diberi kesempatan memilih dari topik yang disediakan untuk mereka pilih sebagai bahan pembelajaran.

Pada kedua mata pelajaran itu masing-masingnya terdapat 4 unit. Namun setiap unit tidak sama banyak topik yang dibahas. Sejarah Kuno topiknya lebih banyak dibandingkan Sejarah Modern. Sejarah Kuno topik pilihannya antara 7-16 topik pada setiap unit dengan fokus pada peristiwa penting, masyarakat, periodisasi, situs, sumber atau isu sejarah. Sedangkan Sejarah Modern topik pilihannya antara 5-8 topik pada setiap unitnya dengan fokus pada gerakan dan perkembangan negara bangsa (negara modern). Topik-topik pilihan itu dapat dipilih oleh peserta didik sebanyak 1-2 baik yang terkait dengan pengetahuan dan pemahaman sejarah, maupun yang menyangkut keterampilan sejarah. Bagaimana perbandingan materi yang dipelajari peserta didik di Indonesia dengan Australia dapat dilihat pada tabel berikut.

**Perbandingan Materi Sejarah Yang Dipelajari Siswa
Indonesia dan Australia**

	INDONESIA (SMA/MA)		AUSTRALIA (SSS)	
	Sejarah Indonesia	Sejarah	Ancient History	Modern History
	Praaksara	Prinsip Dasar Ilmu Sejarah	Investigating the Ancient World	Understanding the Modern World
	Hindu-Buddha	Peradaban awal masyarakat dunia dan Indonesia	Ancient Societies	Movement for Change in the 20th Century
	Kerajaan-kerajaan Islam	Perkembangan negara-negara tradisional di Indonesia	People, Power, and Authority	Modern Nations in the 20th Century
	Penjajahan bangsa Barat	Indonesia pada masa penjajahan	Reconstructing the Ancient World	The Modern World since 1945
	Pergerakan Nasional	Revolusi besar dunia dan pengaruhnya		
	Proklamasi dan Perjuangan mempertahankan kemerdekaan	Kebangkitan heroisme dan kebangsaan Indonesia		
	Demokrasi Liberal	Proklamasi dan perkembangan negara kebangsaan Indonesia		
	Demokrasi Terpimpin	Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia		
	Orde Baru	Dunia pada masa Perang Dingin dan perubahan politik global		
	Reformasi	Indonesia pada masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin		
		Indonesia pada masa Orde Baru		
		Indonesia pada masa Reformasi		
		Indonesia dan Dunia pada masa Revolusi Teknologi Informasi dan Komunikasi.		

Metode dan Penilaian

Berbagai topik materi di atas dalam proses pembelajaran ternyata antara peserta didik Indonesia dengan peserta didik Australia berbeda pengalaman yang ditempuh. Sebab metode pembelajaran yang berlangsung di Indonesia meskipun dengan menggunakan pendekatan saintifik yang berarti peserta didik dituntut dalam proses pembelajaran terutama menggunakan metode *discovery learning*, *project based learning*, dan *problem based learning*, tetapi tidak melatih peserta didik untuk melakukan interpretasi sebagaimana yang terjadi di Australia. Peserta didik di Australia dalam belajar sejarah terjun langsung dalam mendapatkan informasi tentang sejarah dengan mencari sumber dan merekonstruksinya, sehingga mereka harus mampu melakukan interpretasi dan menyajikannya. Itu dapat dilakukan secara individual dan bisa juga secara kelompok. Apa yang dilakukan oleh peserta didik di Australia itu juga memperlihatkan adanya pendekatan saintifik dalam metode pembelajarannya. Kurikulum sejarah di Australia memang tidak mengungkapkan secara eksplisit metode apa saja yang bisa digunakan dalam pembelajaran.

Setiap proses pembelajaran selalu diikuti dengan penilaian. Sebab penilaian merupakan salah satu komponen kegiatan dalam pembelajaran dalam rangka mengukur tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran sehingga diketahui sudah sejauh mana pencapaian yang didapat oleh peserta didik. Sehubungan dengan penilaian itu di Indonesia dilaksanakan dalam dua bentuk penilaian yaitu penilaian autentik dan non autentik. Penilaian autentik terdiri dari penilaian berdasarkan pengamatan, tugas ke lapangan, portofolio, proyek, produk, jurnal, kerja laboratorium, unjuk kerja dan

penilaian diri. Sedangkan penilaian non autentik bentuknya berupa tes, ulangan, dan ujian. Semua bentuk penilaian itu untuk mengetahui pencapaian kompetensi sikap spiritual dan sikap sosial, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan dari masing-masing peserta didik.

Secara umum pencapaian hasil pembelajaran di Australia dilaksanakan dengan menggunakan penilaian berbasis sekolah, ujian eksternal, dan tes eksternal berskala. Ujian berbasis sekolah bentuknya antara lain portofolio, laporan investigasi. Ujian eksternal diperoleh melalui kombinasi pilihan ganda, jawaban singkat, dan tugas-tugas tambahan. Ujian eksternal biasanya berlangsung ketika peserta didik akan mendapatkan sertifikat pertama yang dilaksanakan pada akhir pendidikan level 12. Namun setiap negara bagian berbeda-beda dalam menerapkan sistem penilaian tersebut. Ada negara bagian yang untuk unit 1 dan 2 menggunakan penilaian berbasis sekolah, sementara unit 3 dan 4 merupakan gabungan penilaian berbasis sekolah dan ujian eksternal dimana persentasenya 70% berbasis sekolah dan 30% ujian eksternal.

KESIMPULAN

Sistem pendidikan Indonesia dan Australia tidak jauh berbeda antara satu dengan yang lain jika dilihat dari sisi jenjang pendidikan. Perbedaan yang ada lebih kepada masa studi pada masing-masing jenjang pendidikan. Perbedaan masa studi itupun tidak di seluruh negara bagian maupun teritori yang ada di Australia. Pada jenjang sekolah dasar Indonesia berbeda dengan Negara Bagian South Australia, Northern Territory, Queensland, dan Western Australia. Peserta didik di Indonesia hanya belajar

selama 6 tahun, sementara negara bagian tersebut berlangsung selama 7 tahun. Sebaliknya untuk jenjang pendidikan sekolah menengah tingkat pertama Indonesia dan Negara bagian tersebut lama pendidikan berlangsung 3 tahun. Perbedaan justru terjadi dengan Negara Bagian New South Wales, Victoria, Tasmania, dan Australia Capital Territory dimana proses pembelajaran berlangsung selama 4 tahun. Oleh karena perbedaan yang terjadi di tingkat sekolah menengah pertama maka akhirnya perbedaan itu berlangsung juga untuk jenjang pendidikan sekolah menengah tingkat atas yang kalau di Indonesia berlangsung selama 3 tahun maka di Australia hanya berlangsung 2 tahun.

Pada jenjang pendidikan tinggi untuk memperoleh gelar sarjana di Indonesia bisa diperoleh dalam jangka waktu 4 tahun. Sebaliknya di Australia diperoleh dalam jangka waktu 3 tahun. Untuk program gelar magister (Indonesia) atau master (Australia), peserta didik di Australia bisa menyelesaikan pendidikan lebih cepat daripada peserta didik di Indonesia. Sedangkan untuk program doktor ternyata lama masa studinya tidak ada perbedaan antara Indonesia dan Australia.

Kurikulum pendidikan sejarah antara Indonesia dan Australia secara filosofis terdapat perbedaan. Secara filosofis pendidikan sejarah di Indonesia lebih banyak aspeknya, tidak seperti Australia yang didominasi filosofis esensialisme. Oleh karena itu maka dari sisi pembelajaran meskipun sama-sama pendekatan saintifik, tetapi peserta didik di Australia didorong untuk mampu mengembangkan kemampuan interpretasi ketika mereka ditugaskan membuat karya tulis baik secara kelompok maupun individu. Dalam

hal metode pembelajaran kurikulum di Indonesia secara eksplisit menyebutkan berbagai metode yang utama dapat dilaksanakan. Sebaliknya di Australia tidak secara eksplisit mengungkapkan metode pembelajaran yang diterapkan. Selain itu peserta didik di Australia dalam belajar sejarah materinya tidak sebanyak peserta didik di Indonesia. Jika di Indonesia peserta didik mempelajari semua topik yang terdapat dalam kurikulum, maka di Australia peserta didik hanya memilih topik-topik tertentu yang memang mereka minati untuk didalami.

Daftar Pustaka

- Acara. *The Shape of The Australian Curriculum Version 4.0*, 2012.
- _____. *Curriculum Design Paper Version 3.1*, Sydney, Acara, 2013.
- _____. *The Australian Curriculum Version 7.2*, 2014.
- Arta, Ketut Sedana. "Kurikulum dan Kontroversi Buku Teks Sejarah Dalam KTSP," Media Komunikasi FIS, Vol II No. 1, April 2012.
- Australian Education Act 2013.
- Australian Education Bill 2012.
- Australian Education International. Country Education Profiles Australia, Department of Industry, Innovation, Science, Research and Tertiary Education, Australian Government.
- Biro Pusat Statistik. Hasil Sensus Penduduk SP 2000, Jakarta, Bagian Publikasi Sekretariat Badan Nasional Pusat Statistik, 2011.
- Department Immigration and Border Protection. *The People Of Australia Statistics From The 2011 Census*, Commonwealth of Australia, 2014.
- Hafid, Anwar Jafar Ahiri, dan Pendais

- Haq. *Konsep Dasar Ilmu Pendidikan*, Bandung, Alfabeta, 2014.
- Hasan, Hamid. *Pendidikan Sejarah Indonesia Isu dalam Ide dan Pembelajaran*, Bandung, Rizqi Press, 2012.
- Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah
- Melbourne Declaration on Educational Goals for Young Australians December 2008
- Mudyahardjo, Redja. *Pengantar Pendidikan Sebuah Studi Awal tentang Dasar-Dasar Pendidikan Pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014.
- Nur, Agustiar Syah. *Perbandingan Sistem Pendidikan 15 Negara*, Bandung, Lubuk Agung, 2001.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 104 Tahun 2014 tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
- Sunarti dan Selly Rahmawati. *Penilaian Kurikulum 2013 Membantu Guru dan Calon Guru Mengetahui Langkah-Langkah Penilaian Pembelajaran*, Yogyakarta, Penerbit Andi, 2014.
- Tirtahardja, Umar dan La Sulo. *Pengantar Pendidikan*, Jakarta, Rineka Cipta, 2012.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Walker, Decker. *Fundamentals of Curriculum*, Orlando, Harcourt Brace Jovanovich Inc., 1990.
- Widoyoko, S. Eko Putro. *Penilaian Hasil Pembelajaran di Sekolah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2014.
- www.indonesia.embassy.gov.au/filesjaktLF_sistem_pemerintahan.pdf diakses tanggal 10 Maret 2015 pukul 10.25.

Sistem Pendidikan dan Pendidikan Sejarah di Singapura Sebagai Refleksi bagi Pengembangan Kurikulum di Indonesia

Oleh : Djunaidi

Pendidikan Sejarah PPS UNJ

Abstract

This paper examines the history of the education system and education in Singapore to reflect for curriculum development in Indonesia. The results show, that the education system in Singapore and Indonesia are relatively not much difference. The differences even in consistency and consequent of both countries in implementing it. The Ministry of Education of Singapore is very consistent and consequently, the opposite occurs in Indonesia. The consistency of government and the consequences of it has been a factor of excellence in the education system of Singapore. The next finding, development of educational curriculum in high school history in Singapore prepared with a very broad scope, holistic and philosophical orientation, global competition based on perennialism, humanism, and reconstructionism, so that they can participate to realize the advantages of education in Singapore.

Key words: education system, history education, reflection development.

Abstrak

Tulisan ini mengkaji tentang sistem pendidikan dan pendidikan sejarah di Singapura dalam rangka refleksi bagi Pengembangan Kurikulum di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan, bahwa pada sistem pendidikan di Singapura dan di Indonesia relatif tidak banyak terdapat perbedaan. perbedaan malah pada konsistensi dan konsekuen pemerintah kedua negara dalam mengimplementasikannya. Kementerian Pendidikan Singapura sangat konsisten dan konsekuen, hal sebaliknya terjadi pada pemerintah Indonesia. Konsistensi dan konsekuensi itu yang menjadi faktor keunggulan sistem pendidikan di Singapura. Temuan berikutnya, pengembangan kurikulum pendidikan sejarah pada sekolah menengah di Singapura disusun dengan cakupan sangat luas, holistik dan berorientasi persaingan global berlandaskan kepada filosofis perenialisme, humanisme, dan reconstructionism, sehingga mampu berperan serta mewujudkan pendidikan keunggulan Singapura.

Kata Kunci: Sistem Pendidikan, Pendidikan Sejarah, Refleksi Pengembangan.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan strategis bagi keberlangsungan, perkembangan dan kemajuan suatu bangsa. Lewat media pendidikanlah kualitas sumber daya manusia dapat ditingkatkan. Oleh karena itu, upaya untuk mengembangkan sistem pendidikan terus dilakukan selaras dengan tuntutan kebutuhan perkembangan jaman. Salah satu bagian terpenting dari sistem pendidikan yang menjadi fokus

perhatian untuk senantiasa disesuaikan dan ditingkatkan kualitasnya adalah kurikulum.

Pendidikan sejarah sebagai salah satu bagian dari kurikulum juga menjadi penting kontribusi atau peranannya. Begitu pentingnya pendidikan sejarah sehingga dapat menjadi alat legitimasi pemerintah untuk menyampaikan pesan pembangunan sekaligus ideologi politiknya. Lewat pendidikan sejarah,

Soekarno presiden RI-1 menegaskan seruan ideologis “Anti imperialisme-kolonialisme-westernisme dan tegakkan nasakomisme” serta diteruskan dengan kebijakan pembangunan “Berdikari”. Tidak cukup itu, Soekarno bahkan mengingatkan masyarakat dan bangsa Indonesia dengan slogan populernya “Jasmerah” (Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah). Kemudian Soeharto, presiden RI-2 juga tidak kalah menariknya lewat seruan ideologis “Anti-PKI dan antek-anteknya dan tegakkan Pancasila-isme”, serta diteruskan dengan slogan populernya “Pembangunan-isme”. Presiden-presiden RI berikutnya pun tidak luput dari hal itu.

Baru-baru ini seiring dengan pergantian lembaga eksekutifnya, dunia pendidikan Indonesia membuat sejarah baru dengan memberlakukan dua kurikulum di tingkat sekolah dasar dan menengah. Hal ini bisa dinyatakan, Indonesia masih mencari sistem pendidikan yang tepat. Ujian Nasional (UN) sebagai kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mengukur tingkat kualitas penyelenggaraan pendidikan nasional direspon pro dan kontra. Bahkan, UN pada akhirnya melahirkan eksese negatif berupa ketidakjujuran bagi yang “belum siap melaksanakannya.” Penyelenggaraan sistem pendidikan di Indonesia relatif masih jauh dari harapan. Laporan monitoring global yang diterbitkan UNESCO tahun 2011 menempatkan sistem pendidikan Indonesia berada pada peringkat 10 dari 14 negara berkembang yang berada di kawasan Asia Pasifik (<http://ikasp.wordpress.com>, Diakses 28.12.2014).

Berbanding terbalik dengan kenyataan di Indonesia ditunjukkan oleh negara tetangga Singapura yang penuh dengan paradok keunggulan. Singapura Negara ‘terkecil’ di Asia Tenggara dengan luas wilayah ± 697 Km² dan jumlah penduduk

± 4.987.600 jiwa dengan kepadatan penduduk 7.022/km² (Endarto, 2014), tetapi pembangunan ekonomi dan sosialnya menempatkan Singapura menjadi negara maju. Singapura yang relatif muda sebagai negara merdeka dibandingkan dengan beberapa negara di Asia Tenggara lainnya termasuk Indonesia, tetapi menurut data IMF memiliki pendapatan perkapita penduduknya pada tahun 2013 masih yang terbesar di Asia Tenggara, yakni US \$ 57.238.

Diakui ketercapaian kemajuan pembangunan sebuah negara sangat ditentukan oleh kualitas SDM-nya. Seajar dengan itu, kualitas SDM diakui sebagai indikator kualitas pengelolaan dan pengembangan sistem pendidikannya (Rusman, 2012: 1).

Sistem pendidikan Singapura terunggul dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya, bahkan beberapa negara dunia (Sudrajat, 2014). Lulusan pendidikan di Singapura dinyatakan terbaik, sehingga mendapat penghargaan dunia. Keberhasilan ini telah menjadikan Singapura sebagai pusat pendidikan atau tujuan studi bagi 86 ribu pelajar/mahasiswa dari 120 negara, untuk semua jenjang pendidikan mulai dari SD sampai Pasca Sarjana, di sekolah/ perguruan tinggi swasta, negeri, dan internasional.

Penyelenggaraan ujian nasional di Singapura bisa tanpa pengawas (Ujang Sudrajat:2014) Dengan kata lain, objektivitas pelaksanaan ujian sudah terbangun dalam sistem pendidikan di Singapura, termasuk oleh peserta didik. Terbentuknya karakteristik objektif atau kejujuran itu tidak terbangun dengan sendirinya. Tak dapat disangkal, bahwa peran pendidikan sangat besar, termasuk pendidikan sejarah yang menjadi bagiannya.

Tulisan ini akan mendeskripsikan sistem pendidikan dan pendidikan sejarah di negara tetangga Singapura sebagai bahan refleksi bagi pengembangan pendidikan di Indonesia, termasuk kurikulum pendidikan sejarah. Berdasarkan paparan yang telah disajikan dalam bagian pendahuluan, maka tulisan ini akan menjawab 2 (dua) pertanyaan, yakni:

1. Faktor pokok apakah yang menjadikan pendidikan Singapura mencapai keunggulan ?
2. Bagaimanakah peran pendidikan sejarah di sekolah menengah dalam rangka mencapai pendidikan keunggulan tersebut ?

KAJIAN TEORETIK

Tulisan ini mengkaji sistem pendidikan dan pendidikan sejarah di negara Singapura sebagai bahan perbandingan untuk refleksi bagi pengembangan kurikulum di Indonesia. Oleh karena itu, dalam kajian teoritik ini akan diuraikan mengenai konsep sistem pendidikan, pendidikan sejarah, dan refleksi pengembangan kurikulum.

Sistem Pendidikan

Nana Sudjana (1989:7) mendefinisikan sistem pendidikan adalah suatu system yang terdiri dari komponen-komponen yang ada dalam proses pendidikan, dimana antara satu komponen dengan komponen yang lainnya saling berhubungan dan berinteraksi untuk mencapai tujuan pendidikan. Tiga hal yang perlu penjelasan dari definisi sistem pendidikan tersebut, yakni komponen-komponen sistem pendidikan, saling hubungan dan interaksi antara komponen dalam mencapai tujuan pendidikan, dan tujuan pendidikan itu sendiri.

Komponen-komponen sistem pendidikan menurut Tirtarahardja (2004: 3) terdiri dari tujuan pendidikan, kurikulum, tenaga kependidikan, manajemen kependidikan, dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pendidikan (stakeholder). Dalam tulisan ini komponen-komponen tersebut lebih ditegas-kan pada aspek-aspek kebijakan, orientasi dan tujuan, serta lembaga dan jenjang pendidikan (Sudrajad, Loc. Cit.). Sementara saling berhubungan dan berinteraksi antar komponen sistem pendidikan tersebut lebih diterjemah-kan sebagai konsistensi dan konsekuensi dalam mengimplementasikannya. Sedangkan tujuan pendidikan dalam tulisan ini dikaitkan secara spesifik dengan 4 (empat) landasan filosofis Tanner dan Tanner (1980) dalam mengembangkan kurikulum, yakni: perenialisme, essensialisme, humanisme, dan rekonstruksionisme (Yulaelawati, 2004: 4-5).

Pengembangan kurikulum berlandaskan perenialisme bertujuan untuk the glorius, yakni rasa bangga terhadap prestasi bangsa. Essensialisme bertujuan mengembangkan kemampuan intelektual generasi muda. Humanisme menekankan pada tujuan untuk mengembangkan kepribadian peserta didik sesuai dengan nilai-nilai yang dianggap menguntungkan dirinya dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai masyarakatnya. Sedangkan pengembangan kurikulum berlandaskan filosofi rekonstruksi sosial bertujuan untuk menyiapkan peserta didik sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat. Dalam konteks ini, Schubert menegaskan bahwa penggunaan landasan filosofis tersebut harus bersifat eklektik (Hasan, 2012: 9).

Pendidikan Sejarah

Pendidikan sejarah sebagai bagian dari kurikulum pada hakikatnya akan

dikembangkan sesuai dengan tujuan pendidikan tersebut diatas. Menurut Said Hamid Hasan (Umasih, 2000:134), bahwa pendidikan sejarah berdasarkan perenialisme mengembangkan tugas *transmission of culture*, yakni membawa siswa kepada penghargaan yang tinggi terhadap prestasi bangsa di masa lalu. Dengan penghargaan ini akan tumbuh nilai-nilai kebanggaan dan nasionalisme bangsa pada peserta didik. *Essensialisme* memandang pendidikan sejarah adalah alat pengembangan intelektualitas historis generasi muda. Dalam konteks ini pendidikan sejarah diajarkan sebagai suatu disiplin ilmu dan tidak digabungkan dengan disiplin lainnya. *Perspektif humanisme* memandang pendidikan sejarah dipelajari tidak hanya untuk pengembangan intelektualitas historis peserta didik, tetapi juga penanaman nilai-nilai kesejarahan. Sedangkan tujuan pendidikan sejarah menurut *perspektif rekonstruksi sosial* adalah untuk membekali peserta didik tentang cara berpikir, pemahaman konsep, nilai dan ketrampilan sejarah dalam rangka kehidupan yang lebih baik di masa sekarang dan masa akan datang.

Refleksi Pengembangan Kurikulum

Menurut Mulyatiningsih (2012: 74), refleksi merupakan pengkajian terhadap keberhasilan dan kegagalan suatu upaya tertentu dalam mencapai tujuan guna menetapkan tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam rangka perbaikan. Dalam konteks tulisan ini, upaya yang dimaksud adalah implementasi kurikulum dan atau sistem pendidikan di Singapura. Sementara perbaikan yang dimaksud adalah pengembangan kurikulum dan atau sistem pendidikan di Indonesia.

Menurut Popham, kurikulum adalah pernyataan mengenai tujuan. Sedangkan

menurut Tanner kurikulum adalah suatu rencana tertulis. Olivia lebih menekankan, bahwa kurikulum adalah perangkat pendidikan yang merupakan jawaban terhadap kebutuhan dan tantangan masyarakat dan kurikulum ini sangat fundamental dan menggambarkan posisi sesungguhnya suatu proses pendidikan (TPIP, 2007: 1). Hal senada dinyatakan oleh Hasan (2012: 3), bahwa kurikulum adalah kebijakan pendidikan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah dan merupakan jawaban terhadap masalah yang dihadapi bangsa.

Menurut Carter v.Good, upaya refleksi pengembangan kurikulum dapat dilaksanakan melalui studi perbandingan kurikulum antar negara. Pada hakikatnya studi perbandingan sistem pendidikan yang bertugas mengadakan perbandingan teori dan praktik kurikulum atau sistem pendidikan yang ada di dalam beberapa negara dengan maksud untuk refleksi atau memperluas pandangan dan pengetahuan di luar batas negerinya sendiri. Thomas Murray mengingatkan, bahwa dalam arti yang paling inklusif, studi komparatif sistem pendidikan mengacu pada memeriksa dua atau lebih entitas pendidikan atau peristiwa untuk mengetahui bagaimana dan mengapa mereka sama dan berbeda. Demikian juga Thomas Poin, Stewart, dan William Fraser Bricman menyatakan, bahwa studi komparatif sistem pendidikan mengacu pada studi kemiripan dan perbedaan pendidikan antara wilayah dunia atau antara dua atau lebih negara terkait analisis masalah sistem pendidikan (TPIP, Loc. Cit).

Mappa Nasrun (Nur, 2001: vi) menyatakan, bahwa studi perbandingan pendidikan dan atau kurikulum bertujuan untuk menjadi bahan masukan atau refleksi yang sangat bermanfaat bagi

perkembangan sistem pendidikan dan atau kurikulum karena dengan mengetahui sistem pendidikan dan atau model kurikulum negara-negara lain akan memperluas cakrawala dan khasanah serta dengan itu dapat menarik manfaat dalam membenahi pendidikan di Indonesia di masa akan datang. Dorodjatun Kuntjoro Jakti menegaskan, bahwa mengetahui kurikulum di negara lain bukan berarti otomatis akan meniru dan akan mengubah sistem pendidikan di Indonesia, tetapi paling tidak dapat mengambil pelajaran atau refleksi untuk tidak melakukan kekeliruan yang terjadi pada negara lain serta untuk meningkatkan kepercayaan diri bahwa bagian-bagian tertentu dalam kurikulum dan sistem pendidikan Indonesia sudah benar dan baik serta perlu dilanjutkan atau dikembangkan sesuai dengan konteks budaya Indonesia (Ibid., h. vii).

Dari pernyataan para ahli tersebut dapat dinyatakan, bahwa (1) dalam studi perbandingan sistem pendidikan dan atau kurikulum di negara mana yang akan dipilih untuk dibandingkan bisa yang terbaik atau sebaliknya; dan (2) studi perbandingan sistem pendidikan dan atau kurikulum bertujuan untuk bahan refleksi bagi pengembangan sistem pendidikan dan atau kurikulum agar lebih efisien dan efektif dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan.

Muara keberhasilan implementasi sistem pendidikan dan atau kurikulum akan ditentukan oleh tingkat manajemen pengelolaannya. Sering terjadi implementasi sistem pendidikan dan atau kurikulum tidak sesuai dengan perencanaannya, sehingga mengakibatkan ketidak tercapaian tujuannya. Oleh karena itu menurut Rusman (2012: 18), implementasi kurikulum harus dikelola secara profesional, yakni konsisten dan konsekuen sesuai perencanaannya.

METODE PENELITIAN

Artikel ini ditulis dengan menggunakan metode kajian pustaka. Data yang digunakan sebagai sumber penulisan berupa arsip-arsip dari kementerian pendidikan Singapura (MoE) yang diakses melalui internet, buku mata pelajaran sejarah Sekolah Menengah yang digunakan di Singapura dan beberapa buku dan artikel yang erkait dengan kajian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk menjawab pertanyaan permasalahan, maka tulisan ini akan membahas tentang: 1). Sistem pendidikan di Singapura, 2). Kurikulum dan pendidikan sejarah pada tingkat sekolah menengah di Singapura, dan 3). Refleksi bagi pengembangan kurikulum di Indonesia.

Sistem Pendidikan di Singapura

Pada bagian ini ada 3 komponen yang dideskripsikan, yakni a) kebijakan, orientasi dan tujuan pendidikan; dan b) lembaga dan jenjang pendidikan (Ujang Sudrajad, 2014).

A. Kebijakan, Orientasi, dan Tujuan Pendidikan

Kebijakan pendidikan negara Singapura, terutama untuk tingkat pra sekolah sampai sekolah menengah adalah berupaya membantu anak atau peserta didik pengembangan bakat dan minatnya yang bersifat individual dan unik. Dipahami oleh pemerintah negara Singapura, bahwa anak atau peserta didik memiliki potensinya sendiri-sendiri yang spesifik atau khas. Oleh karena itu, pendidikan di negara Singapura diselenggarakan dalam rangka mempersiapkan peserta didik menjadi generasi yang memiliki kemampuan untuk bertahan hidup dalam lingkungan yang

penuh dengan persaingan demi masa depan yang lebih baik.

Dengan kebijakan tersebut, Singapura memiliki orientasi pendidikan sebagai pusat pendidikan keunggulan dan pendidikan internasional. Sedangkan tujuan pendidikannya mencetak peserta didik yang memiliki kemampuan inovatif dengan bertumpu pada semangat kewiraswastaandan penguasaan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional dan salah satu bahasa lokal, yakni bahasa Melayu, Mandarin, dan bahasa Tamil sesuai dengan latarbelakang etnis peserta didik. Penguasaan bahasa lokal dimaksudkan agar peserta didik mengenal jati dirinya dan sebagai upaya melestarikan "budaya ibu"-nya.

Secara khusus, ada 4 (empat) tujuan khusus penyelenggaraan pendidikan Singapura, yakni:

1. Menumbuhkan sikap percaya diri, yaitu tahu benar-salah, adaptif, tangguh, cerdas dalam menilai, berpikir mandiri dan kritis, dan berkomunikasi secara efektif;
2. Pembelajar mandiri, yaitu tanggung jawab, mempertanyakan, tekun dan motivasi berprestasi;
3. Kontributor aktif, yaitu mampu bekerjasama secara efektif, berinisiatif, memutuskan dengan cermat, inovatif, dan unggul;
4. Pembelajar yang sadar lingkungan, yaitu memiliki kesadaran yang kuat dan berperan aktif dalam menjaga lingkungan yang bersih, indah, dan asri.

B. Lembaga dan Jenjang Pendidikan di Singapura

Dalam sistem pendidikan di Singapura dikembangkan 4 (empat) lembaga pendidikan utama, yaitu:

1. Sekolah negeri, untuk tingkat sekolah

dasar dan menengah,

2. Sekolah swasta untuk pendidikan tingkat dasar dan menengah,
 3. Sekolah asing/internasional dengan system luarnegeri.
 4. Universitas Lokal, Pendidikan Politeknik dan Lembaga Teknik
- 1). Sekolah Negeri

Sekolah negeri tingkat dasar dan menengah di Singapura adalah sekolah yang penyelenggaraan pendidikannya didanai langsung oleh pemerintah dan independen (mitra industri).

2). Sekolah Swasta

Di Singapura juga berkembang sekolah-sekolah swasta yang turut menawarkan berbagai jenis program, menambah lengkapnya keanekaragaman dunia pendidikan di negeri ini. Terdapat sekitar 300 sekolah swasta di Singapura, dengan penjurusan seperti komersial, TI, seni rupa dan bahasa. Private Education Institutions (PEI/Lembaga Pendidikan Swasta) ini menawarkan berbagai program studi yang banyak dicari oleh siswa lokal maupun internasional. PEI menawarkan berbagai program studi di tingkat sertifikat, diploma, sarjana (bachelor) maupun pascasarjana (postgraduate). Melalui kemitraan dengan berbagai universitas internasional yang populer dari AS, Inggris, Australia dll, PEI menawarkan kesempatan bagi siswa untuk mendapatkan sertifikasi internasional dalam lingkungan yang aman dan terjangkau.

3). Sekolah sistem luar negeri/Internasional

Singapura memiliki sejumlah sekolah sistem luar negeri/internasional yang terdaftar pada Ministry of Education (MOE), kementerian pendidikan Singapura. MOE inilah yang memberi ijin masuk untuk para siswa asing dan penduduk setempat. Sekolah sistem luar negeri/ Internasional ini menawarkan kesempatan kepada siswa

untuk mengikuti pendidikan yang identik aturan dan kurikulumnya dengan negara asal.

Kriteria tiap sekolah sistem luar negeri/internasional ini berbeda. Beberapa diantaranya menentukan persyaratan minimum calon siswa pada saat melakukan pendaftaran, seperti kemampuan bahasa atau kewarganegaraan.

4). Universitas Lokal, Pendidikan Politeknik dan Lembaga Teknik

Selain universitas lokal, banyak juga universitas-universitas asing terkemuka yang telah hadir di Singapura. Universitas-universitas ini ada yang mendirikan kampusnya sendiri (institusi untuk pendidikan lanjutan) atau mempunyai program gabungan/kolaborasi dengan universitas lokal (kerja sama lokal). Universitas-universitas lokal mempunyai program kerja sama dengan lebih dari 16 institusi lainnya di seluruh dunia. Terdapat juga institusi-institusi khusus asing di Singapura, yang telah mendirikan kampusnya di sini atau bekerja sama dengan politeknik-politeknik lokal.

Sementara jenjang pendidikan di Singapura di mulai dari Pendidikan Pra Sekolah, Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan, Akademi/Pra Universitas, dan terakhir jenjang Universitas.

1). Pendidikan Pra Sekolah

Pendidikan Pra Sekolah diselenggarakan pada Taman Kanak-Kanak dan Pusat Perawatan Anak selama tiga tahun untuk anak usia 3 hingga 6 tahun. Taman kanak-kanak di Singapura dilaksanakan oleh yayasan masyarakat, perkumpulan keagamaan, organisasi sosial dan bisnis. Taman Kanak-Kanak terdaftar pada Kementerian Pendidikan, sedangkan Pusat Perawatan Anak mendapat ijin dari Kementerian Pengembangan Masyarakat dan Olah Raga.

Umumnya Taman Kanak-Kanak di Singapura menyelenggarakan dua sesi pelatihan dalam sehari. Tiap sesi pelatihan biasanya selama 2,5 sampai 4 jam/ 5-hari setiap minggunya.

2). Sekolah Dasar

Pendidikan Sekolah Dasar di Singapura selama 6 tahun, terdiri dari 4 tahun tahap dasar pertama yaitu Sekolah Dasar kelas 1 sampai 4 dan tahap orientasi tahun ke dua yaitu Sekolah Dasar kelas 5 sampai 6.

Kurikulum inti Sekolah Dasar terdiri dari pengajaran Bahasa Inggris, Bahasa daerah dan matematika, dengan mata pelajaran tambahan seperti musik, kesenian dan kerajinan tangan, pendidikan fisik dan pembelajaran sosial. Ilmu pengetahuan sudah diajarkan sejak kelas 3 Sekolah Dasar. Untuk memaksimalkan potensinya, siswa diarahkan menurut kemampuan belajar mereka sebelum menguasai tahap orientasi. Pada akhir kelas 6 SD, siswa mengikuti Ujian Kelulusan Sekolah Dasar (Primary School Leaving Examination). Kurikulum Sekolah Dasar di Singapura telah digunakan sebagai model internasional, khususnya metode pengajaran matematika. Siswa asing dari negara manapun diterima di Sekolah Dasar menurut ketersediaan lowongan tempat.

3). Sekolah Lanjutan

Sekolah Lanjutan di Singapura terdiri dari sekolah dengan dana pemerintah, bantuan pemerintah atau biaya sendiri. Para siswa melaksanakan pendidikan lanjutan selama 4 atau 5 tahun melalui program spesial, cepat ataupun normal. Program spesial dan cepat mempersiapkan siswa untuk mengikuti ujian GCE 'O' (Singapore-Cambridge General Certificate of Education 'Ordinary') pada tingkat empat. Siswa pada program normal dapat memilih jurusan akademik atau

teknik, yang keduanya mempersiapkan siswa untuk mengikuti ujian GCE 'N' (Singapore-Cambridge General Certificate of Education 'Normal') pada tingkat empat dan jika hasilnya memuaskan, maka siswa akan mengikuti ujian GCE 'O' pada tingkat lima.

Kurikulum pendidikan lanjutan mencakup Bahasa Inggris, Bahasa daerah, Matematika, Ilmu Pengetahuan dan kemanusiaan. Pada tingkat lanjutan ke-3, siswa dapat memilih pilihan mereka sendiri tergantung apakah mereka di jurusan Seni, Ilmu Pengetahuan, Perniagaan atau teknik terapan.

4). Pra-Perguruan Tinggi

Setelah menyelesaikan ujian tingkat GCE 'O', para siswa diperbolehkan mendaftar untuk mengikuti Pra-Perguruan Tinggi melalui program akademi atau institut terpadu. Masa studi program akademiselama 2 tahun dan institut terpadu selama 3 tahun. Kurikulum terdiri dari dua mata kuliah wajib, yaitu General Paper dan Mother Tongue, dan maksimum empat subyek Singapore-Cambridge General Certificate of Education 'Advanced' (GCE 'A') dari tingkat seni, ilmu pengetahuan dan pelajaran tentang perniagaan. Di akhir masa pelajaran pada pra universitas siswa mengikuti ujian tingkat GCE 'A'.

5). Perguruan Tinggi

Jenjang perguruan Tinggi di Singapura terdiri dari 3 jenis, yakni politeknik, Institut Pendidikan Teknik (ITE), dan universitas.

Politeknik

Politeknik didirikan di Singapura untuk menawarkan kepada para siswa tentang pelajaran melalui practice-oriented pada level diploma. Mereka menawarkan ruang lingkup yang luas dari rangkaian pelajaran seperti keahlian teknik, bisnis, komunikasi massa, desain dan info-komunikasi. Mata pelajaran spesialisasi seperti Optometri, Teknik Kelautan, Studi

Kelautan, Perawat, Pendidikan Awal Pada Anak, dan Perfilman juga tersedia bagi mereka yang ingin berlatih di jalur karir tertentu. Lulusan-lulusan politeknik telah membuktikan diri dengan menjadi tenaga kerja yang populer ketika mereka bergabung dalam dunia kerja yang dilengkapi dengan keterampilan dan pengalaman yang terkait pada bidang ekonomi baru.

Institut Pendidikan Teknik (ITE)

ITE merupakan alternatif pilihan setelah melewati tingkat lanjutan bagi mereka yang memilih untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan teknik dalam berbagai sektor industri. Disamping menyediakan program-program bimbingan dan pelatihan kelembagaan secara full-time untuk lulusan sekolah lanjutan, ITE juga menyediakan program-program pendidikan berkelanjutan bagi mereka yang bekerja.

Universitas

Terdapat tiga universitas lokal di Singapura, yakni: (1) National University of Singapore (NUS); (2) Nanyang Technological University (NTU); dan (3) Singapore Management University (SMU). Universitas lokal tersebut mencetak lulusan yang hebat dengan gelar kesarjana yang dikenal secara internasional. Kesempatan untuk melakukan penelitian ilmiah dan beasiswa juga tersedia untuk para siswa lanjutan tingkat akhir.

Kurikulum dan Pendidikan Sejarah di Singapura

Kurikulum Tingkat Sekolah Menengah

Dua komponen kurikulum tingkat sekolah menengah di Singapura yang dipaparkan pada bagian ini adalah kelompok mata pelajaran dan sistem

penilaian hasil belajar .

Pada tingkat sekolah menengah di Singapura, mata pelajaran dihimpun menjadi 6 kelompok, yakni:

1). Kelompok Mata Pelajaran Bahasa:

- Bahasa Ibu, Bahasa Ibu Lanjutan, Komunikasi Bahasa Ibu
- Bahasa Ketiga (pilihan – Bahasa Melayu, Bahasa Mandarin)

2). Kelompok Mata Pelajaran Ilmu Budaya dan Kesenian:

- Pelajaran di tingkat menengah awal: Geografi, Sejarah, Sastra Inggris, Seni Rupa, Seni Musik;
- Pelajaran di tingkat akhir menengah: Ilmu Budaya Terpadu;
- Pelajaran pilihan fakultatif di tingkat menengah akhir: Geografi, Sejarah, Sastra Inggris, Sastra Tiongkok, Seni Musik, Seni Drama, Ekonomi, Ilmu Bisnis, Pengantar Ilmu Pengembangan Perusahaan, Ilmu Media (Bahasa Inggris), Ilmu Media (Bahasa Tiongkok), Elemen-elemen dari Kemampuan Berbisnis.

3). Kelompok Mata Pelajaran Matematika dan Sains :

- Pelajaran di tingkat menengah awal: Matematika, Sains, Teknologi dan Desain, Pendidikan Konsumen dan Pangan;
- Pelajaran di tingkat menengah akhir: Matematika, Subjek Sains;
- Pelajaran pilihan fakultatif di tingkat menengah akhir: Matematika Tambahan, Ilmu Sains Terpadu, Teknologi dan Desain, Makanan dan Nutrisi, Prinsip-Prinsip Akuntansi, Praktik Komputer, Pendidikan Fisik, Prinsip-Prinsip Elektro.

4). Kelompok Mata Pelajaran Pengetahuan dan Kemampuan:

- a. Praktik Kerja

5). Kelompok Mata Pelajaran Keterampilan dalam Kehidupan:

- a. Pendidikan Karakter dan Kewarganegaraan, Kegiatan Ekstrakurikuler, Pendidikan Nasional, Pendidikan Fisik, Nilai dalam Tindakan.

6). Kelompok Mata Pelajaran Bahasa:

- a. Bahasa Inggris, Bahasa Ibu Dasar.

Sistem Penilaian Hasil Belajar

Sistem penilaian hasil belajar siswa di Singapore tidak berbeda dengan di Indonesia, yaitu mengadakan Ujian Nasional (UN). Namun, UN di Singapore tidak pernah diberlakukan sebagai penentu kelulusan siswa. Hal ini dikarenakan sejak sistem pendidikan Singapore dibangun sudah berpandangan, bahwa setiap orang atau warganegara punya kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan. Jadi untuk siswa yang sudah duduk di kelas 4 Express atau yang dikelas 5 normal Academic sudah harus mengikuti 0 level test untuk lulus dari sekolah menengah.

Dalam 0 level test ada 7 (tujuh) pelajaran yang harus diikuti siswa, diantaranya 5 (lima) mata pelajaran pokok dan 2 (dua) mata pelajaran pilihan. 5 (lima) pelajaran pokok tersebut adalah English Mother, Tongue, matematika, IPA (biologi, kimia, fisika), IPS (Sejarah, sosiologi, geografi). Sedangkan 2 (dua) mata pelajaran pilihan, yakni food and nutrition dan design and technology. Semua mata pelajaran tersebut mempunyai standar nilai minimum. Bagi siswa yang tidak mencapai nilai standar tetap lulus, akan tetapi ijazah mereka akan ada nilai merah. Jika mereka tidak ingin ada nilai merah, boleh mengulang satu tahun di kelas yang sama. Setelah sekolah menengah (secondary school), masih ada satu jenjang lagi sebelum ke universitas, yaitu Centralised Institute atau Junior Colleges (tertiary education,

persiapan menuju tingkat universitas). Bagi siswa yang memiliki nilai tinggi hanya 2 tahun sedangkan yang rendah harus 3 tahun di Junior Colleges. Setelah itu mereka harus melewati ujian nasional yang lebih sulit untuk masuk ke universitas.

Kurikulum Pendidikan Sejarah di Tingkat Sekolah Menengah

Pada bagian ini akan dipaparkan tentang materi dan tujuan pembelajaran, nilai-nilai pembelajaran sejarah, dan pendekatan pembelajaran sejarah (Moe-P&DD, 2010).

Materi dan Tujuan Pembelajaran

1). Mengetahui Sejarah Pembentukan Singapore

- Kapan dan Bagaimana Negara Singapore di bentuk (Kondisi Singapore pada saat baru di bentuk) ?
- Bagaimana pengetahuan tentang sejarah Singapore di bentuk (Sudut pandangan para ahli sejarah dalam menceritakan sejarah Singapore secara utuh) ?
- Bagaimana Bukti sejarah yang ada dalam menceritakan hubungan Singapore dengan dunia pada periode abad ke-19 (Hubungan awal singapore dengan negara-negara lain di dunia pada kurun waktu abad pertama hingga abad ke 19) ?

2). Mengetahui Singapore pada Periode 1819

- Bagaimana Kondisi kehidupan setiap orang di Singapore pada periode 1819 ?
- Bagaimana Kondisi orang-orang yang datang ke Singapore pada abad ke 19 hingga awal abad ke 20 ?
- Apa latar belakang orang-orang bermigrasi besar-besaran ke Singapore pada abad ke 19 ?
- Bagaimana perbedaan antar kehidupan

orang-orang di Singapura sebelum perang dunia kedua (Pekerjaan, Kesejahteraan, Hiburan dan Rekreasi, dan Kumpulan atau Komunitas) ?

3). Pencarian Jati Diri untuk Menatap Masa Depan Singapore

- Apakah penduduk Jepang mengubah cara pandang dan pola pikir orang Singapore (Cara pandang orang Singapore pasca pendudukan Jepang pada awal abad ke 20, Pengalaman selama masa pendudukan Jepang hingga masa pasca pendudukan inggris, dan akibat dari pendudukan jepang dan pengalihan kembali ke Inggris) ?
- Bagaimana aspirasi dan ide-ide masyarakat Singapore pasca tahun 1945 (Paparan tentang politik untuk dan bagi bangsa Singapore pada masa pasca tahun 1945, dan pencarian kepercayaan dan jati diri bangsa Singapore) ?

4). Dekade awal berdiri Negara Singapore (1965-1975)

- Bagaimana kehidupan berubah di Singapore (arti kemerdekaan bagi bangsa Singapore, dan memerdekakan diri dari Malaysia) ?
- Bagaimana perkembangan kehidupan rakyat Singapore pasca Kemerdekaan (Kebanggaan menjadi masyarakat atau warga Negara Singapura, Perubahan ekonomi Singapura, dan perubahan standar kehidupan masyarakat Singapore dari bertempat tinggal di rumah took atau ruko hingga bertransformasi ke flat-flat mewah) ?

Nilai-nilai Pembelajaran Sejarah

1). Menyambungkan hal-hal yang terjadi di masa lampau dengan yang terjadi di masa sekarang untuk pembelajaran di masa depan,

2).Menambah ilmu pengetahuan dan nilai guna siswa (menjadi manusia yang tahu dan seimbang dengan berbagai aspek keilmuan atau ilmu pengetahuan).

Pendekatan Pembelajaran

1. Inquiri yaitu, menambah pengetahuan sejarah dari pertanyaan yang bermutu,
2. Berurutan yaitu, belajar secara menyeluruh dengan menyeleksi sumber-sumber sejarah dan ilmu pengetahuan secara efektif.
3. Seimbang yaitu, menambah pengetahuan sejarah dari berbagai pandangan guna membangun sudut pandang siswa tentang sejarah.

KESIMPULAN

Dari paparan di atas tentang sistem pendidikan di Singapura, mulai dari kebijakan, orientasi dan tujuan pendidikan, serta lembaga dan jenjang pendidikan sampai pengembangan kurikulum dan pendidikan sejarah pada sekolah menengah relatif tidak terdapat perbedaan yang terlalu signifikan dengan Indonesia.

Jika pun ada sebagai bahan refleksi bagi pengembangan sistem pendidikan di Indonesia adalah konsistensi dan konsekuen pemerintah Singapura (MoE) mengimplementasikan dengan sangat baik rancangan kurikulumnya. Konsistensi tersebut ditunjukkan, antara lain pada saat menentukan jenjang pendidikan lanjutan bagi siswa dilakukan dengan sistem seleksinya yang sangat ketat dan berkualitas agar benar-benar sesuai dengan bakat dan kemampuannya.

Pengembangan kurikulum Singapura juga bersifat utuh dan seimbang antara dimensi hard skill dan soft skill. Sebagai ilustrasi, ibarat seorang petani dalam kurikulum Indonesia diberikan modal

berupa ladang, alat pertanian dan benih. Lalu diberikan target-target tumbuhnya tanaman. Namun tentang cara menanam, diserahkan kepada petani. Sementara Kurikulum di Singapura, melengkapi petani itu dengan panduan lengkap tentang cara terbaik untuk menanam.

Sedangkan konsekuensinya ditunjukkan oleh kesungguhan pemerintah (MoE) melakukan revisi silabus pembelajaran setiap tahun sesuai dengan perkembangan kebutuhan pendidikannya. MOE juga senantiasa memastikan keseimbangan, ketelitian, relevansi dan respon kurikulum dalam memenuhi kebutuhan abad ke-21. Konsistensi dan konsekuensi itulah yang menjadi faktor pokok penjamin pendidikan Singapura mencapai keunggulannya.

Kemudian, pengembangan kurikulum di Singapura sudah berlandaskan kepada 4 (empat) filosofis, yakni perenialisme, esensialisme, humanisme, dan rekonstruksionisme. Sementara Indonesia terbatas pada landasan filosofis perenialisme dan esensialisme. Hal ini dapat ditunjukkan, antara lain dari pengembangan kurikulum pendidikan sejarah pada tingkat sekolah menengah yang dibahas dalam tulisan ini. Materi, tujuan, nilai, dan pendekatan pembelajaran sejarah dirancang sedemikian rupa sehingga berhasil mewujudkan peserta didik yang tidak hanya percaya dan mengenal jati dirinya, melainkan juga menjadi generasi yang sangat bangga terhadap bangsa dan negaranya. Bahkan, generasi yang memiliki kemampuan untuk bertahan hidup dalam lingkungan yang penuh dengan persaingan. Inilah peran pendidikan sejarah pada tingkat sekolah menengah di Singapura dalam rangka mencapai pendidikan keunggulan.

Daftar Pustaka

- Anneahira. 2014. "Sejarah Singapura." <http://www.anneahira.com.htm>. Di akses 14.12.2014.
- Anonim. <http://ikasp.wordpress.com/2012/12/28/faktor-faktor-penyebab-rendahnya-kualitas-pendidikan-di-indonesia/> Daiakses 18.12.2014.
- Arasumani, R dan Lloyd Yeo. 2010. "Crisis and Conflict: An Enquiry Approach to Modern World History." Buku Paket Siswa. Singapore: Published by Marshall Cavendish Education.
- Baswedan, Anies. 2014. Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 179342/MPK/KR/2014 tentang Pelaksanaan Kurikulum 2013. Tanggal 5 Desember 2014.
- MoE-P&DD (Ministry of Education-Curriculum Planning & Development Division). 2010. "Singapore: From Settlement to Nation Pre-1819 to 1971". Buku Paket Siswa. Singapore: Published by EPB Pan Pasific.
- Endarto. 2014. "Profile Negara Singapura." <http://profilesingapura.wordpress.com>. Diakses. 12.11.2014.
- Hasan, Hamid. 2012. Pendidikan Sejarah Indonesia: Isu dalam Ide dan Pembelajaran. Bandung: Rizqi Press.
- , 2010. "Studi Perbandingan Kurikulum: Apa, Untuk Apa, dan Bagaimana?". Makalah. Disajikan pada seminar internasional di PPS UPI Bandung, tanggal 15 Juni 2010.
- IMF. 2013. "List of countries by GDP (PPP) percapita tahun 2013." <http://en.wikipedia.org/wiki/>. Diakses 11.01.2015.
- Mulyatiningsih, Endang. 2012. Metode Penelitian Terapan Bidang Pendidikan. Bandung: Alfabeta.
- Nur, Agustiar Syah. 2001. Perbandingan Sistem Pendidikan 15 Negara. Bandung: Lubuk Agung.
- Rohman, Arif. 2010. Pendidikan Komparatif. Yogyakarta: LaksBang Mediatama.
- Rusman. 2012. Manajemen Kurikulum. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudrajad, Ujang. 2014. "Singapura sebagai Negara dengan Sistem Pendidikan Terbaik Di Asia Tenggara." <http://konsultasipendidikanluarnegeri.webs.com/apps/blog/show/19637400>. Diakses 07.03.2014.
- Sudjana, Nana. 1989. Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah Kejuruan. Bandung: PT Sinar Baru.
- Syukur, Abdul. 2013. "Pengajaran Sejarah Indonesia kurikulum 1964-2004: Sebuah Stabilitas Yang Dinamis ", Disertasi, Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia.
- Tim Pengembang Ilmu Pendidikan (TPIP). 2007. Ilmu & Aplikasi Pendidikan. Bandung: IMTIMA.
- Tirtarahardja, Umar dan S. L. La Sulo. 2004. Pengantar Pendidikan. Yogyakarta: LaksBang Mediatama.
- Umasih. 2000. "Sejarah Pendidikan di Indonesia: Sebuah Telaah Atas Perubahan Kurikulum Sejarah Indonesia Sekolah Menengah Atas (SMA) Tahun1975-1994." Tesis. Program Pasca Sarjana Ilmu Pengetahuan Budaya, Fakultas Sastra, Universitas Indonesia.
- UNESCO. 2014. Laporan Monitoring Global Tahun 2011. <http://ikasp.wordpress.com/2012/12/28/faktor-faktor-penyebab-rendahnya-kualitas-pendidikan-di-indonesia/> Daiakses 18.12.2014.
- Yulaelawati, Ella. 2004. Kurikulum dan Pembelajaran: Filosofi, teori, dan Aplikasi.

Perbandingan Kurikulum Pendidikan Sejarah di Rusia dan Indonesia

Oleh: Jumardi

Pendidikan Sejarah PPS UNJ

Abstract

Learning of history very real associated with human life itself. Learning the history of studying the human role in the nation's history and history itself. Learning curriculum history becomes important in studying the role of every human being. This should be reviewed when learning materials and learning outcomes are not proportional. The educational system of a country determines how a curriculum is applied to all subjects. Comparing a learning curriculum Indonesian history becomes necessary to obtain a picture of how the teaching of history in Indonesia and the Russian State history teaching curriculum. Models of teaching history in Indonesia using the spiral model (repetition) while Russia using linear models. Learners and citizens of Russia have the pride of the history of his country.

Key words: *Learning of history, education system and curriculum teaching of history*

Abstrak

Pembelajaran sejarah sangat nyata berhubungan dengan kehidupan manusia itu sendiri. Pembelajaran sejarah mempelajari peran manusia dalam sejarah bangsa dan sejarah dirinya. Kurikulum pembelajaran sejarah menjadi hal penting dalam mempelajari peran setiap manusia. Hal ini patut ditinjau manakala materi pembelajaran dan hasil pembelajaran tidak berbanding lurus. Sistem pendidikan suatu Negara menentukan bagaimana sebuah kurikulum diterapkan terhadap semua mata pelajaran. Membandingkan suatu kurikulum pembelajaran sejarah Indonesia menjadi hal perlu untuk memperoleh gambaran bagaimana pembelajaran sejarah di Indonesia dan Kurikulum pembelajaran sejarah Negara Rusia. Model pembelajaran sejarah di Indonesia menggunakan model spiral (pengulangan) sedangkan Rusia menggunakan model linier. Peserta didik maupun warga Negara Rusia memiliki kebanggaan akan sejarah negaranya.

Kata Kunci: *sistem pendidikan dan kurikulum pembelajaran sejarah*

PENDAHULUAN

Kesadaran manusia akan sejarah menjadi hal yang perlu dibangun demi menjaga eksistensi pribadi, masyarakat ataupun bangsa. Kesadaran tersebut dapat tumbuh dan berkembang melalui pendidikan. Pengalaman suatu bangsa akan terus menjadi nilai atau karakter suatu bangsa bila tujuan mempelajari sejarah bukan hanya dibangun untuk memperoleh nilai saja tetapi juga bertujuan untuk menguatkan karakter

setiap pribadi peserta didik melalui karakter bangsa. (Muhd. Yusuf Ibrahim, Jebat, 1994) Pendidikan pada suatu bangsa menjadi alat ukur apakah negara tersebut dianggap maju, berkembang atau terbelakang. Penentu keberhasilan suatu sistem pendidikan sangat tergantung bagaimana kurikulum yang disusun, bagaimana proses pelaksanaannya dan bagaimana hasil dari pendidikan tersebut. Kurikulum merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan pendidikan, dan

sekaligus digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses pembelajaran pada setiap satuan pendidikan. (Hamid S Hasan, 2012)

Kurikulum menjadi dasar dan cermin falsafah pandangan hidup suatu bangsa, akan diarahkan kemana dan bagaimana bentuk kehidupan suatu bangsa. Kurikulum haruslah dinamis dan terus berkembang untuk menyesuaikan berbagai perkembangan yang terjadi pada masyarakat, tidak terkecuali Negara Rusia ataupun Indonesia. Urgensi inilah yang menjadi dasar untuk menyusun makalah deskripsi perbandingan kurikulum Negara Rusia dan Indonesia, khususnya kurikulum yang berkaitan dengan pembelajaran sejarah di tingkat sekolah dasar dan menengah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil singkat Negara Rusia

Federasi Rusia adalah negara multinasional di Eropa Timur dan Asia Utara, membentang dari Laut Baltik ke Samudra Pasifik dan dari Samudra Arktik ke perbatasan Cina. Didirikan sebagai sebuah negara yang merdeka pada tahun 1991 setelah pecahnya Uni Soviet, itu adalah negara terbesar di dunia dengan wilayah 6.592.844 mil persegi (17.075.400 km²). Hal ini dibagi menjadi 21 republik otonom, 49 oblast, dan 6 Krays. Populasi terdiri dari hampir 120 negara dan kelompok etnis: 81,5 persen Rusia, 3,8 persen Tartar 3 persen Ukraina, 1,2 persen Chuvashes, 0,9 persen Bashkirs, 0,8 persen Belarusians, 0,7 persen Moldavia, dan 8,1 persen lain. Moskow adalah ibukota dan kota terbesar. Wilayah Rusia awalnya dihuni oleh suku-suku Slavia, yang mulai bermigrasi dari Barat pada abad kelima. (Selayang Pandang Vladivostok, 2012)

Sistem pendidikan di Rusia

Sistem pendidikan Federasi Rusia telah mengalami perubahan yang signifikan sejak pembubaran Uni Soviet pada tahun 1991. Selama masa Uni Soviet, pendidikan sangat sentralistik dan ideologi negara merupakan komponen utama dari kurikulum nasional. Reformasi pendidikan telah berkonsentrasi pada tahun 1990 menghilangkan ideologi politik, sehingga proses belajar lebih selaras dengan kebutuhan ekonomi yang digerakkan oleh pasar. Pada tahun 1992 agenda reformasi struktural dan filosofis ditetapkan dalam Undang-Undang Pendidikan.

Upaya reformasi pendidikan disusun dalam dokumen yang diakui pemerintah berjudul " *Concept of the Modernization of the Russian Education for the Period until 2010* ". Dokumen ini memberikan kerangka untuk semua inovasi, percobaan dan reformasi pendidikan. Salah satu tujuan yang paling penting telah mengembangkan standar negara untuk pendidikan dasar dan menengah, termasuk pedoman federal pada persyaratan kurikulum minimal.

Wajib belajar di Federasi Rusia dimulai untuk semua anak pada usia enam atau tujuh dan berlangsung total sembilan tahun. Sebelum tahun 1984, sekolah dimulai pada usia tujuh dan durasi periode wajib belajar 10 tahun. Setiap orang tua bebas untuk memilih apakah ingin anak mereka untuk memasuki sistem pendidikan pada usia enam atau tujuh. Bagian utama dari tahap wajib pendidikan berlangsung empat tahun.

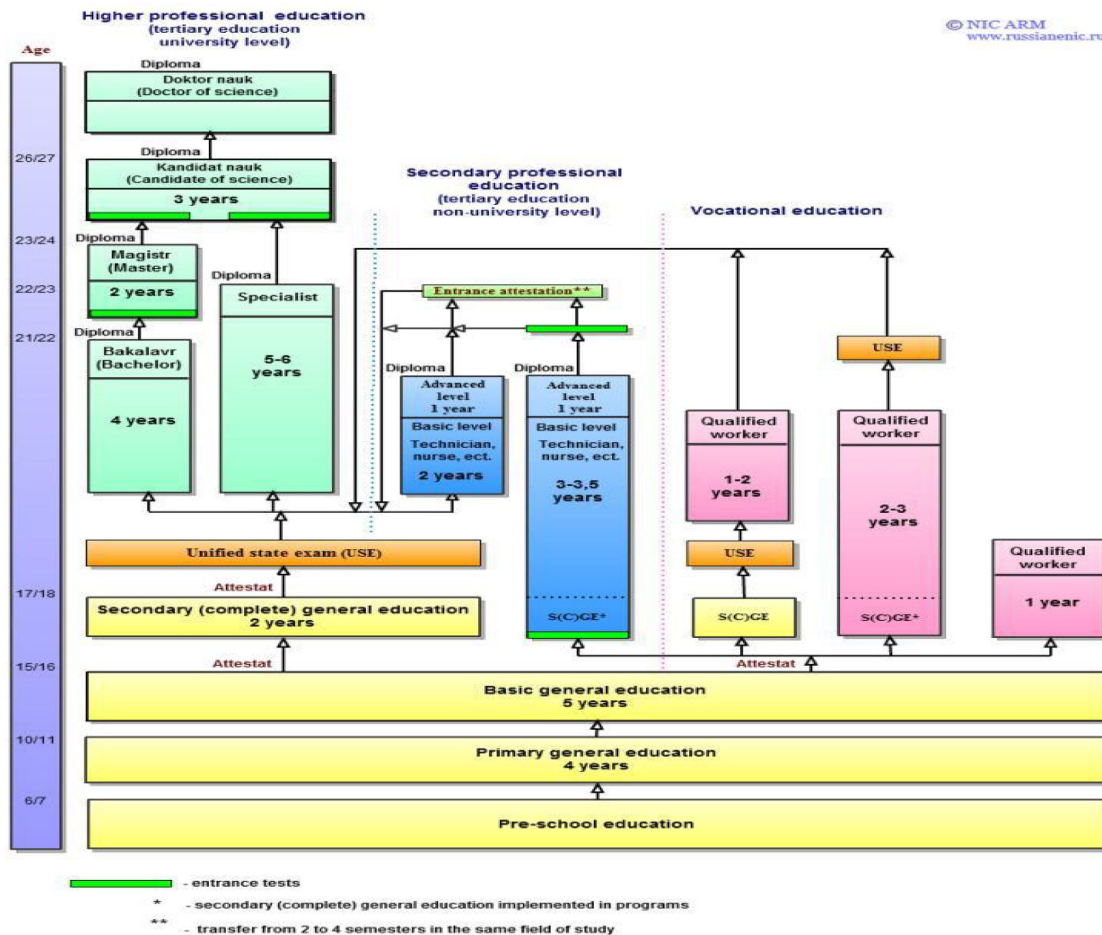
Pendidikan menengah dibagi menjadi dua terdiri dari pendidikan menengah bawah dan pendidikan menengah atas sekunder yaitu sekolah menengah atau pendidikan umum tidak lengkap.

Kurikulum pendidikan umum ditetapkan 34 minggu belajar per tahun dan 27 - 38 jam per minggu. Tahun ajaran dimulai pada awal September dan berlangsung sampai awal Juni. Ujian sekolah umumnya dijadwalkan pada bulan Juni. Dari tingkat lima, mata pelajaran sekolah diajarkan oleh guru spesialis.

Pendidikan umum SMP (tingkat 5 - 9), siswa dapat memilih sekolah 9 tahun atau sebelas tahun penuh. Siswa memasuki sekolah menengah pada usia 11 atau 12 dan umumnya menyelesaikan pada usia 15 atau 16. Kurikulum di tingkat menengah diatur dalam kelas subjek (beberapa wajib dan beberapa elektif). Siswa menyelesaikan sekolah menengah mengambil ujian akhir (negara pengesahan akhir), berhasil menyelesaikan yang

mengarah ke penghargaan dari *Attestat ob Osnovnom Obshchem Obrazovanii* (Certificate of Secondary Education lengkap). Sertifikat memberikan akses pemegangnya untuk studi lebih lanjut baik sekunder (lengkap) yaitu pendidikan umum atau kejuruan, serta tingkat non - universitas atau pendidikan tinggi .

Pendidikan menengah atas dibagi menjadi dua; akademik dan kejuruan/teknis. Untuk akademik, siswa harus menyelesaikan studi pendidikan sekunder selama dua tahun (tingkat 10-11). Mereka menerima minimal 31 jam pelajaran setiap minggu, setelah menyelesaikan studi pendidikan sekunder, siswa harus diuji untuk mendapatkan penghargaan syarat masuk jenjang akademis.



Kurikulum sejarah Negara Federasi Rusia menetapkan standar sebagai satu set persyaratan wajib dalam pelaksanaan program pendidikan yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan dan standar tersebut terakreditasi negara. Standar ini didasarkan pada Konstitusi Federasi Rusia serta Konvensi PBB tentang Hak Anak dengan memperhitungkan kebutuhan regional, nasional dan etno-budaya dari masyarakat Federasi Rusia. Standar ini bertujuan untuk memberikan pembentukan identitas sipil siswa

Dasar metodologis dari standar adalah pendekatan sistem aktivitas, yang menyediakan; menyiapkan siswa untuk pengembangan diri untuk pendidikan berkelanjutan, pembelajaran aktif dan aktivitas kognitif siswa. Standar disusun untuk:

- Memantau internal kualitas pendidikan di lembaga pendidikan;
- Kegiatan belajar mengajar;
- Sertifikasi guru dan staf administrasi negara dan kota lembaga pendidikan;
- Memberikan pelatihan, pelatihan ulang dan pengembangan profesional pendidik;

Selain itu standar yang disusun juga mempunyai tujuan untuk :

- Pengembangan karakteristik pribadi lulusan (potret lulusan sekolah);
- Mencintai tanah mereka dan tanah air mereka, menghormati orang-orangnya, budaya dan tradisi spiritual;
- Memahami dan menerima nilai-nilai tradisional keluarga, masyarakat sipil Rusia, rakyat Rusia multinasional;
- Kreatif dan berpikir kritis, aktif memahami dunia, untuk mewujudkan nilai pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- Memiliki dasar metode ilmiah untuk belajar tentang dunia;

- Kreativitas dan inovasi termotivasi ;
- Siap untuk bekerja sama, dapat melakukan pengajaran dan penelitian, desain dan informasi - kognitif;
- menyadari diri sebagai individu dan sosial , menghormati hukum dan ketertiban, menyadari tanggung jawab terhadap keluarga, masyarakat, negara, umat manusia ;
- Menghormati pendapat orang lain, mampu terlibat dalam dialog konstruktif untuk mencapai saling pengertian;
- Sengaja melakukan dan mempromosikan aturan gaya hidup sehat, aman dan ramah lingkungan;
- Dipersiapkan untuk pilihan sadar profesi, memahami nilai kerja profesional untuk individu dan masyarakat;
- Termotivasi untuk pendidikan dan (self – education) sepanjang hidup mereka

Hasil peserta didik dalam proses pembelajaran harus mencerminkan :

- Identitas sipil Rusia, patriotisme, menghormati rakyatnya, rasa tanggung jawab terhadap Tanah Air dan kebanggaan bagi tanah mereka, tanah air mereka, dulu dan sekarang, orang-orang multinasional Rusia, menghormati simbol negara (bendera, lagu kebangsaan) ;
- Aktif sebagai warganegara dan bertanggung jawab bagi masyarakat Rusia, sadar akan hak dan kewajiban konstitusionalnya, menghormati hukum dan aturan hukum, dengan rasa harga diri, sadar menerima nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi nasional dan universal tradisional ;
- Membela tanah air;
- Pembentukan ideologi, sesuai dengan

tingkat modern ilmu pengetahuan dan praktik sosial, berdasarkan dialog budaya, serta berbagai bentuk kesadaran sosial, kesadaran tempatnya di dunia multikultural ;

- Pembentukan dasar pengembangan diri dan self - education sesuai dengan nilai-nilai universal dan cita-cita masyarakat sipil ;
- Mau dan mampu untuk mandiri, kreatif dan bertanggung jawab ;
- Memiliki kesadaran toleran dan perilaku dalam dunia multikultural , kemauan dan kemampuan untuk terlibat dalam dialog dengan orang lain, untuk mencapai saling pengertian di dalamnya , untuk menemukan tujuan bersama dan bekerja sama untuk mencapai mereka ;

Tujuan Kurikulum sejarah di sekolah Rusia dijelaskan sebagai berikut :

Pelajaran Sejarah (tingkat dasar):
pembentukan siswa yang mencerminkan :

- Pembentukan konsep sejarah modern, spesifik dengan metode pengetahuan sejarah dan perannya dalam memecahkan masalah pembangunan progresif Rusia dalam dunia global;
- Memiliki pengetahuan yang kompleks tentang sejarah Rusia dan kemanusiaan secara keseluruhan, konsep umum dan khususnya di dunia proses sejarah ;
- Pembentukan kemampuan untuk

menerapkan pengetahuan sejarah dalam kegiatan profesional dan sosial , komunikasi multikultural ;

- Memiliki keterampilan kegiatan proyek dan rekonstruksi sejarah, yang melibatkan berbagai sumber
- Pembentukan keterampilan untuk terlibat dalam dialog, untuk membenarkan sudut pandang mereka dalam perdebatan tentang topik sejarah.

Pelajaran sejarah (tingkat lanjutan) :

- Membangun pemahaman tentang perjalanan sejarah harus mencakup persyaratan untuk pengembangan belajar dasar dan lanjutan yang mencerminkan :
- Pembentukan pengetahuan tentang tempat dan peran sejarah dalam disiplin ilmu, konsep historiografi ;
- Memiliki pengetahuan sejarah sistemik, pemahaman tentang tempat dan peran Rusia dalam sejarah dunia ;
- Memiliki teknik bekerja dengan sumber-sumber sejarah , kemampuan untuk mandiri menganalisis dasar bukti mengenai topik sejarah
- Pembentukan keterampilan untuk mengevaluasi berbagai versi sejarah.

Basic study plan for primary general education (years 1-4)

Basic study plan for primary general education (years 1-4) Content of education	HOURS PER WEEK FOR EACH YEAR				
	4-YEAR PRIMARY SCHOOL				
		I	II	IV	TOTAL
Russian language and literature					34
Foreign languages					6
Mathematics					16
Environmental Studies					8
Technology					6
Fine arts and music					8
Sport					8
Total	0	2	2	2	86

** Maximum hours of study per week*

Basic study plan for basic general education (years 5-9) Content of education	HOURS PER WEEK FOR EACH YEAR					
	4-YEAR PRIMARY SCHOOL					
		I	II	IVIII	IX	TOTAL
Russian	210	210	140	105	70	735
Russian literature	70	70	70	70	105	385
Foreign languages	105	105	105	105	105	525
Mathematics	175	175	175	175	175	875
Computer science	35				70	105
History	0	0	0	70	70	350
Social science (eco-nomics and law)	35	35	35	35	140	
Geography	35	70	70	70	245	
Nature studies	70				140	70
Physics		0	70	70	210	
Chemistry	70				70	140
Biology	35		0	70	70	245
Fine arts and music	70	70	70	35	35	280
Technology	70	70	70	35	245	
Civics				35	35	
Physical education	70	70	70	70	70	350
Total	910	945	1015	1050	1015	4935

Basic study plan for basic general education (years 5-9) Content of education	HOURS PER WEEK FOR EACH YEAR					
	4-YEAR PRIMARY SCHOOL					
		I	II	IVIII	IX	TOTAL
Variation, subjects set by school, re-gion (6-day study week)	175	175	175	175	210	910
Max. hours of study	1085	1120	1190	1225	1225	5845

Basic study plan for secondary complete general education – profile education (years 10-11) Subjects	Compulsory and elective subjects (2 years of study)	
	Basic Level	Profile
Russian language	70*	210
Russian literature	210*	350
Foreign languages	210*	420
Mathematics	280*	420
History	140*	280
Sport	140*	280
Social science	70*	210
Economics	35*	140
Law	35*	140
Geography	70	210
Physics	140*	350
Chemistry	70*	210
Biology	70	210
Computer science	70	280
Art	70	210
Technology	70	280
Civics	35	140
Total:	Max. 2100	
Subjects set by region	140	
Subjects set by school	Min. 280	
Total	Up to 2520	

* Non-variable part (compulsory subjects)

Materi sejarah meliputi :

Bahasan Sejarah tingkat 5 (Vigasin A.A dll)

- Dari mana kita tahu tentang kehidupan leluhur kita
- Kehidupan orang primordial
- Bab 1 Pengumpul dan pemburu primordial
- Bab 2 Petani dan peternak primordial
- Bab 3 Periodisasi sejarah
- Bab 4 Mesir kuno
- Bab 5 Asia Barat pada masa kuno
- Bab 6 India dan Tionghoa pada masa kuno
- Bab 7 Yunani Kuno
- Bab 8 Polis Yunani dan perlawanannya terhadap invasi Persia
- Bab 9 Pengangkatan Afin pada abad ke-5 sebelum Masehi dan kebangkitan demokrasi
- Bab 10 Makedonia sebagai penakluk pada abad ke-4 sebelum Masehi
- Bab 11 Roma: dari berdirinya sampai menaklukkan Italia
- Bab 12 Roma - negara terkuat di dunia mediterranean (antara negara laut tengah
- Bab 13 Perang sipil di Roma
- Bab 14 Roma pada awal masa Masehi
- Bab 15 Orang Teuton mengalahkan Rome dan kejatuhan kekaisaran Roma Barat

Bahasan Sejarah Tingkat 6, Sejarah Rusia dari masa kuno sampai akhir abad ke-16. Tingkat 6. Danilov A.A., Kosulina L.G

Bahasan Sejarah Tingkat 7, Sejarah Rusia. Akhir abad ke-16 sampai abad ke-18. Tingkat 7. Danilov A.A., Kosulina L.G

Bahasan Sejarah Tingkat 8, Sejarah Rusia, abad ke-19. Tingkat 8. Danilov A.A., Kosulina L.G

Bahasan Sejarah Tingkat 9, Sejarah Rusia. abad ke-20 sampai awal abad ke-21. Tingkat 9. Danilov A.A., Kosulina L.G dll

Bahasan Sejarah Tingkat 10, Sejarah. Rusia dan dunia. Masa Kuno. Middle Ages. Early modern period. Tingkat 10. Danilov A.A. Kosulina L.G. dll

Bahasan Sejarah Tingkat 11, Sejarah. Rusia dan dunia pada abad ke-20 sampai awal abad ke-21. Tingkat 11. Aleksashkina L.N. Danilov A.A. dll (Polina Shaposhnikova, 2014, wawancara)

Secara umum, tujuan pembelajaran di Rusia tidaklah begitu berbeda dengan di Indonesia. Namun demikian, Bila ditinjau dari mata pelajaran dan pokok bahasan sejarah, kurikulum sejarah di Negara Rusia jelas berbeda dengan di Negara Indonesia. Pada satuan pendidikan dasar (tingkat 1 – 4) istilah mata pelajaran sejarah memang tidak berdiri sendiri. Russian language and literature, adalah mata pelajaran yang memberikan ruang bagi siswa untuk memahami bagaimana sejarah keluarga, bagaimana bahasa Ibu serta bagaimana menjadi orang yang cinta negaranya. Pada primary general education mempunyai dampak positif bagi siswa, yaitu masa emas siswa untuk berpikir tidak tertahan hanya untuk menyelesaikan studi di pendidikan dasar. Tidak terbuka peluang bagi anak-anak di Rusia mengikuti kelas akselerasi hanya untuk cepat selesai studi di pendidikan dasar.

Basic study plan for basic general education (years 5-9), sejarah sudah diberikan dengan penamaan berdiri sendiri (history) yang diberikan masing-masing 70 Jam per minggu untuk setiap tahun. Ini berlaku sejak siswa masuk tingkat 5 sampai dengan 9. Berkenaan dengan content atau pokok bahasan sejarah, tingkat 5 sampai dengan tingkat 9 tidak mengalami pengulangan (seperti tersebut diatas). Penguasaan terhadap materi sejarah akan di ujikan diakhir tingkat 9.

Pelatihan lebih lanjut untuk guru sejarah adalah salah satu kunci di bidang pembelajaran sejarah di sekolah menengah. Hal ini terkait dengan fakta bahwa perubahan yang terjadi dalam pendidikan membuka substansial kesempatan untuk kreativitas dan kemandirian pada bagian dari guru namun, pada saat yang sama, menempatkan tanggung jawab yang berat pada mereka untuk hasil yang dicapai. Pelatihan yang efektif dan dukungan untuk guru semakin diperlukan; situasi sosial - budaya dan politik baru di mana yang modern pendidikan berkembang membuat tuntutan yang kompleks pada kegiatan profesional guru dan menimbulkan semakin rumit dan sulit keadaan. Untuk mengatasi ini, guru perlu dorongan dan dukungan, yang paling efektif jika disediakan dalam hal suplemen untuk pelatihan guru dasar dan pelatihan lebih lanjut.

Studi sejarah dan pengajaran sejarah di sekolah-sekolah menanggung penuh beban kedua pengaruh sosial dan reformasi. Tujuan dan tugas, nilai-nilai fundamental, konten dan teknik yang mendasari studi Sejarah semua berubah. Masalah yang timbul seiring berjalannya waktu tidak dapat diselesaikan tanpa perubahan yang sesuai pada dasar dan pelatihan guru lebih lanjut;

Guru modern sejarah tidak hanya profesional dengan pemahaman yang mendalam pengetahuan dan anak psikologi, tetapi juga orang yang dipercayakan dengan misi memanusiaikan dan harmonisasi hubungan manusia. Seorang guru sejarah harus menjadi sangat serbaguna, orang yang sensitif yang mampu membantu anak dalam / individu nya pengembangannya meningkatkan kesadaran diri dan pendirian / identitas budayanya. (*Activities for the Development and Consolidation of Democratic Stability*

(ADACS),2000,5)

Bila melihat struktur pelajaran sejarah di Indonesia, sangatlah bertolak belakang. Indonesia menganggap bahwa sejarah pada tingkat SMP merupakan bagian dari ilmu sosial, sehingga sejarah hanya diberikan ¼ jam per minggu bila asumsi yang ada untuk ilmu pengetahuan sosial adalah Geografi, Sejarah, Ekonomi dan sosiologi. Bagaimana mungkin ilmu pengetahuan sosial tersebut dapat mencapai tujuan pembelajaran, jika masing-masing ilmu tersebut mempunyai anatomi ilmunya sendiri. Wajarlah jika siswa menjadi anti sosial. Bisa kita lihat kondisi tersebut dilingkungan kita masing-masing.

Basic study plan for secondary complete general education (years 10-11). Sejarah mata tingkat 10 sampai dengan 11 ini juga berdiri sendiri dengan 140 jam dengan penekanan Non-variable part (compulsory subjects). Hal ini membuktikan bahwa bangsa Rusia benar-benar menghargai perjuangan bangsanya dan menghargai jasa pahlawannya. Selain itu sejarah di Rusia membuat andil dalam pariwisata di negaranya.

Pemandangan berbeda bila kita melihat struktur sejarah di Indonesia. Meskipun di tingkat SMA materi sejarah sudah berdiri sendiri, tapi masih juga dipecah dengan istilah sejarah peminatan dan sejarah wajib. Memang agak merisaukan karena istilah akan membawa dampak terhadap hasil. Meskipun demikian, pada kurikulum 2013, sejarah lebih diperhatikan dengan harapan dapat menguatkan karakter bangsa yang selama ini hilang.

Selain itu, materi sejarah yang diberikan pada tingkat SMA merupakan materi penggulungan dari pelajaran IPS di SMP. Suatu hal yang aneh lagi terjadi,

bagaimana mungkin bagian dari IPS diulang kembali pada mata pelajaran sejarah di tingkat SMA. Apakah salah bila ada penilaian dari siswa, kalau pelajaran sejarah kurang disukai? Apakah IPS merupakan saripati dari 4 mata pelajaran yang digabungkan?. Kalau begitu adanya, berarti IPS lebih bagus dari 4 mata pelajaran lainnya, karena merupakan saripati. Tentu masih perlu dikaji kembali bagaimana kurikulum kita disusun.

KESIMPULAN

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, Sejarah bukanlah mata pelajaran pelengkap yang pemberian materinya dapat digabung dengan mata pelajaran lain. Melalui sejarah, generasi penerus bisa mengenal, keluarga, lingkungan, bangsa dan negaranya, oleh karena itu pemberian mata pelajaran sejarah haruslah disampaikan oleh tenaga terampil dan professional dan bukan oleh tenaga lepas. Karakter bangsa Indonesia hanya sebuah isapan jempol, bila sejarah hanya menjadi konsumsi politik dan bukan menjadi acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perlu dilakukan kajian lebih lanjut tentang materi sejarah di Indonesia, agar materi sejarah yang diberikan tidak terjadi pengulangan.

Daftar Pustaka

- Activities for the Development and Consolidation of Democratic Stability (ADACS), Seminar on "New methods in teaching history in present-day secondary schools in the Russian Federation", Volgograd, Russian Federation, 19 – 21 June 2000
- Strasbourg Government of Alberta International Qualifications Assessment Service (IQAS), Russia international education guide, for the assessment og education from the former USSR and the Russian Federation, 2008, Canada
- Hasan, Hamid S. *Pendidikan Sejarah Indonesia: Isu dalam Ide dan Pembelajaran*, Bandung; Rizqi Press, 2012.
- Nichol, Jon. *From Russia with Love: A History Curriculum for the 21st Century*, Faculty of Education and Life Long Learning, University of Plymouth, Exmouth Campus, Exmouth, Devon
- Kedutaan Besar Untuk Rusia dan Belarus, Apec Russia 2012 : *Selayang Pandang Vladivostok*, 2012
- The Danish Centre for Assessment of Foreign Qualifications, *The system of education in Russia*, Norric, 2005 Copenhagen.
- Nordic Recognition Network (NORRIC). *The System of Education in Russia*, ©, Edition: The Danish Centre for Assessment of Foreign Qualifications (DK-ENIC/NARIC), 2005
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Ilmu Pengetahuan Sosial / -- Edisi Revisi* . Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan *Sejarah Indonesia : buku guru /--Edisi Revisi*. Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014.
- <http://countrystudies.us/russia/52.htm>, Russia Table of Contents U.S. Library of Congress, diunduh 20 Desember 2014 jam 14.00

Kurikulum Pendidikan Sejarah di Malaysia: Sebagai Bahan Refleksi Pengembangan Kurikulum Sejarah di Indonesia

Oleh : Nur'aeni Marta

Pendidikan Sejarah PPS UNJ

Abstract

This article reviewed the history of the educational curriculum in Malaysia. The goal is to describe the education system and educational curriculum in Malaysian history. The Malaysian government is aware that education is a strategic tool in preparing qualified human resources due to the vision or intimation 2020 as a common goal to be achieved.. In Malaysian history courses are compulsory subjects taught at the terrace which learners from grade 4 elementary school to middle school high. Education history conducted by the Malaysian centric approach. The goal is to instill a sense of nationalism, patriotism and the formation of the united Malaysian nation.

Key words: curriculum, vision 2020, main subject, Malaysiacentris

Abstrak

Artikel ini mengulas tentang kurikulum pendidikan sejarah di Malaysia. Tujuannya adalah menggambarkan sistem pendidikan dan kurikulum pendidikan sejarah di Malaysia. Pemerintah Malaysia menyadari bahwa pendidikan adalah sarana yang strategis dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga visi atau maklumat 2020 sebagai tujuan bersama akan tercapai. Di Malaysia mata pelajaran sejarah adalah mata pelajaran teras yang wajib diajarkan pada peserta didik mulai dari kelas 4 sekolah dasar sampai sekolah menengah tinggi. Pendidikan sejarah dilakukan dengan pendekatan Malaysia centris. Tujuannya adalah menanamkan rasa kebangsaan, patriotisme dan pembentukan bangsa Malaysia yang bersatu padu.

Kata Kunci: Kurikulum, matlamat 2020, mata pelajaran teras, Malaysiacentris

Pendahuluan

Perkembangan sejarah Malaysia terkait erat dengan perkembangan sejarah Indonesia, tetapi kemudian “seolah-olah” terpisah sebagai akibat dari adanya kolonisasi bangsa Barat. Walaupun demikian Malaysia dan Indonesia masih dikatakan sebagai negara satu rumpun, yang termasuk dalam satu kawasan regional, yaitu kawasan negara-negara ASEAN. Setelah PD II selesai, munculah negara-negara kebangsaan di kawasan tersebut. Indonesia merdeka tahun 1945, sementara Malaysia baru merdeka tahun

1957, jadi Indonesia lebih dulu merdeka dibandingkan Malaysia.

Namun perkembangan selanjutnya, Malaysia lebih maju dibandingkan dengan Indonesia, termasuk dalam bidang pendidikan. Pada saat ini, pendidikan di Malaysia merupakan salah satu yang diperhitungkan pada tingkat Internasional (Ahmad bin Rahim : 2014). Padahal pada tahun 1970-an, banyak rakyat Malaysia yang menimba ilmu ke Indonesia, bahkan Malaysia mendatangkan guru-guru dari Indonesia untuk mengajar di negeri Malaysia, tetapi sekarang Malaysia sudah

melesat jauh lebih maju dibandingkan Indonesia. Sementara perkembangan Indonesia, termasuk bidang pendidikan cenderung jalan di tempat.

Kemajuan dibidang pendidikan tersebut, tidaklah mudah dicapai oleh pemerintah Malaysia. Sejak merdeka dari Inggris tahun 1957, Malaysia mulai membangun negerinya disegala bidang, termasuk bidang pendidikan. Perkembangan Malaysia makin pesat, terutama sejak Malaysia dipimpin oleh Perdana Menteri Mahatir Muhamad. Pada tahun 1991 Mahatir mencanangkan visi Malaysia 2020, atau bagi rakyat Malaysia disebut matlamat 2020. Matlamat ini bertujuan menjadikan negara Malaysia sebuah negara industri yang maju. Dengan matlamat itu, semua bidang kehidupan dirancang untuk mencapai apa yang sudah digariskan termasuk bidang pendidikan, bersatu padu saling mendukung untuk mencapai matlamat tersebut.

Pembangunan bidang pendidikan ini menjadi pilar utama dalam membangun negara yang maju. Untuk itu pemerintah Malaysiasangatserius dalam memperbaiki pendidikan dan sistem pendidikan negaranya. Pemerintah beranggapan bahwa Sumber daya manusia merupakan modal utama pembangunan, oleh karena itu harus dibangun sistem pendidikan yang berkualitas, sehingga akan menghasilkan lulusan yang berkualitas pula, dengan demikian akan tersedia sumber daya manusia yang berkualitas, yang siap membangun negara Malaysia menjadi salah satu negara yang maju, dan setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Dukungan dari berbagai lapisan masyarakat malaysia untuk mencapai matlamat ini memberikan kemudahan

bagi pemerintah menjalankan program-programnya. Kondisi seperti ini yang belum tercipta di Indonesia. Pembangunan di Indonesia tidak mempunyai visi ke depan yang jelas, program-program yang dicanangkan oleh instansi-instansi pemerintah tidak mempunyai kesefahaman yang sama, bahkan tidak jarang program-programnya saling tumpang tindih dan berlawanan, sebagai contoh penerapan kurikulum 2013. Hal ini berbeda dengan di Malaysia, di Malaysia sudah ada visi bersama yaitu matlamat 2020 yang disosialisasikan pada seluruh lapisan masyarakat sehingga masyarakat memahami dan mendukungnya. Matlamat tersebut kemudian dijadikan arahan atau garis panduan pembangunan di segala bidang termasuk bidang pendidikan, yang semuanya bersatupadu mendukung untuk mencapai visi pemerintah yang sudah menjadi tujuan bersama. Dengan demikian perlu sekiranya kita mempelajari dan membandingkan sistem pendidikan khususnya pendidikan sejarah di Malaysia dengan sistem pendidikan sejarah di Indonesia. Pendidikan sejarah ini mempunyai kedudukan yang strategis dalam membangun kesadaran berbangsa dan bernegara.

Penulisan artikel ini bertujuan memberikan gambaran penerapan sistem pendidikan dan kurikulum, khususnya kurikulum pendidikan sejarah, sebagai bahan refleksi pengembangan kurikulum di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Artikel ini ditulis dengan menggunakan metode kajian pustaka. Data yang digunakan sebagai sumber penulisan berupa arsip-arsip dari kementerian pendidikan Malaysia yang diakses melalui

internet, buku mata pelajaran sejarah yang digunakan di Malaysia dan beberapa artikel yang berkaitan dengan kajian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem pendidikan

Sistem pendidikan merupakan satu kesatuan yang saling terkait dalam upaya mencapai tujuan pendidikan. Secara garis besar, konsep pendidikan memiliki dua pengertian, yaitu pengertian secara sempit dan pengertian secara luas. Pengertian secara sempit adalah usaha yang dilakukan secara terencana, terorganisir, dan dilaksanakan secara formal dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan dari pengertian tersebut sistem pendidikan meliputi komponen-komponen yang terdiri dari tujuan pendidikan, kurikulum, tenaga kependidikan, manajemen kependidikan, dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pendidikan (stakeholder). Sedangkan pendidikan dalam arti luas adalah segala tindakan yang bertujuan untuk merubah perilaku manusia menuju kearah yang lebih baik. Dengan demikian sistem pendidikan itu sendiri merupakan bagian dari sistem sosial.

Mengingat Malaysia adalah bekas jajahan Inggris, maka sistem pendidikannya sangat dipengaruhi sistem pendidikan di Inggris. Pendidikan formal Malaysia diselenggarakan oleh kementerian pelajaran Malaysia (kementerian pendidikan).

Terdapat beberapa tipe lembaga pendidikan yang ada di Malaysia diantaranya adalah tipe National School, national tipe Chines School, dan national tipe Tamil School. Sistem pendidikan di Malaysia adalah sistem

pendidikan kebangsaan. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum kebangsaan, yaitu memadukan penguasaan ilmu pengetahuan, kerohanian, kewarganegaraan, nasionalisme dan patriotisme, dan sikap dan tindakan yang terpuji (nilai sivik). Bahasa utama yang digunakan dalam proses pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah bahasa Melayu dan Inggris. Pendidikan bersifat wajib bagi anak-anak usia sekolah, yaitu antara usia 6 sampai dengan 17 tahun. Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah meliputi pendidikan Umum dan pendidikan Agama. Pendidikan umum sangat dipengaruhi oleh sistem pendidikan negeri Inggris. Sejak tahun 1982, pemerintah Malaysia menerapkan kurikulum bersepadu sekolah Menengah yang disebut KBSM menggantikan kurikulum lama sekolah menengah (KLSM) yang masih digunakan sampai sekarang dengan terus dilakukan revisi-revisi perbaikan yang disesuaikan dengan kebutuhan zaman.

Selain diselenggarakan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Pelajaran Malaysia, swasta pun diperbolehkan menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan arah visi dan misi sekolah masing-masing, tetapi harus tetap mengacu pada kurikulum kebangsaan. Menurut Ensiklopedia Malaysiana sebagaimana yang dikutip oleh Chua Kheng Hoe, sekolah swasta adalah badan atau organisasi yang dimiliki oleh pihak persendirian (bukan milik kerajaan/pemerintah). Sekolah swasta menggunakan kurikulum kebangsaan, yaitu kurikulum bersepadu sekolah menengah (KBSM) dan menggunakan bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar utama, tetapi diperbolehkan juga menggunakan bahasa lain sebagai bahasa kedua, seperti bahasa Inggris, bahasa

Mandarin, bahasa Tamil, atau bahasa Arab. Beberapa contoh sekolah Swasta antara lain, Sekolah Menengah Sri Murni, Sekolah Menengah Sri Cempaka dan Sekolah Menengah Omega. Sekolah swasta ini memadukan kurikulum kebangsaan dengan kurikulum Cambridge (Inggris). Bahasa pengantar utama yang digunakan dalam proses pendidikan adalah bahasa Melayu dan Inggris. Sekolah swasta semacam ini disebut Sekolah Menengah Swasta Inggris (SMSI).

Selain itu terdapat juga Sekolah Menengah Persendirian Cina (SMPC) yang menggunakan kurikulum persendirian dan bahasa Mandarin sebagai bahasa pengantar utamanya. Misalnya Sekolah menengah Han Chiang di Pualau Pinang, dan Sekolah Menengah Foon Yew di Johor Baru. Kebanyakan guru yang mengajar di sekolah ini adalah lulusan dari Taiwan dan sebagiannya lagi dari lulusan Institut Pendidikan Tinggi Awam (IPTA). Sekolah ini dikelola oleh warga negara Malaysia keturunan Cina. Sekolah ini menggunakan kurikulum yang disediakan oleh pihak Malaysia Independent Chinese Secondary School Working Committee (MICSSWC). Semua peserta didik di sekolah ini akan melaksanakan evaluasi yang dilakukan oleh pemeriksaan UEC yang diselenggarakan oleh pihak MICSSWC dan peperiksaan PMR serta SPM yang dikendalikan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.

Selain itu terdapat juga Sekolah Menengah Islam. Dalam sistem pembelajaran sekolah menengah Islam ini menggunakan kurikulum KBSM yang menekankan pada aspek keagamaan seperti pendidikan Qur'an dan Sunnah serta pendidikan Syariah Islamiah. Sekolah Menengah Islam ini berbeda dengan sekolah Menengah Agama yang didirikan oleh kerajaan/pemerintah. Sekolah Menengah Islam dimiliki, dibiayai

dan didirikan oleh pihak swasta, dikelola secara penuh oleh para ahli sekolah masing-masing. Guru yang mengajar dapat digolongkan menjadi dua yaitu guru berasal dari universitas yang ada di Malaysia dan guru yang berasal dari universitas agama dari luar negeri seperti Mesir, dan negara-negara Arab.

Selain itu juga terdapat sekolah swasta kaum India, menggunakan kurikulum KBSM dengan menggunakan bahasa Tamil, dan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utamanya. Dengan demikian terdapat beberapa corak sistem pendidikan yang ada di Malaysia, tetapi semuanya harus mengacu pada kurikulum bersepadu atau kurikulum kebangsaan yang berlandaskan pada Rukun Negara dan falsafah pendidikan kebangsaan.

Berdasarkan falsafah pendidikan kebangsaan, menyatakan bahwa pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berkelanjutan (berterusan) ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Pendidikan di Malaysia dilaksanakan dengan tujuan untuk menciptakan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkemampuan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonisan dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara (www.mara.gov.my/c/document_library/get_file). Tujuan pendidikan yang dirumuskan secara jelas tersebut, menjadikan arahan dan petunjuk yang mudah difahami dan dilaksanakan oleh guru-guru selaku pelaksana pendidikan di lapangan.

Pendidikan dilaksanakan secara gratis, semua anak-anak warga Malaysia dapat menikmati pendidikan secara gratis. Pendidikan rendah atau dasar (*Primary Education*) di Malaysia berlangsung 6 tahun yang wajib diikuti oleh anak usia 7-12 tahun. Wajib belajar di Malaysia dicanangkan dan dilaksanakan mulai tahun 2003. Pendidikan wajib adalah satu peraturan yang mewajibkan setiap orang tua yang mempunyai anak berumur 6 tahun mendaftarkannya di sekolah rendah. Pendaftaran siswa baru biasanya dilakukan 1 tahun sebelum masa persekolahan, jadi pada waktu anak umur 6 tahun orang tua wajib mendaftarkan sekolah anaknya. Keteledoran orang tua memasukkan anaknya mengikuti wajib belajar dianggap sebagai kesalahan menurut undang-undang. Jika hal ini terbukti dipengadilan, maka orang tua tersebut akan didenda maksima RM 5000 atau dihukum maksimal 6 tahun. Jika dibandingkan dengan di Indonesia, kondisi seperti ini belum tercipta. Di Indonesia belum ada sanksi tegas terhadap orang tua yang tidak menyekolahkan anaknya pada usia wajib belajar.

Di Malaysia, biaya pendidikan dasar yang dibebankan pada orang tua siswa hanya diminta membayar iuran sekolah pada awal tahun pelajaran baru. Besarnya iuran yang dipungut oleh pihak sekolah berkisar antara RM 50 sampai RM 75 (Rp.125.000 – 187.500) per tahun tiap siswa. Iuran tersebut dirinci untuk pembayaran asuransi, biaya ujian tengah semester, ujian semesteran, iuran khusus, biaya LKS, prakter komputer, kartu ujian, file data siswa dan raporan. Khusus untuk sumbangan PIBG (Persatuan Ibu Bapak dan Guru) hanya dipungut satu bayaran untuk satu keluarga. Keluarga yang menyekolahkan lebih dari satu anak, hanya dikenakan iuran yang sama

yaitu RM 25 per keluarga. Dan untuk siswa kelas VI (darjah 6) ditambah biaya UPSR sebesar RM 70. Selain itu tidak ada pungutan lain, termasuk pula tidak ada pungutan sumbangan dana pembangunan. Pembangunan dan renovasi gedung sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemerintah.

Buku pelajaran yang dipakai siswa relatif tidak berganti setiap tahun. Buku yang telah dibeli untuk anak sulung akan dapat dipakai terus oleh adiknya secara turun-temurun. Khusus keluarga dengan pendapatan kurang dari RM 2000 per bulan, dapat mengajukan permohonan kepada pemerintah untuk peminjaman buku teks yang disediakan dari sekolah. Mulai tahun ajaran 2008, semua siswa sekolah rendah mendapat bantuan peminjaman buku pelajaran dari bantuan pemerintah melalui sekolah masing-masing.

Struktur Kurikulum Pendidikan

Kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan, karena didalam kurikulum terdapat komponen-komponen yang mencakup tujuan pendidikan, materi pelajaran, media dan sumber belajar, serta sistem evaluasi. Kurikulum pendidikan Malaysia adalah kurikulum kebangsaan. kurikulum kebangsaan ini bertujuan untuk melahirkan murid yang seimbang, berdaya tahan, bersifat ingin tahu, berprinsip, bermaklumat, dan patriotik serta mempunyai kemahiran berfikir, berkomunikasi dan bekerja sama. Sebagai upaya untuk menghadapi abad 21, maka pendidikan berupaya mempersiapkan daya saing siswa pada tataran global sebagaimana digariskan dalam pembangunan pendidikan Malaysia, yaitu setiap siswa memiliki kemahiran

memimpin, kemahiran dwibahasa, etika dan kerohanian, identitas sosial, pengetahuan dan kemahiran berfikir (Kementerian Pendidikan Malaysia, Kurikulum Standard Sekolah Rendah : Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran, 2014)

Sejak tahun 1982 pendidikan sekolah menengah di Malaysia menggunakan kurikulum bersepadu sekolah menengah (KBSM). Kurikulum yang dikembangkan di Malaysia adalah kurikulum yang menekankan pada pembelajaran yang berpusat pada siswa (*student centric*) dan pendekatan konstruktivistik. Guru berperan sebagai fasilitator, yaitu memfasilitasi kegiatan pembelajaran bukan penyampai pengetahuan. Sumber belajar bukan hanya berasal dari guru dan buku teks, tetapi siswa didorong dapat memanfaatkan lingkungannya sebagai sumber belajar. Pendekatan konstruktivistik ini membantu siswa membangun sendiri makna pengetahuan yang diperolehnya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki siswa.

Pendidikan dimulai dari pra sekolah, sekolah dasar (rendah) dan sekolah menengah, kemudian sekolah tinggi. Pendidikan prasekolah tidak ada aturan yang tetap pada saat anak memulai pendidikan pra sekolah, secara umum anak-anak masuk pra sekolah mulai usia 3-6 tahun. Pendidikan prasekolah biasanya berlangsung selama 2 tahun, pendidikan ini dilaksanakan sebelum anak-anak masuk ke sekolah dasar. Pendidikan prasekolah terutama disediakan oleh swasta nirlaba pra sekolah. Pengajarnya adalah guru-guru yang sudah mendapat sertifikat pelatihan yang meliputi pelatihan psikologi perkembangan anak, keterampilan dan wawasan kebangsaan.

Pendidikan dasar di Malaysia dimulai pada usia 7 tahun, pendidikan sekolah dasar berlangsung selama 6 tahun, yang meliputi tahapan darjah satu sampai darjah 6 (kelas 1 sampai kelas 6). Tahun 1 sampai tahun 3 diklasifikasikan sebagai level one (tahap satu) sedangkan tahun 4 sampai tahun 6 dianggap sebagai level two (tahap dua), siswa dipromosikan ke tahun depan berdasarkan hasil kinerja akademis mereka, dengan kata lain untuk naik ke level yang lebih tinggi berdasarkan nilai akademik peserta didik. Tidak ada siswa yang tidak naik kelas, semua siswa akan secara otomatis naik ke tingkat yang lebih tinggi, pencapaian nilai akademik digunakan sebagai pemetaan siswa berdasarkan bakat, minat siswa. Dengan demikian sistem pendidikan di Malaysia lebih menekankan pada penilaian proses, bukan pada hasil.

Malaysia menerapkan pendidikan rendah/dasar selama enam tahun, kemudian dilanjutkan pendidikan menengah selama lima tahun. Pendidikan menengah ini terbagi menjadi dua, yaitu pendidikan menengah rendah dilaksanakan selama 3 tahun, dimulai dari tingkatan I sampai tingkatan III, setelah itu siswa melanjutkan ke jenjang selanjutnya yaitu sekolah menengah tinggi. Pada tingkatan ini siswa menempuh pendidikan selama 2 tahun, yang terdiri dari tingkatan 4 dan 5. Dengan demikian pengelolaan sekolah menengah rendah dan sekolah menengah tinggi menjadi satu kesatuan manajemen, siswa dididik dalam lingkungan yang sama, sehingga guru dapat memantau proses perkembangan anak baik secara psikologis maupun perkembangan intelektual.

Selain itu di Malaysia, pada tingkat Sekolah Menengah mewajibkan setiap siswa mengikuti aktivitas Ko-kurikuler.

Di dalam kegiatan ko-kurikuler tersebut, semua siswa harus mengambil atau menentukan pilihan sedikitnya 2 aktivitas ko-kurikuler. Ada banyak aktivitas ko-kurikuler yang ditawarkan di sekolah menengah. Aktivitas ko-kurikuler sering digolongkan menjadi beberapa sebutan, antara lain sebagai berikut: Kelompok Umum (*Uniformed Groups*), penampil Seni (*Performing Arts*), Klub dan Kemasyarakatan (*Clubs & Societies*), Olah Raga dan Permainan (*Sports & games*). Siswa boleh juga mengikuti kegiatan lebih dari 2 aktivitas ko-kurikuler.

Dewasa ini kemajuan sekolah di Malaysia tidak hanya dimiliki sekolah-sekolah negeri tetapi juga sekolah-sekolah swasta mengalami pertumbuhan pesat. Sekolah swasta pertama yang diakui kementerian pendidikan Malaysia untuk menjalankan kurikulum nasional ditetapkan awal tahun 1980. Saat ini sekolah swasta mengalami perkembangan yang pesat dan menawarkan beragam pilihan. Ada sekolah dasar dan menengah swasta yang menggunakan kurikulum nasional, ada pula yang menggunakan kurikulum Internasional, seperti kurikulum Amerika dan Inggris. Juga ada sekolah Cina mandiri khususnya sekolah menengah, menggunakan kurikulum sesuai dengan yang digariskan Kementerian Pendidikan.

Selain itu di Malaysia terdapat sekolah yang menerapkan sistem berasrama (*Residential Schools*). Sekolah berasrama ini sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah. Sekolah-sekolah ini menerima siswa dengan terlebih dahulu melalui seleksi ketat. Calon siswa diminta menunjukkan prestasi akademik dan potensi mereka sejak mereka belajar di sekolah rendah kelas 1 sampai 6. Para siswa di sekolah ini dididik selama 24 jam di dalam asrama.

Sekolah berasrama yang ada di Malaysia diantaranya adalah *Malacca High School*, *Royal Military College*, dan *Penang Free School*. Residential School atau sekolah berasrama penuh juga dikenal sebagai sekolah-sekolah Sains (*Science School*). Sekolah-sekolah ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan calon-calon elit Malaysia, tetapi kemudian diperluas sebagai sekolah untuk menjaga Malaysia dengan cara menerima siswa dengan kemampuan akademik dan bakat-bakat olahraga serta kepemimpinan yang menonjol. Sekolah tersebut dijadikan sebagai model sekolah asrama di Inggris yang disebut *British Boarding School*.

Sedangkan untuk Pendidikan Tinggi, umumnya dikelola oleh pemerintah dan swasta. Pendidikan tinggi menawarkan berbagai macam program sertifikat, diploma, sarjana, dan pascasarjana. Lembaga Pendidikan Tinggi Negeri diselenggarakan oleh pemerintah, seperti Universitas, Perguruan Tinggi Negeri, Politeknik, dan Lembaga Pelatihan Guru. Sedangkan Lembaga Pendidikan Tinggi Swasta diselenggarakan oleh swasta, dan cabang universitas luar negeri. Pada tahun 2014 jumlah perguruan tinggi swasta di Malaysia lebih dari 400 buah.

Beberapa nama universitas di Malaysia antara lain: Universiti Tun Hussein, Universiti Utara Malaysia, Universiti Malaysia Kelantan, Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, Universiti Malaya, Universiti Teknikal Malaysia Malaya, dsb.

3. Pendidikan Sejarah Dalam Struktur Kurikulum

Sejak merdeka dari Inggris, pemerintah Malaysia melakukan

perubahan-perubahan pada sistem pendidikan, termasuk pendidikan sejarah yang dianggap masih dipengaruhi oleh pemikiran Barat (Inggris), diubah dengan menggunakan persepektif pendekatan *malaysian centric*. Desakan agar kurikulum sejarah dibuat berdasarkan perspektif Malaysia (*malaysia centris*) sudah ada sejak tahun 1950, tetapi baru tahun 1960 Kementerian Pelajaran Malaysia berhasil menyusun sukatan pelajaran sejarah Darjah 4 hingga tingkatan 3 (sekolah dasar kelas 4 sampai kelas 9 atau SMP kelas 3), dan baru tahun 1967 kurikulum sejarah diajarkan menggunakan sukatan pelajaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Pendidikan sejarah di Malaysia ditekankan pada tiga aspek penting yaitu kesepaduan elemen ilmu, kemahiran dan penerapan nilai-nilai patriotisme. Pada tahun 1989, pemerintah memberlakukan kurikulum KBSM, yang meletakkan kedudukan pendidikan sejarah sebagai mata pelajaran teras yang wajib diajarkan pada seluruh siswa sebagai peserta didik.

Pendidikan sejarah diajarkan secara terpisah dengan ilmu sosial, dimulai sejak kelas 4 sekolah dasar (darjah 4). Berdasarkan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) sejarah merupakan mata pelajaran teras yang wajib dipelajari oleh semua murid. Matlamat Kurikulum standard sejarah sekolah rendah membolehkan murid memahami tingkah laku manusia, sebab dan akibat, keunikan sejarah tanah air dan kegemilangan negara bagi melahirkan warganegara yang patriotik dan menjunjung amalan demokrasi di Malaysia. Sementara kurikulum standard sejarah sekolah rendah membolehkan murid; memahami peristiwa masa lalu melalui sikap ingin tahu, mengenal pasti pelbagai sumber dan matlamat sejarah, memahami idea, konsep

serta elemen sebab dan akibat dalam sejarah, menyatakan kepentingan sejarah dalam kehidupan dengan mengambil ikhtibar daripada peristiwa sejarah sebagai usaha untuk mengukuhkan suasana keharmonisan, menyatakan pelbagai bentuk persembahan dan hasil interpretasi kajian sejarah, menilai warisan negara dalam konteks kawasan setempat, negara dan global, memahami proses pembinaan tamadun manusia yang mempengaruhi kehidupan masyarakat, menjelaskan kehidupan dan kebudayaan masa lalu dan masa kini masyarakat di Malaysia, memahami kedudukan kaum dalam konteks lokasi dan pembentukan kaum sebagai pengukuhan kepada persefahaman kaum, memahami cabaran negara dalam konteks mempertahankan kedaulatan negara bagi pembinaan jatidiri, mengenal pasti usaha dan sumbangan para pemimpin negara sebagai melahirkan perasaan bangga dan hormat, menilai pencapaian dan kemajuan negara dalam bidang politik, ekonomi dan sosial. (Kementerian Pendidikan Malaysia : 2014)

Penyusunan kurikulum standar sekolah rendah dan menengah mata pelajaran sejarah melibatkan pelbagai pihak antara lain, ahli sejarah dari universiti, ahli sejarah dari Institut Pendidikan Guru, pegawai Jabatan Pelajaran Negeri, Pegawai Pejabat Pelajaran Daerah, guru, serta Pegawai Kementerian Pelajaran Malaysia dan individu yang terlibat secara langsung maupun secara tidak langsung.

Kurikulum standar sekolah rendah mata pelajaran sejarah mendukung cita-cita murni bagi menyediakan kurikulum yang relevan dan terkini untuk melahirkan generasi cemerlang selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Kurikulum standar Sekolah Rendah mata pelajaran sejarah memberi penekanan kepada

domain kognitif, efektif dan psikomotor, serta menerapkan nilai tambah seperti kemahiran berfikir, kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi, kemahiran pelbagai kecerdasan, kajian masa depan dan pembelajaran sepanjang hayat. Kurikulum ini juga memberikan penekanan kepada penerapan nilai murni, semangat patriotik, elemen kewarganegaraan dan nilai sivik (nilai kebaikan).

Sejak tahun 1992 pendidikan sejarah menjadi mata pelajaran wajib bagi sekolah menengah mulai dari tingkatan I sampai tingkatan V. Kurikulum sejarah di peringkat sekolah menengah Rendah (SMR) mempunyai kesinambungan dengan kurikulum sejarah diperingkat Sekolah Menengah Tinggi (SMA). Dengan kata lain materi mata pelajaran sejarah diajarkan secara garis lurus tidak terjadi pengulangan materi (time line). Pada tahun 2003 mata pelajaran sejarah menjadi persyaratan masuk ke Perguruan Tinggi. Pendidikan sejarah di Malaysia dianggap mempunyai kedudukan yang penting dalam membangun identitas suatu bangsa dan menanamkan rasa nasionalisme dan patriotisme.

Pada tahun 2002, Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Tingkatan Empat dimaksudkan untuk menyediakan pendidikan yang relevan dan terkini untuk melahirkan generasi yang cemerlang. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Tingkatan Empat ini disusun berasaskan Sukatan Pelajaran dan Falsafah Pendidikan Negara. Tujuan yang lain adalah untuk menyediakan pelajar menghadapi tantangan masa depan, perkembangan dunia teknologi dan komunikasi (ICT) serta ekonomi berasaskan pengetahuan pada abad ke-21.

Landasan Filosofis Kurikulum Pendidikan Sejarah

Ada beberapa landasan teori yang mendasari penyusunan kurikulum, yaitu essensialisme, perenialisme, humanisme dan rekonstruksi sosial. Ditinjau dari struktur kurikulum pendidikan sejarah di Malaysia, dimana mata pelajaran sejarah mempunyai kedudukan yang penting yaitu membangun identitas bangsa, dan membangkitkan patriotisme. Berdasarkan kurikulum standard sekolah rendah, filosofi pendidikan sejarah lebih menekankan pada perenialisme, yaitu menanamkan rasa bangga terhadap masa kejayaan di masa lalu. Sedangkan kurikulum sekolah menengah lebih menekankan pada filosofi rekonstruksi sosial. Seperti diketahui bahwa kondisi masyarakat Malaysia adalah multi etnik, oleh karenanya kurikulum pendidikan sejarah menekankan pada penyatuan warga negara Malaysia menjadi satu bangsa yaitu bangsa Malaysia. Dengan demikian kurikulum pendidikan sejarah lebih ditekankan untuk menjawab kebutuhan masa kini dan menata masa depan, oleh karenanya filosofi yang melandasinya adalah rekonstruksi sosial. Namun demikian aspek filosofi perenialisme juga dijadikan pertimbangan dalam membuat kurikulum pendidikan sejarah. Pendidikan sejarah ditujukan untuk menanamkan rasa bangga terhadap masa kegemilangan dan kejayaan bangsa Melayu memegang tambuk pemerintahan sebelum kedatangan bangsa Barat.

Saat ini, mulai ada usaha-usaha pemikiran perbaikan kurikulum pendidikan sejarah yang lebih menekankan pada penyatuan pluralisme etnik yang ada di Malaysia menjadi satu kesatuan yaitu bangsa Malaysia. Perbedaan etnik di Malaysia menjadi masalah yang cukup

kompleks dihadapi oleh pemerintah Malaysia, karena perbedaan-perbedaan etnik, budaya dan agama yang pada masa kolonial Inggris tetap dipertahankan, bahkan dalam bidang pendidikan pun masing-masing diberikan kebebasan sesuai dengan visi misinya.

Beberapa lembaga pendidikan yang berkembang pada masa kolonial Inggris secara garis besar terdapat sekolah yang didirikan oleh kaum Melayu, Cina, India dan Kolonial Inggris. Pendidikan yang dikembangkan oleh kaum Melayu menggunakan bahasa Melayu sebagai pengantarnya, kaum Cina pun mendirikan lembaga pendidikan dengan menggunakan bahasa Mandarin sebagai bahasa pengantarnya, begitupun kaum India mendirikan lembaga pendidikan dengan menggunakan bahasa Tamil sebagai bahasa pengantarnya.

Kondisi ini terus ada bahkan sampai sekarang, perbedaan-perbedaan tersebut masih sangat nampak dan mewarnai tatanan masyarakat yang ada di Malaysia. Sampai saat ini masyarakat Malaysia didominasi oleh tiga etnik besar, yaitu kaum Melayu, Cina dan India. Berdasarkan data tahun 2006 jumlah kaum Melayu mencapai 68%, kaum Cina 25 % dan kaum India 7,5 % ([http://nyong75.files.wordpress.com/2011/09/pembangunan-patriotisme-dalam-pengajaran -dan-pembelajaran -sejarah-tingkatan-dua.pdf](http://nyong75.files.wordpress.com/2011/09/pembangunan-patriotisme-dalam-pengajaran-dan-pembelajaran-sejarah-tingkatan-dua.pdf)). Memang secara kuantitas jumlah kaum Melayu merupakan jumlah yang terbanyak dibanding etnik-etnik lainnya. Jumlah kaum Cina dan India yang masing-masing mencapai 25% dan 7,5 % bukanlah jumlah yang sedikit, peranan dan partisipasi mereka perlu diperhitungkan untuk menjadikan negara Malaysia yang maju. Oleh karena itu pendidikan sejarah diorientasikan pada penyatuan kaum

menjadi Malaysia yang bersatu padu yang dapat mendukung tercapainya matlamat 2020, yaitu menjadikan Malaysia sebagai negara industri yang maju. Rekonstruksi sosial menjadi landasan filosofi pengembangan kurikulum pendidikan sejarah yang mampu menggali makna dari peristiwa masa lampau untuk kepentingan sekarang dan masa depan .

Tujuan Kurikulum Pendidikan Sejarah

Perumusan tujuan merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah kurikulum. Tujuan kurikulum merupakan arah dan sasaran yang harus dicapai oleh setiap upaya pendidikan. Tujuan kurikulum pendidikan sejarah mengacu pada falsafah pendidikan kebangsaan.

Fokus utama kurikulum standar sejarah sekolah rendah ialah menyemai ilmu pengetahuan dan asas kemahiran pemikiran sejarah disamping penerapan semangat patriotik melalui pengetahuan tentang masa lalu yang mempengaruhi masa kini. Melalui pembelajaran sejarah murid dapat membina kerangka kronologi tentang pengetahuan sesuatu peristiwa penting dan tokoh-tokoh yang terlibat. Murid dapat membuat perbandingan tentang pengalaman manusia dan seterusnya berupaya memahami diri mereka secara individu serta sebagai ahli dalam sebuah masyarakat. Pemahaman asas tentang sejarah negara dapat melahirkan perasaan cinta terhadap negara dan melahirkan perasaan bangga sebagai rakyat Malaysia.

Materi/Substansi Kurikulum Pendidikan Sejarah

Implementasi kurikulum pendidikan sejarah dapat dilihat dari isi/ substansi materi mata pelajaran sejarah yang diberikan di sekolah. Kandungan mata pelajaran sejarah sekolah rendah

(SD) bertujuan mendidik murid untuk memahami latarbelakang negara dan sejarahnya dengan melihat perubahan yang berlaku serta kesinambungan yang masih dikekalkan terutama dalam kehidupan masyarakat di Malaysia. Mata pelajaran sejarah di tingkat sekolah dasar merupakan suatu kesinambungan ke peringkat sekolah menengah sebagai disiplin ilmu yang dinamik. Ini bertujuan sebagai satu usaha untuk melengkapkan murid dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kemahiran dan pengalaman nilai murni serta penerapan semangat jati diri sebagai warga negara Malaysia.

Materi pendidikan sejarah untuk sekolah rendah (SD) mencakup beberapa tema yaitu untuk sekolah rendah darjah 4 mempelajari tema tentang sejarah awal negara, untuk sekolah rendah darjah 5 mempelajari tema tentang kedaulatan negara, dan sekolah rendah darjah 6 mempelajari tentang kemakmuran negara (Kementerian Pendidikan Malaysia, Op.Cit). Materi diuraikan secara kronologis dari masa lampau menuju masa sekarang dan diajarkan secara garis lurus atau tidak ada pengulangan materi pelajaran.

Sementara Kandungan materi kurikulum pendidikan sejarah pada sekolah menengah untuk tingkatan 1 (SMP kelas 1) pembahasannya mencakup 11 bab, sebagaimana dijelaskan berikut ini; bab 1 membahas sejarah dan kita meliputi pengertian sejarah, ciri-ciri sejarah, sumber sejarah, kaedah pengkajian sejarah, penafsiran sejarah, kepentingan sejarah. Bab 2 membahas tentang zaman prasejarah mencakup; zaman paleolitik, zaman neolitik, zaman logam, bab 3 kerajaan awal di Asia Tenggara mencakup; kerajaan agraria, kerajaan maritim. Bab 4 membahas penggagasan Kesultanan

Melayu melaka mencakup; pembahasan mengenai Parameswara Penggagas kesultanan Melayu Melaka, asal-usul nama Melaka, kegigihan Parameswara membangun Kesultanan Melayu Melaka, bab 5 membahas kegemilangan Melaka mencakup; pentadbiran yang sistematik, pusatperdagangan, kematanganhubungan luar, pusat pengembangan agama Islam, pusat kegiatan ilmu, perluasan kuasa. Bab 6 membahas kemerosotan Melaka mencakup; kelemahan kepemimpinan, masalah perpaduan, kelemahan askar melaka, kedatangan Portugis. bab 7 membahas mengenai Johor Menegakan Semula Kewibawaan Kesultanan Melayu Melaka mencakup; penggagasan kerajaan Johor, kegemilangan kerajaan Johor, Kemerosotan kerajaan Johor.

Bab 8 membahas tentang kerajaan negeri-negeri melayu mencakup; kerajaan Melayu Tua, Kerajaan Melayu Baru. bab 9 membahas tentang warisan kesultanan melayu, bab 10 membahas tentang Sarawak, dan bab 11 membahas tentang Sabah. Selanjutan materi/kandungan mata pelajaran sejarah untuk tingkatan 2 (kelas 2 smp) mencakup pembahasan; bab 1 tentang kedudukan strategik mendorong penguasaan Britis, bab 2 kekayaan hasil bumi mendorong campur tangan Britis, bab 3 tentang negeri-negeri Melayu dan Johor Benteng Keselamatan Britis. Bab 4 tentang kekayaan Ekonomi Sarawak mendorong penjajahan keluarga Brooke. Bab 5 Kekayaan Ekonomi Sabah Menarik Minat Syarikat Borneo Utara Britis. Bab 6 tentang Britis mengeksploit Ekonomi. Bab 7 : perjuangan rakyat tempatan mengembalikan kedaulatan bangsa. Bab 8 : kebangkitan semangat kebangsaan untuk mengangkat martabat bangsa. Kandungan silabus untuk tingkatan 3 mencakup; bab 1 : pendudukan Jepun, bab 2 Malayan Union dan persekutuan Tanah

Melayu, bab 3 : ancaman parti Komunis Malaya dan Darurat. Bab 4 : kerjasama antara kaum ke arah kemerdekaan. Bab 5 : kemerdekaan Negara . bab 6 perubahan pentadbiran ke arah berkerja sendiri di Sarawak dan Sabah. Bab 7 : Malaysia yang berdaulat.

Selanjutnya untuk sekolah menengah tingkatan 4 kandungan materinya mencakup; bab 1 kemunculan tamadun awal manusia, bab 2 peningkatan Tamadun, bab 3 Tamadun Awal Asia Tenggara, bab 4 : Kemunculan tamadun Islam dan perkembangannya di Makkah, bab 5 : Kerajaan Islam di Madinah. Bab 6 ; pembentukan kerajaan Islam dan Sumbangannya. Bab 7 : Islam Asia Tenggara. Bab 8 : pembaharuan dan pengaruh Islam di Malaysia sebelum kedatangan Barat. Perkembangan di Eropah. Bab 10 dasar Britis dan kesannya terhadap ekonomi Negara. Materi pelajaran untuk tingkatan 5 mencakup; Bab1 : Kemunculan dan perkembangan Nasionalisme di Asia Tenggara. Bab 2 : Nasionalisme di Malaysia sehingga Perang Dunia kedua. Bab 3 : kesedaran Pembinaan Negara dan Bangsa. Bab 4 : Pembinaan Negara dan Bangsa Malaysia. Bab 5 : Pembinaan Negara dan Bangsa Yang Merdeka. Bab 6 : pengukuhan Negara dan Bangsa Malaysia. Bab 7: Sistem pemerintahan dan pentadbiran negara Malaysia. Bab 8 : Pembangunan dan Perpaduan Untuk Kesejahteraan. Bab 9 : Malaysia dalam kerjasama antar bangsa. Sejak tahun 1992 materi sejarah peradaban dunia dimasukkan dalam kurikulum sejarah untuk pelajar tingkatan Empat. Tujuannya untuk mengimbangi isi kandungan mata pelajaran sejarah, agar murid/siswa dapat melihat sejarah tanah air daripada kacamata budaya sendiri, budaya Barat dan budaya Timur. alasan rasionalnya adalah supaya siswa/pelajar

mempunyai wawasan pengetahuan bangsa-bangsa lain di dunia, sehingga mereka tidak menjadi 'katak di bawah tempurung' (Huraian sukatan pelajaran KBSM Sejarah Tingkatan Empat, 1992)

Ditinjau dari subtansi kandungan materi pelajaran sejarah dalam struktur kurikulum pendidikan di Malaysia mulai dari kelas 4 sekolah rendah sampai sekolah menengah disusun berdasarkan urutan kronologis, yaitu dari masa lampau menuju masa kini. Pendidikan sejarah diajarkan dari sudut pandang Melayu Centis. Tema-tema yang diajarkan lebih difokuskan pada penekanan perkembangan sejarah kaum Melayu. (hal ini hampir mirip dengan sejarah Amerika Serikat maupun sejarah Australia yang lebih menekankan pada sejarah orang kulit putih).

Dilihat dari isi/kandungan materi mata pelajaran sejarah, dapat dikatakan bahwa tidak ada konten yang membahas tentang kedatangan dan pengaruh budaya India maupun Cina ke Malaysia, atau kedatangan dan penyebaran agama Hindu Budha di Malaysia. P a d a h a l berdasarkan data kependudukan tahun 2006 jumlah penduduk Malaysia keturunan India jumlahnya cukup besar, yaitu mencapai 7,5 % dari jumlah penduduk Malaysia, mereka mayoritas menganut agama Hindu. Sementara penduduk Malaysia keturunan Cina pun tidak kalah besar jumlahnya, yaitu mencapai 25 % yang mayoritas dikalangan mereka memeluk kepercayaan Konghucu dan Budha (www.mara.gov.my/c/document_library/get_file). Sementara di Indonesia yang secara realita penduduk keturunan India maupun Cina merupakan minoritas, serta keberadaan agama Hindu Budha yang dianut oleh sebagian kecil penduduk Indonesia, tetapi dalam kurikulum pendidikan sejarah terdapat

materi sejarah yang membahas tentang kedatangan dan pengaruh Hindu Budha dan peranan orang-orang Tionghoa dari sebelum kedatangan bangsa Barat sampai peranannya pada masa pergerakan, dan perjuangan mencapai Indonesia merdeka.

Metode Pembelajaran

Pengembangan metode pembelajaran sangat bergantung pada kreativitas guru dalam merancang, mengolah dan melaksanakan pendekatan, kaedah, teknik secara terpadu dan sistematis. Orientasi pembelajaran yang berpusat pada siswa sehingga guru ditekankan merancang pengajaran dan pembelajaran yang mendorong keterlibatan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran agar tercipta suasana pembelajaran yang menyenangkan. Beberapa metode pembelajaran yang dikembangkan dalam pembelajaran sejarah antara lain metode inquiri dan metode pemecahan masalah. Metode inquiri merupakan suatu upaya mendorong siswa untuk dapat mengembangkan kemahiran berfikir dan sikap ingin tahu. Sewaktu melaksanakan inquiri, siswa akan lebih peka terhadap kondisi masyarakat dan lingkungannya.

Murid ikut berperan merancang dan menjalankan aktivitas pembelajaran. mereka melibatkan diri secara aktif untuk mencari dan mengumpulkan informasi melalui pelbagai aktivitas seperti memerhati, mendengar, bertanya, berkomunikasi, membuat rujukan, uji kaji dan kaji siasat. Aktivitas pembelajaran ini dapat dijalankan secara terpisah atau digabungkan dalam berbagai teknik pembelajaran seperti kerja projek, simulasi, karyawisata, bermain peran, dan kuiz. Dengan metode inquiri diharapkan siswa mampu memperoleh ilmu pengetahuan dan menguasai kemahiran melalui

pendekatan scientific. Pembelajaran sejarah berbasiskan inquiri meliputi lima peringkat, yaitu mengenal pasti tajuk, menentukan kaedah mencari maklumat, mengumpul maklumat, mengkaji maklumat dan membuat rumusan.

Selain metode inquiri, digunakan juga metode kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT). Metode ini sudah digunakan sejak tahun 1994 berdasarkan kurikulum tahun 1994 memperkenalkan kemahiran berfikir aras tinggi. KBAT ini menekankan pada pemikiran aras rendah sampai aras tinggi. Pada tahun 2011 metode ini lebih ditekankan lagi untuk diterapkan dalam kegiatan pembelajaran. KBAT merupakan upaya untuk mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam membuat penelitian dan refleksi bagi penyelesaian masalah, membuat keputusan, berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu. KBAT adalah merujuk kepada kemahiran mengaplikasikan, menganalisis, menilai dan mencipta. KBAT dapat dilakukan di dalam kelas melalui aktivitas berbentuk pengkajian ilmiah, pembelajaran inkuiri, penyelesaian masalah, dan projek. Guru dan murid perlu menggunakan alat berfikir seperti peta pemikiran, peta minda dan thingking Hats serta pembahasan aras tinggi di dalam dan di luar kelas untuk mendorong murid untuk berfikir. Murid diberi tanggungjawab atas pembelajarannya sendiri (belajar secara mandiri).

Metode seperti ini memungkinkan siswa belajar secara mandiri dan tidak bergantung pada guru dan buku teks. Dokumen, manuskrip atau artefak dianjurkan untuk digunakan sebagai sumber belajar sejarah.

Sistem Penilaian

Sistem penilaian disebut juga sistem pentaksiran ini dilakukan untuk

mengetahui daya serap siswa terhadap materi yang telah dipelajari selama proses pendidikan. Sistem penilaian dalam pendidikan di Malaysia disebut dengan istilah penerapan. Penerapan berdasarkan Kamus Dewan sebagaimana dikutip Chua Kheng Hoe (Desertasi Chua Kheng Hoe : Fakultas Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia) mempunyai arti penyerapan atau pemantapan nilai. Ukuran penilaian hasil pembelajaran mencakup domain pengetahuan, tingkah laku (attitude), tindakan, kepribadian individu dalam menjalankan berbagai aktivitas. Berdasarkan panduan pelaksanaan kurikulum yang dikeluarkan oleh kementerian Malaysia, bahwa penilaian dirancang, dibina, ditadbir, diperiksa, direkod dan dilapor oleh guru di sekolah yang melibatkan murid, orang tua murid, dan organisasi luar. Penilaian dilakukan melalui tes formatif yang dilaksanakan seiring dengan proses pengajaran dan pembelajaran. Selain tes formatif, pada akhir semester dilakukan tes sumatif. Penilaian dilakukan selama proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung melalui berbagai cara antara lain, pemerhatian, kerja kursus, kajian, membina buku skrap dan folio, membuat demonstrasi, simulasi, kuiz, dan ujian tertulis. Sistem penilaian yang dilaksanakan hampir mirip dengan sistem penilaian kurikulum 2013 yang disebut penilaian otentik.

Di Malaysia dikenal adanya nama ujian akhir yang berbeda-beda untuk masing-masing jenjang pendidikan. UPSR (Ujian Pencapaian Sekolah Rendah) adalah nama ujian akhir untuk sekolah rendah. PMR (Penilaian Menengah Rendah) adalah nama ujian akhir untuk sekolah menengah rendah. Pada akhir tingkatan 3 siswa melaksanakan tes (evaluasi skunder kelas menengah rendah). Hasil PT 3 dan

pilihan, siswa akan diberikan 3 streaming untuk memilih, yaitu 1). Streaming sains/art), 2) streaming teknis dan kejuruan, dan 3). streaming agama. Sejak tahun 2013, pemerintah mengumumkan untuk menggantikan sistem *Lower Certificate of Education* (LCE) dengan sistem evaluasi baru penilaian berdasarkan sekolah Menengah Rendah (PBSMR). SISTEM PBSMR untuk menilai kemampuan siswa dalam empat mata pelajaran inti; bahasa Melayu, inggris, sains dan matematika. Dan SPM (Sijil Pelajaran Malaysia) adalah nama ujian akhir untuk sekolah menengah tingkat atas dilakukan setelah siswa menempuh sekolah menengah tingkatan 5. Sistem sekolah menengah atas di Malaysia adalah dua tahun selepas sekolah menengah rendah, yakni tingkatan satu, tingkatan dua, tingkatan tiga di sekolah menengah rendah, pada tingkat 3 dilakukan tes untuk memperoleh sertifikat dari lembaga peperiksaan dan dilanjutkan dengan tingkatan empat dan tingkatan lima di sekolah menengah atas. Jadi siswa sekolah menengah atas di Malaysia hanya dua tahun, yakni di tingkatan empat dan tingkatan lima (atau kelas satu dan kelas II SMA di Indonesia). Hanya saja, pada tahun pertama masuk ke perguruan tinggi, calon mahasiswa di perguruan tinggi perlu mengikuti program matrikulasi di perguruan tinggi yang bersangkutan.

Sejak tahun 2014 pemerintah Malaysia menetapkan mata pelajaran sejarah sebagai subjek teras disekolah rendah dan syarat wajib lulus SPM mampu mencapai matlamatnya. Ada beberapa perguruan tinggi di Malaysia yang menetapkan sejarah sebagai salah satu syarat kelayakan kelulusan penerimaan mahasiswa baru, diantaranya adalah Universiti Teknologi Mara (UiTM), tujuannya adalah menyadarkan generasi

sekarang tentang perjuangan pemimpin negara dari dahulu hingga sekarang.

Pada akhir kelas 3, para siswa mengikuti ujian untuk menentukan kelulusan di sekolah menengah rendah, yang disebut penilaian Menengah Rendah (PMR) atau dahulu dikenal dengan istilah Sijil Pelajaran rendah (SPR) dalam bahasa Inggris disebut Lower Certificate Education (LCE) atau Lower Secondary Education. Ujian tersebut wajib diikuti oleh semua siswa kelas 3. Setelah itu, siswa akan diarahkan untuk masuk kelas berikutnya dengan pilihan jurusan IPA (science) atau seni (arts) . Siswa dapat memilih sesuai dengan pilihan mereka sendiri. Umumnya jurusan IPA lebih dipilih oleh siswa. Meskipun perjalanannya, siswa masih diberikan kesempatan untuk beralih dari jurusan IPA ke jurusan Seni.

Beberapa Sertifikat atau ijazah yang diterima siswa selama proses pendidikan meliputi; 1). lower certificate of education yaitu sertifikat yang diterima setelah tes peperiksaan pada tingkatan tiga sekolah menengah rendah, 2). Malaysian Certificate of education, yaitu sertifikat yang diperoleh siswa setelah mengikuti tes peperiksaan pada tingkatan V sekolah menengah atas pada jurusan technical dan akademic, sementara jurusan vocational memperoleh sertifikat "Malaysian certificate of vocational education". Dan selanjutnya sertifikat untuk lulusan perguruan tinggi Malaysian Higher Certificate.

KESIMPULAN

Pada dasarnya sistem pendidikan di Malaysia dan Indonesia tidak jauh berbeda. Pendidikan dimulai dari pra sekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Perbedaan yang

menonjol dari pendidikan kedua negara tersebut pada nama jenjang kedua negara. Tingkatan jenjang pendidikan juga berbeda contohnya pada jenjang sekolah menengah dimana sekolah menengah Malaysia ditempuh dalam jenjang waktu 5 tahun sedangkan di Indonesia 6 tahun. Di Malaysia tidak mengenal lembaga Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Negara Malaysia cenderung lebih maju di bidang pendidikan karena kurikulum yang dipakai cenderung relatif stabil dan tidak sering ada pergantian kurikulum. Berbeda dengan kurikulum di Indonesia yang sering terjadi perubahan tergantung pada kebijakan pemerintah yang berkuasa, sehingga cenderung ganti penguasa ganti kurikulum, sehingga pelaksanaan teknis kurikulum di Indonesia cenderung lambat untuk berkembang karena perlu waktu untuk pengarahannya dan sosialisasi pada guru-guru sebagai pelaksana kurikulum di lapangan. Alasan lain yang berpengaruh dalam kemajuan pendidikan di kedua negara adalah bekas dari negara jajahan yang berbeda. Hal ini sedikitnya mempengaruhi sistem pendidikan di kedua negara tersebut.

Jika diamati dapat dikatakan bahwa kurikulum yang digunakan di Malaysia hampir mirip dengan kurikulum 2013, yaitu menggunakan pendekatan konstruktivistik, pembelajaran berorientasi pada siswa (siswa oriented) , serta mata pelajaran sejarah dijadikan mata pelajaran wajib dan mata pelajaran pilihan. Pemerintah menganggap mata pelajaran sejarah adalah mata pelajaran yang penting dan strategis dalam pembentukan identitas bangsa oleh karenanya menjadi mata pelajaran teras yang wajib diajarkan dari mulai kelas 4 sekolah dasar (darjah 4) sampai sekolah

menengah. Mata pelajaran sejarah sebagai mata pelajaran wajib menekankan pada penanaman nilai-nilai patriotisme dan pembentukan identitas bangsa Malaysia sementara mata pelajaran sejarah sebagai mata pelajaran pilihan menekankan pada keilmuan yang bertujuan untuk mempersiapkan siswa mengembangkan keilmuannya di Perguruan Tinggi.

Kementerian Pendidikan Malaysia, *Draf Kurikulum Standard Sekolah Menengah*

Wina Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran: Teori dan Praktik Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Bandung : Kencana Prenada Media Group, 2013

Daftar Pustaka

- Abdul Rahman Hamid, *Pembelajaran Sejarah*. Yogyakarta: Ombak, 2014
- Ahmad bin Rahim dkk. *Kurikulum Sejarah Ke Arah Pembentukan Perpaduan Kaum Di Malaysia*.
- Agustiar Syah Nur. *Perbandingan Sistem Pendidikan 15 Negara*. Bandung : Lubuk Agung, 2001
- <http://nyong75.files.wordpress.com/2011/09/pembangunan-patriotisme-dalam-pengajaran-dan-pembelajaran-sejarah-tingkatan-dua.pdf>
- Chua Kheng Hoe. "Pembangunan Patriotisme Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran mata pelajaran sejarah tingkat dua: perbandingan antara empat jenis sekolah". *Desertasi* Fakultas Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia
- Heri Susanto, *Seputar Pembelajaran Sejarah : Isu Gagasan dan Strategi Pembelajaran*. Yogyakarta: Asswaja Pressindo, 2014
- Herry Widyastono, *Pengembangan Kurikulum di Era Otonomi Daerah : Dari Kurikulum 2004, 2006 ke kurikulum 2013*. Jakarta : Bumi Aksara, 2014
- Kementerian Pendidikan Malaysia, *Draf Kurikulum Standard Sekolah Rendah: Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Sejarah Tahun Empat*.

Kurikulum Pendidikan Sejarah di Amerika Serikat

Oleh : Bahri

Pendidikan Sejarah PPS UNJ

Abstract

The Bradley is a commission created in 1987 in response to concern over the shortage , both in quantity and quality , of the teaching of history in America , both at primary and secondary school level . Indeed, before 1892, the teaching of history is considered not too concerned, but for various cases at the high school level , forcing the National Education Association case the importance of teaching all levels of education. History must have particular relevance to struggle with the problem of irreversibility time in their own lives , searching for meaning and commitment to themselves, and defines adolescents who develop a sense of their own past of their relationship with the community. Four patterns in the teaching of history in the teaching of history in secondary schools in the US, and the school was granted for determining the pattern to be used .

Key words: history curriculum, United States of America

Abstrak

The Bradley adalah komisi yang diciptakan pada tahun 1987 sebagai tanggapan terhadap keprihatinan atas kekurangan, baik dalam kuantitas dan kualitas, dari pengajaran sejarah di Amerika, baik pada tingkat sekolah dasar dan menengah. Memang sebelum 1892, pengajaran sejarah dianggap tidak terlalu diperhatikan, namun karena berbagai kasus di tingkat SMA, memaksa Asosiasi Pendidikan Nasional kasus pentingnya pengajaran disemua jenjang pendidikan. Empat pola dalam pengajaran sejarah dalam pengajaran sejarah di sekolah menengah di AS, dan pihak sekolah diberikan hak penuh untuk menentukan pola yang akan digunakan.

Kata Kunci: Kurikulum Sejarah, Amerika Serikat

PENDAHULUAN

Rakyat Amerika berhasil memperoleh kemerdekaannya dan membentuk negara Amerika Serikat pada 4 Juli 1776. Iklim kemerdekaan ini berdampak pada perubahan pola pendidikan di Amerika. Pendidikan yang bersifat elitis diubah. Pada masa ini muncullah gerakan *Public School* yang bersifat terbuka untuk semua anak kulit putih baik pria maupun wanita. *Public School* dibentuk dan dirancang untuk membentuk kompetensi dan keterampilan dasar warga negara. Upaya pengembangan *Public School* telah menimbulkan pro dan kontra dalam

masyarakat. Sebagian masyarakat setuju dengan campur tangan dan intervensi pemerintah dalam pengembangan *Public School*, namun sebagian lagi menolaknya.

Kegiatan pendidikan di Amerika tidak berhenti sampai disini saja. Sejarah panjang mewarnai kegiatan pendidikan di negeri "Paman Sam" tersebut. Tiga periode reformasi pendidikan berikut ini akan mengisi catatan panjang sejarah pendidikan di Amerika. Ketiga periode reformasi pendidikan tersebut adalah; 1) gerakan sekolah umum pada tengah abad XIX, 2) alam progressive pada awal abad XX, dan 3) gerakan fermentaso.

Pada abad XIX Public School tersebar luas di seluruh Amerika, namun ironisnya tenaga pendidik dan fasilitas-fasilitas penunjang pendidikan ketika itu sangat minim. Dalam perkembangan selanjutnya, terjadilah reformasi di bidang pendidikan yang berhasil memunculkan gerakan yang bisa mempersatukan kelompok-kelompok sosial yang berbeda keinginannya. Keberhasilan gerakan tersebut mendukung perkembangan *Public School*. Pada tengah abad XIX ini *Public School* dirancang untuk memberikan pendidikan dasar umum sehingga lulusannya diharapkan mampu berpartisipasi dalam kehidupan politik dan dapat memasuki dunia kerja.

Pada zaman progresif terjadi sentralisasi pengawasan dan elaborasi dalam sistem pendidikan *Common School* (sekolah rakyat). Para ahli pendidikan menggunakan kekuatan negara untuk memperkuat posisi, misalnya untuk memperoleh sertifikasi, dana, standarisasi fasilitas dan kurikulum. Pada masa ini muncul pemikiran bahwa *Common School* tidak hanya membekali siswanya dengan pendidikan dasar di bidang 3 R (*reading, writing, arithmetic*) dan pendidikan moral saja, tetapi juga diharapkan mampu menyiapkan siswa secara langsung agar dapat melakukan peranan dalam hidup bermasyarakat, sehingga disini sekolah merupakan suatu lembaga yang menjadi pintu gerbang untuk mengarahkan siswa ke arah dunia kerja.

Gerakan fermentasi generasi terakhir dalam sejarah pendidikan di Amerika diawali pada 1958 sampai tengah tahun 1970-an. Pada masa ini terjadi reformasi di bidang pendidikan yang berciri lebih menekankan fungsi dari pada tujuan pendidikan. Sentralisasi kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan semakin bertambah sebagai akibat dari reformasi pendidikan tersebut. Dalam

perkembangan selanjutnya, organisasi-organisasi guru tumbuh, makin berpengaruh, dan memperoleh kekuatan politik. Hal itu menyebabkan guru bersatu untuk menuntut perbaikan ekonomi dan sosial. Pada awal tahun 1980-an peminat public school merosot. Ketika itu public school menghadapi suatu krisis kepercayaan umum dan moral profesional yang rendah. Masyarakat menghendaki terjadinya perubahan-perubahan pada *public school*, namun para pengambil keputusan seringkali kurang memahami public education itu sendiri, sehingga mereka tidak dapat menentukan prioritas untuk memperbaiki lembaga ini (*public school*). Reformasi datang dan pergi silih berganti, tetapi pemecahan rasional yang dilakukan tidak menggarap masalah yang sebenarnya (Dimiyati, 1988).

KAJIAN TEORETIK

Sekolah Dasar dan Menengah adalah wajib bagi seluruh siswa di Amerika Serikat, akan tetap jenjang usia siswa berbeda-beda di setiap Negara bagian. Siswa di Amerika Serikat memulai pendidikannya dari jenjang *Kindergarten* (usia 5 sampai 6 tahun) hingga menyelesaikan pendidikan menengah pada kelas 12 (usia 18 tahun). Terdapat 14.000 sekolah di Amerika Serikat dan setiap tahunnya pemerintah Amerika Serikat mengalokasikan dana pendidikan sebesar \$500 triliun untuk digunakan keperluan sekolah dasar dan menengah.

Pada level Sekolah Dasar, sistem persekolahan di Amerika Serikat menerapkan durasi 5-6 tahun (bagi anak usia 6 sampai 12 tahun). Tujuan pendidikan pada semua level pendidikan termasuk level Sekolah Dasar (*Elementary School*) di Amerika Serikat yang disusun sejak tahun 1991 dan masih berlaku hingga

saat ini secara singkat dirumuskan dalam 10 tujuan berikut ini:

- Setiap siswa harus memiliki kemampuan dalam berkomunikasi dan komputasi (perhitungan);
- Setiap siswa harus menerapkan metode penelitian (inquiry) dan pengetahuan yang telah dipelajari, serta dapat menggunakan metode dan pengetahuan tersebut dalam aplikasi interdisipliner;
- Setiap siswa harus memiliki pengetahuan, pemahaman, dan apresiasi mengenai seni artistik, kebudayaan, prestasi intelektual, serta mengembangkan kemampuan dalam mengekspresikan bakat pribadi;
- Setiap siswa harus memiliki dan dapat menerapkan pengetahuan mengenai politik, ekonomi dan institusi sosial di dalam negeri maupun luar negeri;
- Setiap siswa harus mematuhi dan mempraktikkan nilai-nilai dasar kewarganegaraan dan memiliki, serta dapat menggunakan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap yang diperlukan guna keikutsertaannya dalam kehidupan negara yang demokratis;
- Setiap siswa harus mampu mengembangkan kemampuan untuk memahami, menghargai dan bekerjasama dengan orang lain yang berbeda dalam hal ras, jenis kelamin, kemampuan, budaya, suku bangsa agama dan latar belakang politik, ekonomi, sosial serta memahami dan menghargai nilai-nilai, keyakinan dan sikap yang dianut mereka;
- Setiap siswa harus memiliki pengetahuan mengenai konsekuensi ekologis dalam menggunakan sumber-sumber alam dan lingkungan;

- Setiap siswa harus dipersiapkan memasuki Pendidikan Menengah (*Secondary Education*);
- Setiap siswa harus dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang akan meningkatkan kehidupan pribadi, keterampilan positif, dan fungsi-fungsi dalam masyarakat demokratis;
- Setiap siswa harus mampu mengembangkan komitmen belajar seumur hidup dan bersikap membangun.

Pendidikan dasar di Amerika Serikat berjenjang dari *Kindergarten* hingga *Fifth grade* (Kelas 5), tetapi terkadang juga berjenjang hingga *Fourth grade* (kelas 4), *Sixth grade* (kelas 6) atau *eighth grade* (kelas 8) tergantung sistem kurikulum pada school district tersebut. Kurikulum pembelajaran dipilih oleh school district mengacu pada standar pembelajaran di negara bagian tersebut. Standar pembelajaran adalah tujuan yang harus dicapai oleh *School district* yang harus mengacu pada AYP (*Adequate yearly program*).

Jenjang pendidikan menengah di Amerika Serikat dibagi menjadi dua tahap (*middle school/ junior high*) mulai pada jenjang *sixth, seventh, eighth* and *ninth grade* (kelas 6, 7, 8, 9). Jenjang pendidikan pada *middle school/ junior high* (grade/kelas) di tentukan oleh faktor demografi seperti jumlah usia siswa sekolah menengah. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan populasi siswa sekolah yang stabil. Pada jenjang ini, siswa diberikan kebebasan untuk memilih mata pelajaran yang dikehendaki dan menggunakan sistem kelas berpindah (*moving class*). Senior High (kelas 9,10,11,12) adalah jenjang lanjutan setelah *middle school/junior high*, biasanya Jenjang ini dimulai dari *ninth grade* (*freshman*), *tenth grade* (*sophomores*),

eleventh grade (Juniors), *twelfth grade* (seniors). Jenjang *middle school/Junior high* dan *Senior high* berbeda-beda di setiap Negara bagian, mengacu pada demografi usia siswa di negara bagian tersebut (Sulton, 2014).

Pendidikan menengah memiliki struktur kurikulum yang berbeda dengan di Indonesia. Pada jenjang ini, siswa diwajibkan mengambil sejumlah mata pelajaran wajib (*mandatory subjects*) dan memilih mata pelajaran pilihan (*electives*).

- Mata pelajaran wajib (*mandatory subjects*) meliputi :
 - *Science* (Ilmu Pengetahuan Alam) meliputi Biologi, Kimia dan Fisika;
 - *Mathematics* (Matematika) meliputi aljabar, geometri, *pre-calculus* dan statistika. *English* (pelajaran bahasa inggris) meliputi sastra, humaniora, mengarang dan verbal (praktek);
 - *Physical education* (Olahraga).

Mata pelajaran pilihan (*electives*) meliputi: *Athletics* meliputi *cross country, football, basketball, track and field, swimming, tennis, gymnastics, waterpolo, soccer, softball, wrestling, cheerleading, volleyball, lacrosse, ice hockey, fieldhockey, crew, boxing, skiing/snowboarding, golf, mountain biking, marching band*;

Career and Technical Education meliputi *agriculture/agricience, Business/Marketing, Family and Consumer Science, Health occupations*;

Computer word processing meliputi *programing and design; Foreign langguages* meliputi bahasa Spanyol dan Perancis (umum) Bahasa Cina, Latin, Yunani, Jerman, italia dan Jepang (tidak umum); *Performing Arts/Visual Arts* meliputi, *paduan suara, band, orchestra, drama, seni rupa,*

fotografi, ceramics dan *dance. Publishing* meliputi *Jurnalisme/Koran siswa, buku tahunan dan majalah siswa* (Sulton, 2014).

Dalam sejarah pendidikan di Amerika Serikat (United States), penentuan apa yang harus diajarkan di sekolah merupakan hal yang dimiliki oleh masyarakat lokal (*local communities*) dan Negara Bagian atau provinsi yang disebut *states*. Dengan demikian, isi kurikulum sangat beragam, disesuaikan dengan keadaan masyarakat dan Negara Bagian tersebut. Tidak ada sistem pendidikan atau kurikulum yang berskala nasional. Negara Bagian (*State*) dan masyarakat sama-sama memiliki kekuatan/kewenangan dalam menentukan materi/isi dan struktur kurikulum. Selanjutnya, organisasi sekolah pada tingkat lokal diperkenankan menentukan program atau isi kurikulum sepanjang masih di dalam rambu-rambu atau petunjuk yang ditetapkan oleh pemerintah Negara Bagian (*State*), menambah atau melengkapi persyaratan kelulusan, menentukan program pilihan yang harus diajarkan, dan mengusulkan program atau silabi yang akan dikembangkan oleh Negara Bagian

Pada umumnya kebijakan pendidikan yang diambil di suatu negara cenderung dijadikan alat intervensi negara kepada warga negaranya. Bentuk intervensi itu bisa berupa justifikasi ilmu pengetahuan tertentu, pengaturan kelembagaan sekolah, lama pendidikan dan gelar, serta kualifikasi pendidikan yang dikaitkan dengan posisi pekerjaan (jabatan).

Tujuan dan Manajemen Pendidikan AS

Meskipun Amerika Serikat tidak mempunyai sistem pendidikan yang terpusat atau yang bersifat nasional, akan tetapi bukan berarti tidak ada rumusan tentang tujuan pendidikan yang berlaku

secara nasional. Tujuan sistem pendidikan dirumuskan dalam 5 poin sebagai berikut:

- Untuk mencapai kesatuan dalam keragaman;
- Untuk mengembangkan cita-cita dan praktek demokrasi;
- Untuk membantu pengembangan individu;
- Untuk memperbaiki kondisi sosial masyarakat; Dan
- Untuk mempercepat kemajuan nasional (Wibowo, tt)

Di luar 5 tujuan tersebut, Amerika Serikat mengembangkan visi dan misi pendidikan gratis bagi anak usia sekolah untuk masa 12 tahun pendidikan awal, dan biaya pendidikan relatif murah untuk tingkat pendidikan tinggi.

Dengan mengembangkan pola desentralisasi, maka manajemen pendidikan di Amerika Serikat dikelola berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat Negara Bagian dan Pemerintah Daerah setempat. Di tingkat nasional (federal/pusat) dibentuk satu departemen, yaitu Departemen Pendidikan Federal. Departemen ini dipimpin oleh seorang setaraf Sekretaris Kabinet. Tugas departemen ini adalah melaksanakan semua kebijakan pemerintah federal dalam sektor pendidikan di semua tingkatan pemerintahan dan untuk semua jenjang pendidikan. Tetapi, karena sebagian besar kewenangan dan tanggung jawab pendidikan sudah diserahkan kepada Negara Bagian dan Pemerintah Daerah, maka Departemen Pendidikan Federal hanya menjalankan monitoring dan pengawasan saja. Di tingkat Negara Bagian dibentuk sebuah badan yang diberi nama *Board Of Education*. Badan

ini bertugas dan berfungsi membuat kebijakan-kebijakan serta menentukan anggaran pendidikan untuk masing-masing wilayah (Negara Bagian) nya, khususnya berkenaan dengan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Selanjutnya, untuk menangani permasalahan yang berkaitan dengan hal-hal yang lebih teknis (yaitu; tentang kurikulum sekolah, penentuan persyaratan sertifikasi, guru-guru, dan pembiayaan sekolah) dibentuk sebuah bagian pendidikan yang disebut sebagai *Comissioner*, sering juga disebut sebagai Superintendent. Bagian ini dipimpin oleh seorang yang ditunjuk oleh *Board of Education* atau oleh Gubernur. Untuk beberapa Negara Bagian, pimpinan Bagian Pendidikan ini dipilih oleh masyarakat. Sementara itu pada level operasional, pelaksanaan manajemen pendidikan dijalankan oleh unit-unit yang lebih rendah, bahkan banyak secara langsung dilaksanakan oleh masing-masing sekolah yang bersangkutan. Para pimpinan atau kepala sekolah pada prinsipnya memiliki kebebasan dan otonomi yang luas untuk menjalankan manajemen operasional pendidikan.

Sumber pendanaan pendidikan di Amerika, khususnya pendidikan dasar dan menengah, yang lebih dikenal dengan *Public Schools*, berasal dari Anggaran Pemerintah Pusat (Federal), Anggaran Pemerintah Negara Bagian dan Anggaran Pemerintah Daerah. Dana pendidikan tingkat SD dan SLTP dari negara bagian yang diperuntukkan 136 sekolah negeri dengan jumlah murid sekitar 1,1 juta sebesar \$8 milyar atau sekitar 32% dari anggaran keseluruhan negara bagian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian sejarah yang prosesnya berfokus pada masa lampau. Hal tersebut berarti bahwa penelitian ini melakukan analisa terhadap keadaan dan perkembangan serta pengalaman masa lalu. Oleh karena itu, perlu untuk mendapat pertimbangan secara hati-hati dan teliti terutama bukti dan validitas sumber sejarah dan interpretasi dari keterangan yang diperoleh. Dengan demikian, bentuk penyusunan yang dilakukan dengan menggunakan metode historis atau sejarah.

Metode sejarah adalah seperangkat asas dan kaidah-kaidah yang sistematis yang digubah untuk membantu secara efektif dalam mengumpulkan sumber-sumber sejarah. Sumber sejarah tersebut dinilai secara kritis dan dapat menyajikan suatu sintesis dari hasil yang pada umumnya berbentuk tulisan atau historiografi. Pendapat itu diperkuat oleh Gottschalk (1985:96) yang menyatakan bahwa metode sejarah adalah suatu proses untuk menganalisa peninggalan masa lalu, yang dapat direkonstruksi secara imajinatif berdasarkan data-data yang diperoleh. Hasil rekonstruksi secara imajinatif akan diperoleh gambaran tentang kehidupan masa lampau yang sering disebut historiografi.

Secara teoritis, dalam penelitian sejarah dilakukan melalui empat tahapan, yaitu; heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Penggunaan metode sejarah merupakan aturan dan prinsip yang sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif. Kemudian menilai sumber tersebut secara historis, disajikan dengan sistematis sebagai hasil proses pengkajian bentuk tulisan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Dengan demikian, untuk menyusun suatu kerangka penulisan sejarah, maka kisah sejarah harus disajikan secara kronologis (Reiner, 1997:75). Adapun yang dimaksud kronologis adalah fakta-fakta sejarah yang diperoleh disusun secara berurutan, terutama peristiwa yang telah terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Isu-Isu dan Reformasi Pendidikan di AS

Menurut hasil studi perbandingan yang dilakukan oleh Agustiar Syah Nur (2001), ada beberapa isu dan masalah pendidikan yang dialami pemerintah dan masyarakat Amerika Serikat, antara lain:

- Banyaknya anak usia sekolah yang tidak diasuh langsung oleh orang tua mereka
- Tingginya tingkat perceraian, yang mengakibatkan banyaknya anak-anak usia sekolah yang hanya diasuh oleh sang ibu sebagai single-parent
- Tingginya tingkat imigrasi yang umumnya berasal dari kalangan tidak mampu dan tidak terdidik

Dari berbagai monitoring dan evaluasi pendidikan yang dilakukan oleh berbagai badan resmi AS sendiri, ternyata kualitas pendidikan dan lulusan sekolah di AS masih kalah dibandingkan dengan negara-negara lain dalam standar internasional. Banyak anak-anak yang drop-outs dan tingginya kekerasan oleh anak-anak (wibowo, tt).

Karena adanya berbagai permasalahan tersebut, pemerintah AS sejak tahun 1990 mencanangkan reformasi pendidikan. Pada tahun tersebut Presiden AS George H. B. Bush beserta seluruh Gubernur Negara Bagian (saat itu Bill Clinton termasuk menjadi salah satu Gubernur Negara

Bagian) menyetujui reformasi pendidikan dengan mencanangkan 6 tujuan nasional pendidikan AS yang baru. Yaitu:

- Pada tahun 2000, seluruh anak di AS di waktu mulai masuk sekolah dasar sudah siap untuk belajar;
- Pada tahun 2000, tamatan sekolah menengah naik sekurang-kurangnya 90%.
- Pada tahun 2000, murid-murid di AS yang menyelesaikan pendidikannya pada "grade 4, 8 dan 12" mampu menunjukkan kemampuannya dalam mata pelajaran yang menantang, yaitu bahasa Inggris, matematika, sains, sejarah, dan geografi. Setiap sekolah di AS harus mampu menunjukkan bahwa anak-anak dapat menggunakan pikirannya dengan baik, sehingga mereka siap menjadi warga negara yang baik, siap untuk memasuki pendidikan yang lebih tinggi, serta siap pula untuk pekerjaan yang produktif dalam perekonomian modern.
- Pada tahun 2000, siswa-siswa AS adalah yang terbaik di dunia dalam bidang sains dan matematika.
- Pada tahun 2000, setiap orang dewasa AS dapat membaca dan menulis, memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk bersaing dalam ekonomi global, serta dapat melaksanakan hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara.
- Pada tahun 2000, setiap sekolah di AS harus bebas dari obat-obat terlarang dan kekerasan, serta dapat menciptakan suasana lingkungan yang mantap dan aman sehingga kondusif untuk belajar (Wibowo, tt)

Pokok-pokok reformasi tersebut dimaksudkan sebagai pegangan dalam membuat kebijakan-kebijakan

pendidikan yang sudah harus segera diimplementasikan dan hasilnya sudah harus kelihatan pada tahun 2000. Gerakan reformasi pendidikan di kalangan Gubernur itu dipelopori oleh Gubernur Bill Clinton dan Lamar Alexander di masing-masing negara bagiannya. Gebrakan yang dilakukan adalah:

- Meningkatkan persyaratan untuk menamatkan suatu jenjang pendidikan,
- Melaksanakan test standar untuk mengukur keberhasilan siswa,
- Menjalankan sistem penilaian yang ketat terhadap guru sejalan dengan pembenahan jenjang karir bagi guru-guru,
- Memperbesar tambahan dana dari negara bagian bagi sekolah-sekolah. Tambahan dana baru ini pada umumnya dipakai untuk meningkatkan gaji guru yang kala itu masih berada pada taraf sangat rendah (Wibowo, tt).

Kurikulum Sejarah di AS

Sistem sekolah dibagi menjadi 8 kelompok, masing-masing terdiri dari 2 sampai 4 SMU dan SD serta SLTP yang ada di bawahnya. Program studi berisi instruksi program yang terdiri dari: (a) isi kurikulum dan pengetahuan serta ketrampilan untuk setiap kelas dan pelajaran, (b) sumber instruksional yang telah disetujui, (c) kegiatan penilaian, dan (d) sesuai dengan SOL (*Standard Of Learning*).

Pada dasarnya proses pengembangan kurikulum dipusatkan pada Negara Bagian (State), namun demikian guru, sekolah, ataupun distrik dapat mendesain sendiri program yang ditawarkan sesuai dengan pedoman/petunjuk yang dikeluarkan oleh Negara Bagian.

Sekolah harus membuat program sesuai dengan persyaratan Negara Bagian dan mendesain kurikulum yang dapat mempersiapkan siswa untuk mengikuti ujian negara (state examinations). Silabi untuk semua mata pelajaran (subjects) dikeluarkan oleh pemerintah Negara Bagian untuk semua jenjang persekolahan, sedangkan sekolah-sekolah diperbolehkan mengajukan alternatif silabi dan mengembangkan program pilihan sebagai tambahan. Dalam beberapa kasus, silabi untuk program-program pilihan tersebut harus direview oleh SED (*State Education Department*). Pada akhirnya sekolah dan guru bertanggung jawab untuk menentukan apa yang harus diajarkan dan bagaimana mengajarkannya, serta membuat pertimbangan terhadap setiap aturan, kebijakan-kebijakan dan penilaian. Orang tua, organisasi guru, para peneliti, termasuk juga para pemimpin dunia usaha sering dilibatkan dalam pengembangan rekomendasi kebijakan penetapan kurikulum, bahkan bisa menjadi anggota komisi kurikulum, satuan tugas dan lembaga penasihat SED.

Pada tingkat sekolah, guru dapat mengembangkan kurikulum berdasarkan standar dan kerangka dari pemerintah negara bagian (*State*), menggunakan sumber-sumber material yang ditentukan oleh pemerintah atau menentukan sendiri. Dengan demikian, dalam pendidikan di Amerika Serikat guru-guru diharapkan menggunakan standar dan kerangka sebagai dasar penyusunan kurikulum, mereka bisa mempertimbangkan fleksibilitas/keluwesannya dalam desain suatu kurikulum bagi kelas mereka sendiri, termasuk dalam memilih media dan metode pembelajaran.

Dalam kaitannya dengan evaluasi kurikulum, di Amerika Serikat tidak ada mekanisme secara formal untuk

mengevaluasi efektivitas kurikulum sekolah maupun kerangka kurikulum yang dibuat pemerintah (*State*). Kerangka evaluasi biasanya dikembangkan oleh para ahli kurikulum dari kalangan guru-guru atau ahli pendidikan lainnya dan para ahli mata pelajaran yang didasarkan kepada hasil review mutakhir terhadap standar dan praktek yang terdapat dalam laporan kurikulum pada tingkat Negara Bagian (*State*) dan nasional, misalnya berdasarkan hasil review tersebut suatu lembaga yang bernama *The National Council Of Teacher Mathematics* menerbitkan standar kurikulum dan evaluasi untuk mata pelajaran matematika di sekolah-sekolah.

Perhatian Pemerintah Dalam Pengajaran Sejarah

The Bradley Commission adalah komisi yang diciptakan pada tahun 1987 sebagai tanggapan terhadap keprihatinan atas kekurangan, baik dalam kuantitas dan kualitas, dari pengajaran sejarah di Amerika, baik pada tingkat sekolah dasar dan menengah. Sementara disiplin ilmu sosial lainnya dan berbagai bidang baru, seperti seks dan pendidikan kesehatan, pendidikan driver, dan pendidikan komputer, mendapat perhatian lebih dalam kurikulum. Saat itu, 15 persen dari siswa tidak mengambil dan tidak berminat belajar sejarah Amerika di SMA, dan setidaknya 50 persen tidak belajar baik Sejarah dunia atau peradaban Barat.

Komisi Bradley mencurahkan perhatiannya secara eksklusif terhadap pelajaran sejarah. Sebelum 1892, pengajaran sejarah dianggap tidak terlalu diperhatikan, namun karena berbagai kasus di tingkat SMA, memaksa Asosiasi Pendidikan Nasional kasus pentingnya pengajaran disemua jenjang pendidikan (Oliveira, 2008).

Tahun 1892 subkomite Sejarah, Pemerintah Sipil, dan Ekonomi Politik, yang diketuai oleh Charles Kendall Adams dari University of Wisconsin menyepakati dan merekomendasikan kepada semua siswa yang akan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi harus belajar sejarah selama 4 tahun di sekolah menengah. Bagi lembaga tersebut, Sejarah dapat memperluas dan mengembangkan pikiran, dan dapat mencerahkan intelektual.

Komisi Bradley menyatakan bahwa sejarah harus menempati tempat yang besar dan penting dalam pendidikan warga sipil. Tidak seperti negara lain, Amerika tidak terikat oleh agama umum atau etnis yang sama. Sebaliknya, warisan yang mengikat seperti visi demokrasi kebebasan, kesetaraan, dan keadilan. Orang Amerika melestarikan visi itu dan membawanya ke praktek sehari-hari, sehingga warga negara memahami bagaimana masa lalu, peristiwa apa yang terjadi pada masa lalu yang telah menjadi bagian dari sejarah Amerika.

Organisasi Guru Sejarah, Asosiasi Sejarah Amerika, dan Organisasi Sejarawan Amerika berkomitmen mendukung upaya Komisi Bradley. Komisi Bradley, juga menganggap bahwa yang harus memiliki peran besar terhadap pengajaran sejarah di Amerika adalah para guru sejarah karena guru sejarah merupakan garda terdepan dalam pengaplikasian kurikulum yang berlaku.

Komisi Bradley mengakui bahwa bahan paling penting dalam setiap situasional instruksional adalah masing-masing guru. Sangat mudah untuk membuat pernyataan tentang apa harus terjadi di kelas. Tapi sebenarnya apa terjadi di kelas ditentukan oleh tingkat kompetensi anak-anak supaya mereka termotivasi dan kurikulum untuk belajar. Dengan minimnya waktu dan terlalu banyak siswa,

banyak guru masih bisa menyampaikan kegembiraan, kompleksitas, dan relevansi masa lalu.

Komisi Bradley berkonsentrasi pada kurikulum, kecewa ketika mengetahui bahwa program kelas 11, tidak lagi belajar sejarah Amerika secara universal, dan bahwa banyak sekolah sekarang memungkinkan kelas opsional, kadang-kadang disebut "studi kawasan" dan dengan konten sejarah kecil, untuk menggantikan program kelas 8. Dalam manfaat, Komisi Bradley menegaskan bahwa sejarah harus menjadi bagian penting dari pengalaman pendidikan setiap warga Amerika. Semua siswa harus memahami kompleksitas Konstitusi dan Perang Saudara, imigrasi dan Takdir, dan dari perjuangan melawan perbudakan dan hak-hak sipil. Kebutuhan untuk waktu yang lebih kurikuler jelas. Sayangnya, program sejarah sekarang tidak diminati (Oliveira, 2008).

Siswa juga perlu mengetahui warisan budaya beragam banyak orang di dunia, dan mereka perlu tahu asal-usul dan evolusi Ide politik, agama, dan sosial yang kaya. Tanpa mempelajari sejarah Barat dan sejarah dunia, siswa tetap tidak berhubungan dengan realitas ini. Mereka tidak akan memahami asal-usul dan ajaran utama agama-agama dunia, mereka tidak akan akrab dengan Ruggles terluas kuno dan dunia untuk kebebasan dan keadilan, dan mereka tidak akan tahu banyak jalan yang negara telah diambil untuk penaklukan atau kelangsungan hidup.

Sebagai pengakuan atas nilai kritis dari studi sejarah untuk pendidikan Amerika, Komisi Bradley telah mengadopsi resolusi berikut, ditujukan kepada semua warga negara yang bertanggung jawab untuk merancang dan menerapkan pendidikan sejarah:

- Bahwa pengetahuan dan kebiasaan pikiran yang bisa diperoleh dari studi sejarah sangat diperlukan untuk pendidikan warga negara dalam demokrasi. Studi tentang sejarah harus, karena itu, diperlukan dari semua siswa.
- Bahwa studi tersebut harus mencapai jauh melampaui perolehan informasi yang berguna. Untuk mengembangkan penilaian dan perspektif, studi sejarah seringkali harus fokus pada luas, tema yang signifikan dan pertanyaan, daripada menghafal berumur pendek fakta tanpa konteks. Dengan demikian, studi sejarah harus menyediakan konteks untuk fakta dan pelatihan penilaian kritis berdasarkan bukti, termasuk sumber-sumber asli, dan harus mengembangkan perspektif yang naik dari pandangan kronologis masa lalu hingga hari ini.
- Bahwa waktu kurikuler sejarah penting untuk mengembangkan pemahaman asli dan keterlibatan yang diperlukan untuk melakukan penilaian, harus jauh lebih besar dari yang saat ini umum dalam program sekolah Amerika.
- Bahwa TK sampai kelas enam kurikulum studi sosial menjadi sejarah berpusat.
- Bahwa Komisi ini merekomendasikan kepada negara-negara dan distrik sekolah lokal pelaksanaan kurikulum ilmu sosial memerlukan tidak kurang dari empat tahun belajar sejarah di antara enam tahun mencakup kelas 7 sampai 12.
- Bahwa setiap siswa harus memiliki pemahaman tentang dunia yang meliputi pengalaman sejarah masyarakat dari Afrika, Amerika, Asia, dan Eropa.
- Sejarah itu dapat dipahami ketika peran semua bagian konstituen dari masyarakat.
- Bahwa penyelesaian program substansial dalam sejarah (lebih disukai utama, minimal di bawah umur) di tingkat perguruan tinggi atau universitas diperlukan untuk sertifikasi guru IPS di sekolah-sekolah menengah dan tinggi. Perguruan tinggi dan Jurusan sejarah meninjau struktur dan isi program utama untuk kesesuaian mereka dengan kebutuhan calon guru (Bradley, 1989)

Topik-Topik Pengajaran Sejarah di Persekolahan Amerika

Berikut ini adalah tema-tema pokok pengajaran sejarah Amerika Serikat:

- Evolusi Amerika; lembaga, dan praktek-praktek dari zaman kolonial hingga saat ini; Revolusi, Konstitusi, perbudakan, Perang Saudara, emansipasi, dan hak-hak sipil.
- Perkembangan ekonomi Amerika; kekuatan geografis; peran perbatasan dan pertanian; dampak perubahan teknologi dan urbanisasi dan sumber daya, pada masyarakat, politik, dan budaya. Peran dan emansipasi buruh Amerika.
- Pertemuan orang dan budaya dari berbagai negara, dan beberapa tradisi keagamaan, yang telah memberi kontribusi pada warisan Amerika dan masyarakat Amerika kontemporer. Perubahan peran Amerika Serikat di dunia luar; hubungan antara urusan domestik dan kebijakan luar negeri;
- Keluarga dan sejarah lokal, dan hubungannya dengan pengaturan yang lebih besar dari pengembangan Amerika.

- Perubahan karakter masyarakat Amerika dan budaya, seni dan huruf, pendidikan dan pemikiran, agama dan nilai-nilai. Ketegangan khas Amerika antara kebebasan dan kesetaraan, kebebasan dan ketertiban, wilayah dan bangsa, individualisme dan kesejahteraan bersama, dan antara keanekaragaman budaya dan kesatuan sipil.
- Keberhasilan utama dan kegagalan dari Amerika Serikat, dalam krisis di dalam negeri dan di luar negeri (Yilmaz, 2008).

Mengingat luasnya cakupan sejarah dunia dan sulitnya mengajar secara efektif, fakta dan narasi. Sejarah dunia harus memasukkan banyak topik berikut dengan mengacu pada “tema penting”:

KESIMPULAN

The Bradley adalah komisi yang diciptakan pada tahun 1987 sebagai tanggapan terhadap keprihatinan atas kekurangan, baik dalam kuantitas dan kualitas, dari pengajaran sejarah di Amerika, baik pada tingkat sekolah dasar dan menengah. Saat itu, 15 persen dari siswa tidak mengambil dan tidak berminat belajar sejarah Amerika di SMA, dan setidaknya 50 persen tidak belajar baik Sejarah dunia atau peradaban Barat. Memang sebelum 1892, pengajaran sejarah dianggap tidak terlalu diperhatikan, namun karena berbagai kasus di tingkat SMA, memaksa Asosiasi Pendidikan Nasional kasus pentingnya pengajaran disemua jenjang pendidikan (Oliveira, 2008).

Di SMP dan SMA didasarkan pada keyakinan menyatakan bahwa “waktu kurikuler penting untuk mengembangkan pemahaman asli dan keterlibatan yang

diperlukan untuk melakukan penilaian harus jauh lebih besar dari yang saat ini umum di Amerika program sekolah dalam sejarah. Sejarah harus memiliki relevansi khusus untuk berjuang dengan masalah irreversibilitas waktu dalam kehidupan mereka sendiri, mencari makna dan komitmen untuk diri mereka sendiri, dan mendefinisikan remaja yang mengembangkan rasa masa lalu mereka sendiri dari hubungan mereka dengan masyarakat.

Empat pola dalam pengajaran sejarah dalam pengajaran sejarah di sekolah menengah di AS, dan pihak sekolah diberikan hak penuh untuk menentukan pola yang akan digunakan. Dalam setiap pola-pola ini, Komisi menganjurkan bahwa minimal dua tahun diperlukan untuk mengajar sejarah Amerika Serikat, dua tahun untuk menunjukkan kombinasi pengajaran sejarah barat Barat dan sejarah dunia, baik di dalam kursus terpadu atau dengan mengabdikan tahun untuk masing-masing.

Daftar Pustaka

- De Oliveira, Luciana.. *Education “History Doesn’t Count”: Challenges of Teaching History in California Schools, USA: Society for History Education* Stable. 2008
- Heidenheimer, at.al, , *Comparative Public Policy : The Politics of Social Choice in America, Europe, and Japan*, ST. Martin’s Press, New York. Smith, 1990
- Donald L.. *History Teaching In Our Public Schools*, New York: NYSHA 2009.
- (http://en.wikipedia.org/wiki/File:Education_in_the_United_

- States.svg, diakses pada tanggal 1 November 2014).
- (http://en.wikipedia.org/wiki/File:Education_in_the_United_States.svg, diakses pada tanggal 1 November 2014).
- (<http://www.pendidikanislam.net/index.php/untuk-guru-a-dosen/38-umum/130-sekilas-model-pendidikan-di-amerika-serikat-6>, diakses pada tanggal 1 November 2014).
- (http://en.wikipedia.org/wiki/File:Education_in_the_United_States.svg, diakses pada tanggal 1 November 2014).
- (<http://cahkaliboyo.blogspot.com/2013/02/sistem-pendidikan-di-amerika-serikat-usa.html>).
- Yilmaz, Kaya. *A Vision of History Teaching and Learning: Thoughts on History Education in Secondary Schools*, Carolina, UNC Press. 2009
- The Bradley Commission on History in Schools,. *Building a History Curriculum: Guidelines for Teaching History in Schools*, USA: Society for History Education Stable. 1989
- Wibowo, Teguh Edi.. *Perbandingan Kebijakan Publik Tentang Pendidikan Indonesia -Amerika*. Makalah. Tt
- Siyamta. *Perbandingan Sistem Pendidikan Di Beberapa Negara (Saudi Arabia, Germany, Finlandia, Amerika Serikat, Australia dan Sudan)*, Malang: *Makalah*. 2014

Kurikulum Pendidikan Sejarah di India

Oleh : Naijan

Pendidikan Sejarah PPS UNJ

Abstract

Schooling educational system in India uses system 5-3-2-2 in level, Lower Primary School for 5 years (class I-V), Upper Primary School for 3 years (classs VI-VIII), Secondary School 2 for years (class IX-X), Higher Secondary School for 2 years (class XI-XII). Educational Curriculum ruled by a national curriculum named National Curriculum Framework 2005 produced by National Council of Educational Research and Training (NCERT). NCERT is a governmental institution which hold education in India. NCERT is an institution belongs to Human Resource Development Ministry. Relating to the history subject in the Indian Schools, the government puts it as an important subject, mainly for increasing the student's nationalisme attitude. For this reason, the government makes the history as a compulsry subjek for all level of school education in India, particularly the National History for class I - XII. Meanwhile the World History taught only from class I until class X only.

Key words: history curriculum, India

Abstrak

Sistim pendidikan sekolah di India menggunakan sistim 5-3-2-2, yaitu Lower Primary School 5 tahun (kelas I-V), Upper Primary School 3 tahun (Kelas VI-VIII), Secondary School 2 tahun (Kelas IX-X), Higher Secondary School 2 tahun (Keas XI-XII). Kurikulum pendidikan diatur dalam suatu kurikulum nasional yang diberi nama Natonal Curriculum Framework 2005 yang diterbitkan oleh National Council of Educational Research and Training (NCERT) yaitu lembaga pemerintah yang menangani dunia pendidikan yang berada dibawah Kementerian Pengembangan Sumber Daya Manusia atau Human Resource Development Ministry. Terkait dngan mata pelajaran Sejarah, pemerintah menganggap penting pelajaran sejarah, terutama Sejarah Nasional yang tujuannya untuk menanamkan nilai sikap nasionalisme siswa, oleh karena itu, pemerintah mewajibkan siswa dari seluruh jenjang pendidikan diberikan materi pelajaran Sejarah Nasional, dari kelas I sampai kelas XII. Sedangkan Sejarah Dunia diajarkan hanya sampai SMP (Kelas IX dan X).

Kata Kunci: Kurikulum Sejarah, India

PENDAHULUAN

India adalah negara terluas ketujuh di dunia dengan luas wilayah 3.287.263 km persegi. India juga terkenal karena kepadatan penduduknya. India menempati urutan kedua sebagai negara terpadat di dunia setelah Cina. Jumlah penduduk diperkirakan mendekati angka 600 juta orang. Mayoritas

penduduknya beragama Hindu (83%). Adapun yang beragama Islam berjumlah 12%, Kristen, Sikh dan lainnya. Ekonomi India mengandalkan sektor pertanian dan peternakan. Pendapatan dari sektor ini mencapai 34% dari pendapatan negara. Sektor pertanian sendiri mampu menyerap 69% tenaga kerja yang ada. Industri perfilman India tergolong maju pesat dan

mampu menyedot banyak tenaga kerja. Bollywood merupakan contoh konkritnya, dengan model dan alur cerita dalam film yang diiringi dengan nyanyian dan tarian tersebut selain mendatangkan profit juga melestarikan seni dan budaya lokal.

Sebagai salah satu kawasan di Asia Selatan yang memiliki kebudayaan yang megah di dunia menyaingi Cina, India memiliki daya tarik tersendiri bagi bangsa lain yang tertarik dalam bidang kesusasteraan, seni dan arsitektur. Rasa nasionalisme bangsa India mulai berkembang setelah hasil-hasil kebudayaan mereka banyak yang dipelajari dan kemudian dialih bahasakan oleh sarjana-sarjana asing ke dalam bahasa-bahasa barat. Pada awal abad ke-19 kekayaan di belahan daratan India menarik pedagang bangsa Eropa yang suka bertualang. Di pertengahan abad ke-19 India merupakan kawasan kekuasaan kolonial Inggris yang paling kaya permata. Kolonialisme Inggris menguasai seluruh belahan benua itu.

Meskipun India sekarang sudah merdeka, pendapatan per kapita India adalah US\$ 200 per tahun. Diketahui bahwa 30% penduduk India berada dibawah garis kemiskinan. Kesenjangan sosial cukup menjolok dalam hal ekonomi dan distribusi kesehatan. Bisa dimaklumi bahwa populasi penduduk yang sangat besar tersebut, disamping sebagai human capital juga merupakan beban negara. Untuk mengejar ketertinggalan itu, pemerintah India sangat sadar bahwa dunia pendidikan adalah salah satu sektor kunci. Oleh karena itu, sejak merdeka pemerintah India berjuang memperbaiki dunia pendidikan, sehingga dengan majunya dunia pendidikan, maka kualitas bangsa juga akan terdongkrak dengan sendirinya.

Kini dunia pendidikan India sudah mengalami kemajuan pesat. Bahkan kini India menjadi salah satu negara tujuan bagi warga negara Asia yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi, termasuk dari Indonesia. Kemajuan pendidikan di India tidak lepas dari sistim pendidikan yang diterapkan di sekolah-sekolah disana. Kemudian kebanggaan akan bangsa dan budaya India sangat kental di kalangan warganya. Khusus Mata Pelajaran Sejarah, Pemerintah India menaruh perhatian yang cukup besar karena dari mata pelajaran Sejarah inilah kebanggaan akan bangsanya dipupuk sehingga sistim pendidikan sejarah di India menjadi menarik untuk dikaji bersama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan yang akan diuraikan dalam pembahasan tentang Kurikulum Pendidikan Sejarah di India ini mencakup Sistim Pendidikan di India, Struktur Kurikulum Pendidikan, Pendidikan Sejarah dalam Struktur Kurikulum, Landasan Filosofis Pendidikan Sejarah, Tujuan Kurikulum Pendidikan Sejarah, Materi Kurikulum Pendidikan Sejarah, Metode Pembelajaran dan Sistim Penilaian

Sistim Pendidikan di India

Dalam sistim pemerintahan India, masalah pendidikan dikelola oleh badan tersendiri yang disebut dengan National Council of Educational Research and Training (NCERT). NCERT ini yaitu lembaga pemerintah yang menangani dunia pendidikan yang berada dibawah Kementerian Pengembangan Sumber Daya Manusia atau *Human Resource Development Ministry*. Kurikulum pendidikan diatur dalam suatu kurikulum nasional yang diberi nama *Natonal Curriculum Framework*

2005 yang diterbitkan oleh NCERT.

Pemerintah India telah menetapkan kebijakan sistem pendidikan 10-2-3 tahun usia sekolah. Tingkat awal, 10 tahun sebagai pendidikan dasar dan terbagi dalam tiga jenjang yaitu *Primary School* (5 tahun), *Upper Primary School* (3 tahun), dan *Secondary School* (2 tahun). Jenjang berikutnya ditempuh selama 2 tahun sebagai persiapan memasuki pendidikan tinggi. Untuk pendidikan kejuruan, jurusan teknik dan bisnis sudah mulai sejak *secondary school*.

Struktur pendidikan sekolah dengan sistem 10-2-3 tahun ini telah diadopsi oleh seluruh negara bagian dan teritori India (*Union Territory, UT*). Bila dijabarkan dalam tingkat usia sekolah akan tampak sebagai berikut :

Tingkat dasar (*primary stage*) yang meliputi kelas I sampai V yakni 5 tahun masa belajar. Ini dilaksanakan di 20 negara bagian dan teritoria India

Pendidikan tingkat menengah (*middle stage*) meliputi kelas VI sampai VIII diselenggarakan di 18 negara bagian dan teritoria India.

Pendidikan menengah atas (*secondary stage*) meliputi kelas IX sampai X. Kelas ini diselenggarakan di 19 negara bagian dan teritoria India

Pendidikan kejuruan, diperlakukan khusus. Konsep kejuruan di India, baik jurusan teknik maupun bisnis merupakan pengejawantahan dari konsep pemikiran Bapak Pendiri India, Mahatma Gandhi, yaitu implementasi dari pembentukan "manusia berkepribadian yang utuh, kreatif dan produktif". Pada tahun 1960 minat siswa pada pendidikan kejuruan sangat kecil. Hingga tahun 1992 siswa

yang mengikuti pendidikan dalam bidang ini hanya 6%. Akan tetapi pada tahun 1995 terjadi lonjakan signifikan, yaitu sebesar 25% dari keseluruhan siswa yang mengikuti pendidikan tinggi mengambil pendidikan kejuruan ini. Sementara itu, pendidikan nonformal dilaksanakan dengan dibentuknya lembaga pendidikan yang bersifat terbuka bagi semua siswa, tidak terikat dengan proses pembelajaran secara langsung dan beban biaya yang tinggi.

Struktur Kurikulum Pendidikan

Kurikulum dan standar sekolah dasar mencakup pelajaran membaca, menulis dan mengeja bahasa daerah, sejarah dan kebudayaan India, geografi, sastra, sains dan kesehatan. Di sekolah menengah juga menerima pelajaran sains dan matematika bahkan juga beberapa sekolah mengganti kajian ilmu-ilmu sosial dengan sejarah dan geografi serta sedikit sekolah menengah atas yang memiliki banyak tujuan menawarkan jenis pelatihan manual dan ilmu kerumahtanggaan (*home sciences*). Bahasa Hindi diajarkan (meskipun tidak selalu diberikan kecuali India bagian selatan) di seluruh sekolah menengah atas. Bahasa Inggris justru diberikan bahkan kadang kala diperlukan bagi sekolah menengah atas.

Struktur Kurikulum Pendidikan India ada sedikit perbedaan dengan Indonesia. Di bawah ini disajikan matrik perbandingan kurikulum pendidikan India dan Indonesia.

Perbandingan Kurikulum Indonesia dan India

INDIA	INDONESIA
<p>Jenjang Pendidikan:</p> <p>Lower Primary School : 5 tahun (I-V)</p> <p>Upper Primary School : 3 tahun (VI-VIII)</p> <p>Secondary School : 2 tahun (IX-X)</p> <p>Higher Secondary School: 2 tahun (XI-XII)</p> <p>Program Wajib Belajar 8 tahun</p> <p>Sejarah Kurikulum Pasca Perang Dunia II:</p> <p>Secondary Education Commission (1952-53)</p> <p>Indian Education Commission (1964-66)</p> <p>Bhagwan Sahai Committee Report (1972)</p> <p>National Policy on Education (1986)</p> <p>Revised National Policy (1992)</p> <p>National Curriculum Framework (NCF-2005)</p> <p>Bahan Perbandingan:</p> <p>Kurikulum Nasional 2005</p> <p>Mata Pelajaran SMA (XI dan XII)</p> <p>Political Science</p> <p>Economics</p> <p>Sociology</p> <p>Psychology</p> <p>Business Studies</p> <p>Accountancy</p> <p>English</p> <p>Bahasa Hindi</p> <p>Chemistry</p> <p>Physics</p> <p>Biology</p> <p>Mathematics</p> <p>Social Science</p> <p>History</p> <p>Geography</p>	<p>SD : 6 tahun (I-VI)</p> <p>SMP : 3 tahun (VI-IX)</p> <p>SMA : 4 tahun (X-XII)</p> <p>Program Wajib Belajar 9 tahun</p> <p>Kurikulum sederhana (1947-1964)</p> <p>Pembaharuan kurikulum (1968 dan 1975)</p> <p>Kurikulum berbasis keterampilan proses (1984 dan 1994),</p> <p>Kurikulum berbasis kompetensi (2004)</p> <p>Kurikulum KTSP (2006 dan 2013)</p> <p>Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 2004</p> <p>Kelas X-XII</p> <p>Agama</p> <p>PKn</p> <p>Bahasa Indonesia</p> <p>Bahasa Inggris</p> <p>Matematika</p> <p>Kimia</p> <p>Fisika</p> <p>Biologi</p> <p>Sejarah</p> <p>Geografi</p> <p>Ekonomi</p> <p>Olah raga/kesehatan</p> <p>Seni</p> <p>Mulok</p> <p>Kelas XI dan XII tergantung jurusan peminatan.</p>

INDIA	INDONESIA
Environmental Bahasa Sansekerta (Mulok) Bahasa Tamil (Mulok) Entrepreneurship (Mulok) Materi Pelajaran Sejarah SMA: Kelas XI: India Kuno Awal Zaman Madya India Kelas XII: India dibawah Kekaisaran Mughal India modern Catatan: Di kelas ini tidak diajarkan Sejarah Dunia Sejarah Dunia diajarkan hanya sampai SMP (Kelas IX dan X)	Kelas X: Sejarah Indonesia Kuno Sejarah Dunia Kelas XI: Sejarah Indonesia Madya Sejarah Dunia Kelas XII: Sejarah Indonesia Modern Sejarah Dunia

Pendidikan Sejarah dalam Struktur Kurikulum

Sejarah menduduki posisi penting dalam kurikulum sekolah di India. Merujuk kurikulum India, dari tingkat dasar hingga menengah, Sejarah menjadi mata pelajaran tersendiri. Di sekolah menengah, materi pelajaran Sejarah diarahkan untuk memperkenalkan siswa pada pertumbuhan masyarakat India dari jaman pra-sejarah hingga hari ini. Penekanannya juga diubah dari sejarah dinasti dan kejadian-kejadian politik ke kondisi sosial dan ekonomi serta tumbuhnya berbagai aspek kebudayaan di berbagai wilayah India. Rincian silabus dapat dilihat dalam bagan diatas.

Tujuan Kurikulum Pendidikan Sejarah

Merujuk S.K. Kochar (2008), tujuan Pendidikan Sejarah di India adalah.

- Memberikan pemahaman tentang tahap-tahap perkembangan masyarakat India dari abad ke abad.
- Menumbuhkan penghargaan terhadap berbagai komponen budaya India dan bangga terhadap hasil yang telah dicapai oleh masyarakat India di berbagai wilayah.
- Menumbuhkan pemahaman kritis tentang masa lalu sehingga para siswa dapatnterbebas dari prasangka yang irasional dan fanatic, pikiran sempit dan komunalisme, mencerahkannya dengan pemikiran ilmiah dan berorientasi ke masa depan.

- Mengembangkan penghargaan terhadap kebudayaan yang campur baur, kekayaan dan keragamannya, serta proses perkembangan yang dilaluinya yaitu proses perubahan internal dalam kebudayaan India, interaksinya dengan kebudayaan lain dan pengaruh kebudayaan lain.
- Mengembangkan kemampuan untuk mengkaji masalah-masalah kontemporer masyarakat India dalam perspektif sejarahnya.
- Memajukan studi tentang sejarah perkembangan India dalam kaitannya dengan sejarah perkembangan manusia secara keseluruhan.
- Mengembangkan pemahaman tentang proses perubahan sehingga pemahaman para siswa tentang proses perubahan yang terjadi dewasa ini semakin dalam, penghargaan terhadap aspirasi untuk melakukan perubahan guna menciptakan ketertiban social.
- Mengembangkan kesadaran tentang pentingnya kerja pemeliharaan monument-monumen sejarah dan berpartisipasi aktif didalamnya.

**Materi Kurikulum Pendidikan Sejarah
Materi Kurikulum Pendidikan Sejarah
Di India:**

Silabus Sejarah untuk Kelas I-V

Kelas I sampai II:

- Kehidupan manusia
 - o Masyarakat memiliki pola hidup yang berbeda.

- Kehidupan di distrik, provinsi, dan negara yang berbeda telah berubah akibat usaha-usaha yang dilakukan oleh manusia.

Kelas III

- Warisan Kita:
 - o Temuan dan ciptaan manusia di zaman kuno telah memainkan peranan penting dalam perbaikan kehidupan manusia
 - Umat manusia selalu berusaha memperbaiki kehidupannya dengan berusaha memahami alam dan memanfaatkan berbagai pemberian jalan.

Kelas IV

- Masyarakat India:
 - o Masyarakat India memiliki kebudayaan dan tradisi tersendiri
 - o India memiliki kesatuan dan keseragaman.
 - Warisan India I dan Warisan India II

o Sepanjang sejarah, peradaban semakin diperkaya oleh usaha manusia untuk memperbaiki kehidupannya.

o Para penguasa, pembaru, penulis, ilmuwan, dan orang-orang suci memberikan sumbangannya untuk kemajuan peradaban dengan cara masing-masing.

Kelas V

- Perserikatan Bangsa-Bangsa
 - o Kerja sama diantara bangsa-bangsa sangat penting bagi kemajuan dan perdamaian
 - o Beberapa organisasi sangat penting untuk menjadi semacam penjaga bagi tercapainya tujuan.

- Dunia yang berubah
 - o Berbagai tonggak penting telah dipancangkan dalam perjalanan manusia menuju peradaban
 - o Ada berbagai penemuan dan ciptaan yang hebat dan ilmuwan yang membantu dalam proses pengembangannya.
- Orang-orang Hebat
 - o Ada banyak orang hebat di berbagai belahan dunia yang pengaruhnya mendunia.

Kelas VI

- Pra-sejarah
 - o Evolusi manusia di bumi berjalan dengan lambat.
 - o Manusia terus –menerus berjuang memperbaiki nasibnya dengan berusaha memahami alam dan memanfaatkannya.
- Kebudayaan Harappa
 - o Kebudayaan Harappa menandai mulainya peradaban India
- Hidup di jaman Veda
 - o Selama millennium kedua sebelum masehi dan pertengahan pertama millennium pertaqa setelah masehi, sejumlah kebudayaan di berbagai wilayah di India
 - o Pada periode inilah masyarakat berbahasa Indo-Arya datang ke India dan membangun kebudayaan baru.
- Kebangkitan Maghada
 - Bangkitnya Maghada membuka jalan bagi penyatuan politik di India
 - o Kerajaan Maurya
 - o Penyatuan politik sebagian besar wilayah India dan pemerintah yang efisien dibangun oleh Kerajaan Maurya,

penjaga perdamaian dan stabilitas.

- o India dari 200 SM sampai 300 M
- o Periode ini ditandai dengan datang dan berasimilasinya berbagai kelompok bangsa asing

Kelas VII

- India Zaman Madya
 - o India tahun 800-1200 M
 - o Kesultanan Delhi
 - o Kedatangan bangsa Mongol dan Eropah

- o Kekaisaran Mongol

- o Runtuhnya Kekaisaran Mongol

Kelas VIII

- India Modern
 - o India pada abad ke-18
 - o Tumbuh dan berkembangnya kekuasaan Inggris di India
 - o Struktur pemerintahan Inggris di India
 - o Dampak kekuasaan Inggris terhadap perekonomian India dan masyarakatnya sampai tahun 1875
 - o Pemberontakan 1857
 - o Reorganisasi pemerintahan Inggris di India
 - o Perubahan ekonomi dan sosial setelah tahun 1857
 - o Bangkitnya Nasionalisme India
 - o Mencapai kemerdekaan

Kelas IX-X

- Sejarah Umat Manusia (Dengan accuan utama India)

Kelas XI-XII

- (Pengulangan materi dari India Kuno hingga India Modern)

Sistim Penilaian

Sistem ini dinamakan CCE (*Continuous and Comprehensive Evaluation*), yang merupakan sistem penilaian berbasis sekolah yang mencakup semua aspek perkembangan siswa. CCE juga merupakan bentuk evaluasi dimana siswa dinilai secara keseluruhan dan persentase nilai pada akhir tahun berasal dari penilaian internal yang dilakukan terus menerus. Hal ini berbeda dari pola biasanya dan menggantikan model evaluasi sebelumnya dimana siswa hanya dinilai dari hasil ujian akhir saja. Siswa yang mengikuti sistem penilaian CCE akan diberikan nilai yang meliputi A+, A, B, C, D dan E.

Sistem penilaian CCE sangat membantu para siswa, orang tua, dan para guru. Tujuan utama dari CCE adalah untuk mengurangi stress dan kecemasan tinggi yang menjadikan pengaruh buruk pada siswa terutama tingkat SMP dan SMA. CCE secara otomatis menurunkan angka putus sekolah dan meningkatkan kinerja siswa. Penilaian dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. Penilaian secara komprehensif meliputi scholastic dan co-scholastic. Penilaian scholastic mencakup mata pelajaran tertentu sesuai dengan minat/jurusan yang diambil. Penilaian co-scholastic meliputi kecakapan hidup, sikap, norma, dan kegiatan pendukung lainnya. Penilaian komprehensif ini juga memasukkan berbagai instrumen dan teknik yang dilakukan dalam menilai siswa. Dengan demikian, CCE berperan penting untuk pembelajaran daripada menguji kapasitas hafalan siswa. Siswa akan belajar secara konseptual dan memiliki kesempatan untuk pengembangan diri mereka.

Sistem evaluasi ini juga menekankan pentingnya kebugaran fisik, keseimbangan emosional dan kewaspadaan mental siswa, sehingga siswa termotivasi dan diberikan waktu yang cukup untuk mengembangkan minat dan hobi mereka. Siswa juga dibekali dengan keterampilan yang berbeda, kemampuan berpikir kritis, pengembangan kreativitas dan keterampilan sosial yang adaptif dan kompetitif. Dalam sistem penilaian CCE terdapat penilaian formatif dan penilaian sumatif. Dalam Penilaian formatif siswa diberikan masukan secara reguler dan dimotivasi secara aktif melibatkan diri dalam pembelajaran mandiri. Penilaian ini meliputi Class work, Homework, Oral questions, Quizzes, Project, dan Assignments/Tests. Penilaian sumatif di CCE adalah penilaian kinerja siswa di akhir pengajaran.

Penilaian ini meliputi Tes Tengah semester dan Tes Akhir semester oleh sekolah dan Ujian Nasional dari Pemerintah Pusat dimana materi disesuaikan dengan kurikulum nasional. Penilaian Hasil Ujian dilakukan di Sekolah masing masing, sesuai ketentuan yang diatur oleh pemerintah Pusat. Penerapan CCE memberikan banyak keuntungan, antara lain meminimalisir kesalahan klasifikasi siswa berdasarkan nilai, mengurangi persaingan yang tidak fair antar siswa berprestasi di kelas, mengurangi tekanan sosial yang tinggi yang berdampak pada psikologis siswa, memberikan motivasi lebih kepada siswa untuk belajar mandiri, membuat siswa lebih fleksibel dengan banyak penilaian berdasarkan potensi siswa, dan menuju lingkungan belajar yang lebih baik. Dengan CCE, beban belajar siswa menjadi berkurang dan siswa diberikan gambaran yang lebih seimbang dalam hal penilaian akhir.

KESIMPULAN

Pendidikan modern di India seringkali dikritisi karena mendasarkan pada sistem penghafalan. Penekanan ditujukan pada lulusnya nilai ujian dengan persentase yang tinggi. Beberapa institusi memberikan pentingnya pengembangan kepribadian dan kreativitas di antara pelajar. Akhir-akhir ini, pemerintah terbebani dengan meningkatnya tingkat bunuh diri dari pelajar dikarenakan kegagalan dan rendahnya nilai, khususnya pada kota-kota besar di India, walaupun kasus seperti ini sangat jarang.

Banyak pihak yang juga mengkritisi terhadap kebijakan reservasi berdasarkan kasta, bahasa, dan agama dalam sistem pendidikan India. Pada kenyataannya hanya sedikit kasta rendah yang memperoleh manfaat dari reservasi tersebut dan juga terjadinya pemalsuan surat keterangan kasta dalam jumlah yang cukup banyak. Lembaga pendidikan juga memberikan kesempatan kepada kaum minoritas (selain Hindu) atau minoritas status bahasa. Lembaga seperti ini, 50% dari kursinya disediakan untuk pelajar dari agama tertentu atau mereka yang mempunyai bahasa ibu tertentu. Misalnya, banyak universitas dijalankan oleh Jesuit dan Salesian memiliki 50% kursi yang disediakan untuk agama Katholik.

Dalam hal bahasa, suatu lembaga dapat membuat ketentuan bagi para pengguna bahasa minoritas hanya pada negara bagian di mana bahasa tersebut bukanlah bahasa resmi. Contohnya, universitas teknik dapat menentukan sendiri sebagai lembaga bahasa minoritas (Hindi) pada negara bagian Maharashtra, di mana bahasa resminya adalah Marathi, tetapi tidak bisa diterapkan di negara bagian Madhya Pradesh or Uttar Pradesh yang juga menggunakan bahasa

resminya Hindi. Reservasi seperti ini di satu sisi memang menguntungkan kaum minoritas, tetapi di sisi lain dapat menjadi penyebab keretakan di antara banyak komunitas. Begitu banyak pelajar dengan nilai rendah diterima masuk, sedangkan mereka yang memiliki nilai baik terkadang tidak dapat diterima. Kritik dilayangkan bahwa reservasi seperti ini sangat mungkin menciptakan kerenggangan di tengah-tengah masyarakat. Korupsi yang menjamur di India juga menjadi wacana penting dalam sistem pendidikan India.

Daftar Pustaka

- Marie Lall, *The Challenges for India's Education System*, Chatham House
- Department of School Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development, Government of India Elementary Education in India, 2010
- Chouhan, Mansingh. *History Curriculum Development in India since 1947*, University of Wroclaw, Wroclaw,
- Kochar, S. S., *Teaching of History*, Sterling Publishers, 2008
- Muralidharan Khartik, *Profile of Indian Education System, Report on The System of Education in India*, Nordic Recognition Information Centres, 2006